

BUKU BACAAN SOSIAL DEMOKRASI 1

Tobias Gombert dkk.

Landasan Sosial Demokrasi



AKADEMIE
FÜR SOZIALE
DEMOKRATIE

**FRIEDRICH
EBERT** 
STIFTUNG

ISBN 978-979-1998-7-8



Dipublikasikan oleh
Friedrich-Ebert-Stiftung
Akademie für Soziale Demokratie
Bonn

Penerjemah: Ivan A. Hadar (penerjemah; penyelaras), Pipit Rokhiyat, Suchyar Effendi
Foto Sampul: Frédéric Cilon, PhotoAlto

Cetakan I, Desember 2010
Cetakan II, Juli 2016

Isi publikasi ini menjadi tanggung jawab para penulis setiap bab. Pendapat yang tertuang dalam buku ini, tidak sepenuhnya sejalan dengan garis kebijakan

Friedrich-Ebert-Stiftung

BUKU BACAAN SOSIAL DEMOKRASI 1

Tobias Gombert dkk.

Landasan Sosial Demokrasi

DAFTAR ISI

<i>Pengantar</i>	4
<hr/>	
<i>1. Apa itu Sosial Demokrasi?</i>	6
<hr/>	
<i>2. Nilai-nilai Dasar</i>	9
<i>2.1. Kebebasan</i>	11
<i>2.2. Kesenjangan / Keadilan</i>	19
<i>2.3. Solidaritas</i>	37
<i>2.4. Apa Kata (Kelompok) Lain?</i>	40
<i>2.5. Nilai-nilai Dasar dalam Praktek</i>	43
<hr/>	
<i>3. Model-model Kemasyarakatan dalam Perbandingan</i>	59
<i>3.1. Kapitalisme Pasar dan Demokrasi</i>	62
<i>3.2. Posisi Liberal</i>	67
<i>3.3. Posisi Konservatif</i>	70
<i>3.4. Sosial Demokrasi dan Sosialisme Demokrasi</i>	72
<hr/>	
<i>4. Teori-teori Sosial Demokrasi Thomas Meyer</i>	86
<i>4.1. Titik Awal</i>	89
<i>4.2. Libertarisme vs. Sosial Demokrasi</i>	93
<i>4.3. Ekskurs: Tiga Nilai-nilai Dasar, Hak-hak Dasar dan Perangkatnya</i>	97

<i>4.4. Hak-hak Kebebasan Positif dan Negatif</i>	<i>102</i>
<i>4.5. Kewajiban Negara untuk Bertindak</i>	<i>105</i>
<i>5. Model Bangsa-bangsa</i>	<i>107</i>
<i>5.1. Amerika Serikat</i>	<i>108</i>
<i>5.2. Britania Raya</i>	<i>115</i>
<i>5.3. Jerman</i>	<i>123</i>
<i>5.4. Jepang</i>	<i>130</i>
<i>5.5. Swedia</i>	<i>137</i>
<i>6. Sebuah Permulaan di Akhir Buku</i>	<i>145</i>
<i>Daftar Pustaka</i>	<i>148</i>
<i>Referensi Bahan Bacaan</i>	<i>152</i>
<i>20 Kata Kunci Penting</i>	<i>159</i>
<i>Daftar Singkatan dan Istilah</i>	<i>160</i>
<i>Komentar Terhadap Seri Buku Ini</i>	<i>161</i>
<i>Tentang Penulis</i>	<i>163</i>

PENGANTAR

Politik membutuhkan orientasi yang jelas. Hanya mereka yang secara jelas merumuskan apa yang dituju, dipastikan akan menggapai tujuannya serta mampu membuat sesamanya bersemangat. Karena itu, dengan mempublikasikan buku ini, kami ingin mendiskusikan pertanyaan terkait makna Sosial Demokrasi di abad 21 ini. Apa pula nilai-nilai yang menjadi landasannya? Begitu juga dengan apa yang menjadi tujuan, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam praktek?

Menjadi kesepakatan bahwa Sosial Demokrasi bukanlah sebuah konstruksi yang kaku serta baku sepanjang masa, melainkan sesuatu yang secara terus menerus diperbaharui dan secara demokratis harus diperjuangkan. Karena itu, kumpulan tulisan ini juga tidak memberikan jawaban final, melainkan mengundang Anda untuk mencermati dan terus mengembangkan pemikiran.

Buku ini sebenarnya ditujukan kepada kelompok terbatas peserta “Akademie für Soziale Demokratie” (Akademi Sosial Demokrasi) sebagai bahan dasar yang penting. Selain itu, buku ini juga bisa dimanfaatkan oleh mereka yang secara aktif tertarik untuk mengembangkan - pemikiran dan praktek - Sosial Demokrasi.

Menelusuri halaman demi halaman buku ini, Anda akan menemukan berbagai “pintu masuk” terkait Sosial Demokrasi. Dimulai dari nilai-nilai dasar Sosial Demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan dan solidaritas. Setelah itu, terdapat ulasan perbedaan antara Sosial Demokrasi dengan aliran-aliran politik lainnya. Sebagai penutup, dalam “Theorie der Sozialen Demokratie”, Thomas Meyer meletakkan informasi dasar penting untuk mendiskusikan praktek sosial demokrasi di lima negara.

Buku bacaan ini adalah yang pertama dalam serial “Landasan Sosial Demokrasi” yang diterbitkan sebagai modul seminar pada Akademi Sosial Demokrasi”.

Secara tulus, dengan ini kami ingin berterima kasih kepada Tobias Gombert dan Martin Timpe. Sebagian besar buku ini, dirumuskan oleh Tobias Gombert dan - pada bagian tertentu - dibantu oleh Martin Timpe. Keduanya, dengan sangat kompeten dan pemahaman yang mendalam juga melakukan kegiatan redaksional buku ini. Hanya dengan keterlibatan penuh mereka, buku ini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Untuk mereka berdua serta semua penulis dalam buku ini kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik.

Simbol dari "Akademie für Soziale Demokratie" adalah Kompas. Bersama serial buku dari Akademie ini, "Friedrich-Ebert-Stiftung" ingin mengajukan sebuah kerangka untuk memperjelas posisi dan orientasi. Kami akan sangat bergembira bila anda memanfaatkan tawaran ini dalam menentukan arah dan tujuan politik. Sosial demokrasi hidup dan berkembang hanya ketika setiap warga, lelaki dan perempuan, senantiasa mengolah dan memperjuangkannya.



Christian Krell
Ketua
"Akademie für Soziale Demokratie"



Julia Bläsius
Pemimpin Proyek
Buku Bacaan Sosial Demokrasi

1. APA ITU SOSIAL DEMOKRASI?

*Apa itu sosial demokrasi?
empat jawaban*

“Bukankah sosial demokrasi adalah istilah yang secara otomatis menerangkan maknanya sendiri? Sebuah istilah yang menyodorkan janji untuk selalu berada dalam lingkup demokrasi serta membawa manfaat berupa kesetaraan secara sosial bagi semua warga dalam sebuah sistem kemasyarakatan? Bukankah hal-hal tersebut adalah sebuah keniscayaan?”, ungkap seseorang.

„Sosial demokrasi? Bukankah kita sudah memiliki sebuah sistem ekonomi pasar sosial, yang dikembangkan dalam sebuah model Jerman?”, tanya yang lain.

„Sosial demokrasi? Itu milik SPD (Partai Sosial Demokrasi Jerman) dan, karena itu, menjadi kepedulian para Sosial-Demokrat¹, baik perempuan maupun laki-laki. Itu adalah teori mereka”, demikian pendapat orang ketiga.

„Mengapa sosial demokrasi, bukan sosialisme demokratis? Yang terakhir itu adalah istilah yang lazim digunakan”, ungkap lainnya.

Siapa yang benar?

Paling lambat, sampai di sini, diskusi kita telah menimbulkan kebingungan. Siapa yang benar? Lagi-lagi sesuatu yang melelahkan dan tidak terlalu membantu.

Mengatasi itu, kita perlu menyepakati sebuah ‘bahasa bersama’ untuk memahami dan menjelaskan perbedaan posisi. Lebih dari itu, untuk mencapai tujuan perlu dicari sebuah posisi bersama.

Kembali ke empat pertanyaan di atas terkait pengertian sosial demokrasi. Semuanya mengacu pada hal penting terkait diskusi tentang sosial demokrasi. Yang satu berbicara tentang landasan dan persyaratan yang diharapkan atau yang seharusnya diberikan oleh sosial demokrasi.

Sementara yang lain berkuat lebih pada pertanyaan apa yang sudah dilakukan, dibuktikan lewat uji empiris dalam masyarakat.

1) Dalam buku ini, ungkapan yang dipakai mensetarakan perempuan dan laki-laki.

Sebaliknya yang ketiga bertanya siapa yang bisa menjadi penyangga aspirasi sosial demokrasi dari masyarakat. Pertanyaan ini pun sangat patut diajukan.

Pihak keempat bertanya, apa keuntungannya memakai istilah yang berbeda (sosial demokrasi) dari apa yang lazim (sosialisme demokratis). Pertanyaan ini juga mengacu pada apa yang menjadi inti-sari sosial demokrasi dan apa yang membedakannya dari konsep-konsep lain.

Siapapun yang ingin berbicara tentang sosial demokrasi, harus terlebih dahulu memperjelas apa yang dimaksud, dan dengan siapa ia berbicara. Sosial demokrasi bukanlah sebuah istilah yang jelas – orang mencitrakannya melalui berbagai anggapan dan pandangan yang berbeda. Istilah ini tergantung pada pandangan masyarakat karena memang mempengaruhi masyarakat dan oleh berbagai kelompok kepentingan dimanfaatkan atau ditolak.

Empat pertanyaan di atas mensyaratkan keharusan memperjelas defenisi tentang sosial demokrasi sebelum digunakan. Lebih dari itu, kita juga harus memahami bentuk masyarakat yang pas dengan istilah tersebut.

Istilah „sosial demokrasi“ dalam berbagai diskusi teori diformulasikan secara berbeda. Tidak ada sebuah defenisi yang seragam, baku dan mengikat.

Lalu, apa dampak dari defenisi yang berbeda-beda itu? Bila hal tersebut terkait diskusi ilmiah, harus diperbandingkan antara landasan dan penjelasannya. Begitu pula, perlu diuji alasan-alasan apa saja yang dipakai untuk menetapkan sebuah defenisi serta membandingkannya dengan temuan lapangan. Harus pula diuji apakah berbagai defenisi itu saling bertolak-belakang satu dengan lainnya, begitu pula apakah data-data lapangan sudah pas serta apakah sumber-sumber informasi dianalisa secara tepat.

Secara ilmiah, pertanyaan tersebut penting. Namun, bagi mereka yang secara profesional tidak berkecimpung dalam bidang ilmiah, melainkan (dalam waktu waktu senggang) aktif mengikuti persoalan sosial-politik, biasanya tidak terlalu memiliki waktu untuk secara intensif mengulas persoalan teoretis. Bila demikian, apa yang harus dilakukan tanpa harus mengesampingkan defenisi ilmiah serta penjelasannya?

Keharusan sebuah defenisi

Defenisi ilmiah untuk „Sosial Demokrasi“

Langkah penerapan

Buku ini tidak menawarkan solusi, namun bisa menjadi pemicu diskusi. Anda akan menemukan berbagai pendekatan politis dan ilmiah yang, secara sadar, diutarakan dalam buku ini. Karena orientasi hanya bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing – buku ini tidak bisa mengambil peran tersebut, ia hanya bisa menjadi pemicu.

Karena itu, selanjutnya kita akan coba mengulas berbagai pendekatan yang berbeda. Setiap dari kita akan menentukan, mana yang menurut kita paling pas. Dari pertanyaan awal di atas, terdapat beberapa hal yang bersifat normatif, karena mengajukan pertanyaan terkait landasan dan nilai-nilai dasar sosial demokrasi; teoretis karena mencermati teori sosial demokrasi; dan empiris karena membahas penerapan sosial demokrasi di beberapa negara.

Kita akan membahas tiga bidang tersebut dalam bab-bab secara terpisah.

Tataran normatif dalam dua bab berikut (bab 2 dan 3), akan memperjelas apa yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar dari kebebasan, keadilan dan solidaritas serta mengajukan pertanyaan tentang penerapan model masyarakat (liberalisme, konservatisme, sosialisme / sosial demokrasi).

Tataran teoretis dalam bab 4 membahas teori sosial demokrasi dari Thomas Meyer. Pilihan atas teori dari Thomas Meyer karena dianggap lengkap dan mencakup berbagai tataran.

Pada bab 5 terkait tataran empiris berupa penerapan sosial demokrasi di beberapa negara, buku ini juga berorientasi pada karya Thomas Meyer. Seperti digambarkan dalam bukunya, "*Praxis der Sozialen Demokratie*" dengan mengambil contoh beberapa negara diperjelas bahwa sosial demokrasi dengan instrumen dan tingkat keberhasilan yang berbeda bisa diterapkan secara empiris.

2. NILAI-NILAI DASAR

Dalam bab ini :

- diterangkan tentang kebebasan, kesetaraan/keadilan dan solidaritas sebagai nilai-nilai dasar sosial demokrasi;
- dicermati nilai-nilai dasar tersebut dalam perspektif sejarah dan filosofis yang dikaitkan dengan politik aktual;
- didiskusikan pemahaman nilai-nilai dasar tersebut oleh partai-partai politik yang memiliki wakil di parlemen;
- digambarkan arti dari nilai-nilai dasar tersebut dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perguruan tinggi.

„Kebebasan! Kesetaraan! Persaudaraan!“ Itulah slogan Revolusi Perancis. Hingga saat ini, partai politik demokratis selalu mengacu pada nilai-nilai dasar ini. Formulasi nilai-nilai dasar ini dimulai sejak era peradaban warga (*civilization*), dan kemenangannya dimulai paling lambat sejak pertengahan abad ke-20 – slogan yang menjadi tuntutan kepada negara dan masyarakat sebagai „common sense“.

Hal tersebut juga tercermin dalam hak-hak dasar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dengan dua pakta Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 1966, telah dicapai pengakuan maksimal secara sosial, politik, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan karena telah diratifikasi oleh sebagian besar negara. Ia menjadi landasan tuntutan global. Hak-hak dasar perlu dijaga dengan cara memformalkan dan diterjemahkan dalam sebuah jaminan pemenuhan hak.

Pada saat yang sama perlu diingat bahwa hak-hak dasar yang ditetapkan bersama ini di banyak negara belum diterapkan, bahkan sebagian disalahgunakan untuk menentang HAM oleh negara yang telah meratifikasinya.

Jadi, apakah penerapan hak-hak dasar telah menjadi kenyataan dalam masyarakat? Dalam banyak hal masih perlu diragukan. Itu bukanlah sebuah pertanyaan teoretis, tetapi sebuah pertanyaan terkait tarik-menarik kepentingan antarpelaku dalam sebuah masyarakat pada setiap negara.

Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dan penerapannya dalam bentuk hak-hak dasar harus menjadi ukuran untuk menentukan arah kebijakan politik.

Sosial demokrasi juga berorientasi di tataran normatif pada nilai-nilai dasar dan

*Kebebasan!
Kesetaraan!
Persaudaraan!*

*Pakta HAM PBB
sebagai landasan*

*Nilai-nilai dasar dan
Hak-hak dasar*

hak-hak dasar. Ia berkembang pada tuntutan normatif dan dalam menjawab pertanyaan apakah secara nyata dimungkinkan menjadi inti dan arah kebijakan politik.

Nilai-nilai dasar dalam sejarahnya semenjak masa pencerahan (*Aufklärung*) pada abad ke-18, baik dalam defenisi maupun keterhubungannya dengan kenyataan, telah mengalami perubahan.

Saat ini, kita bisa mengatakan bahwa hal tersebut berangkat dari tiga nilai dasar, yaitu kebebasan, kesetaraan/keadilan dan solidaritas.

2.1. Kebebasan

Kebebasan dipastikan adalah nilai dasar yang secara luas diyakini oleh semua pelaku politik. Kebebasan dihubungkan dengan cara berpikir tercerahkan dan dimulainya era peradaban warga. Pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Karl Marx serta para pemikir kritis lainnya pada berbagai era dalam sejarah yang berbeda memikirkan dan mendeskripsikan kemungkinan realisasinya.

Diskusi tentang kebebasan – secara umum – ditandai oleh tiga pertanyaan pokok :

- Bagaimana mendefinisikan kebebasan?
- Bagaimana kebebasan direalisasikan dan dijamin?
- Di mana batasan kebebasan dalam sebuah masyarakat?

Untuk istilah „Kebebasan“, definisi dari filsuf Inggris John Locke yang paling pas :

„Kebebasan alami manusia ialah terbebas dari setiap kekuasaan duniawi (yang lebih tinggi), tidak tunduk pada kemauan atau kekuasaan seorang manusia (raja), melainkan sepenuhnya mengikuti aturan alami sebagai landasan hak-haknya. Kebebasan seorang manusia dalam sebuah masyarakat tidak berbasis pada kekuasaan (orang) lain yang dipaksakan berdasarkan keturunan, juga tidak pada kekuasaan dan keinginan atau keterbatasan sebuah undang-undang selain yang diputuskan dalam parlemen yang bisa dipercaya.“ (Locke 1977: 213 f.)

Dalam tradisi Locke, terdapat tiga dimensi kebebasan: kebebasan diri sendiri, kebebasan terkait pemikiran dan perasaan sendiri serta kebebasan dari barang yang secara legal adalah miliknya. Tiga dimensi kebebasan ini mewarnai berbagai konstitusi dan penetapan hak-hak asasi manusia. Banyak teori juga mengacu dan merupakan interpretasi definisi kebebasannya John Locke.

Akar dari
„Kebebasan“

Bagaimana
kebebasan
didefinisikan?

Kebebasan sebagai hak alami

John Locke berangkat dari kebebasan alami yang dimiliki setiap manusia, bukan dikembangkan dalam masyarakat, tetapi sudah ada sejak dilahirkan.

Namun, „Hak alami“ ini hanya bisa ditransformasikan dan “ditanamkan” menjadi hak setiap individu dalam sebuah masyarakat.

Bagaimana kebebasan dalam masyarakat bisa direalisasikan serta dijamin?

Argumentasi Locke ini pada intinya – mengikuti perubahan sesuai dengan perbedaan filosofis yang ada – hingga saat ini masih berfungsi dan selalu menjadi rujukan bila ingin memahami kebebasan sebagai sebuah nilai dasar. Locke dianggap sebagai pemikir liberalisme terpenting.

John Locke (1632 -1704) adalah salah satu penganut yang pertama dan terpenting dari liberalisme.

Locke secara mendasar mengembangkan apa yang disebut empirisme, yang meneliti bagaimana manusia dapat belajar lewat pengalamannya. Membandingkan pengalaman adalah titik masuk bagi sebuah pemikiran teoritis.

Tahun 1690, John Locke mempublikasikan *Two Treatises of Government*, di mana ia menjelaskan landasan teoretis yang merongrong monarki Inggris dengan mengembangkan sebuah konstitusi masyarakat berdasarkan kebebasan.

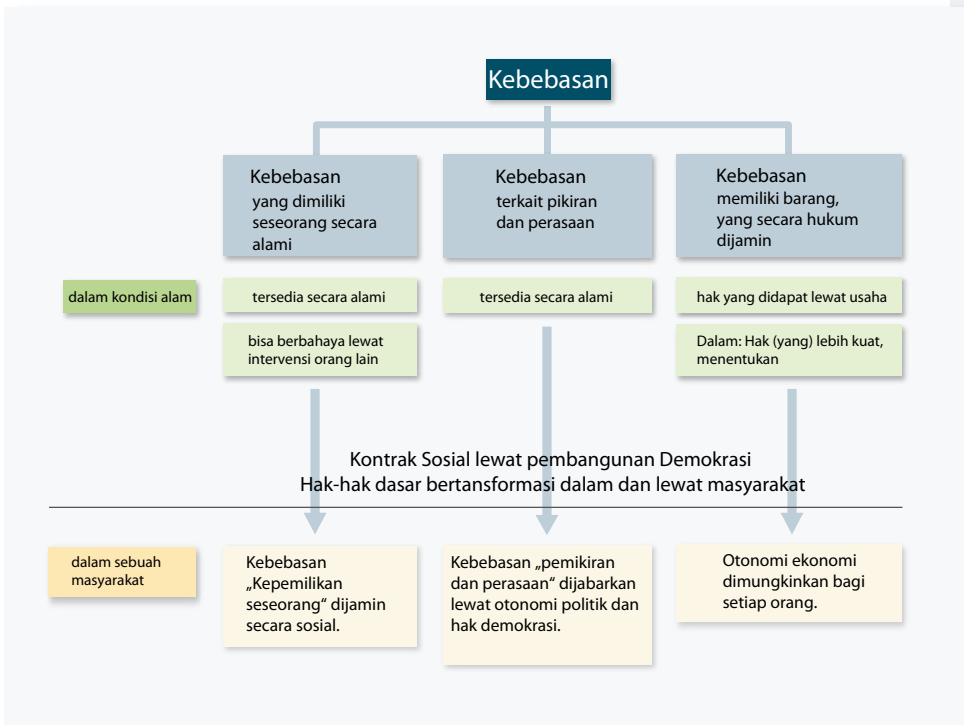
Meskipun demikian, defenisi yang selalu menjadi rujukan tidak bisa menyembunyikan bahwa ini sekedar risalah historis yang tidak bisa dipahami tanpa mencermati persyaratan/penyebab kelahirannya. Selain itu, ia tidak bisa dicangkokkan ke dalam kondisi hari ini. Hal ini juga bisa dilihat dari pertanyaan bagaimana kebebasan dalam sebuah masyarakat dijamin serta diwujudkan.

Kesetaraan alami dan kebebasan yang setara

Yang menentukan, bagi diskusi sejarah, bahwa Locke (dan para filsuf *Aufklärung* penerusnya) mengemukakan argumentasi melawan keyakinan bahwa ketidaksetaraan manusia secara alami menjadi alasan ketidakbebasan sebagian besar manusia. Kebebasan alami dan dengan demikian kebebasan yang berlaku sama bagi semua, adalah sebuah argumentasi yang bersifat revolusioner dalam sebuah masyarakat absolutis di mana para raja melegitimasi kekuasaannya sebagai pemberian Tuhan.

Meskipun demikian, bagi Locke, kebebasan bukanlah sesuatu yang diberikan secara alami, tapi harus lewat kontrak sosial dalam sebuah masyarakat sebagai sesuatu yang alami.

Dalam sebuah masyarakat, demikian argumentasi utamanya, kebebasan dijabarkan lewat kepemilikan seseorang, begitu pula kebebasan pikiran dan perasaan harus dijaga lewat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kedaulatan politik. Sementara kebebasan memiliki sesuatu memerlukan kebebasan bagi setiap orang untuk memiliki akses ke pasar. Kebebasan alami, dengan demikian tidak begitu saja diperoleh, tetapi harus dijamin lewat aturan-aturan dalam masyarakat.



Gambar 1: Defenisi kebebasan John Locke

Ketika pertanyaan mengarah pada bagaimana merealisasikan kebebasan, sudah sejak abad ke-18 terdapat kritik terhadap teori John Locke. Pengkritik terpenting adalah Jean-Jacques Rousseau, yang membantah sekaligus memperkaya Locke dalam empat butir utama berikut ini:

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), lewat karya-karya teoretisnya, dianggap sebagai salah seorang pencetus Revolusi Perancis. Rousseau menulis landasan bagi perkembangan kesenjangan dalam masyarakat, di mana secara empiris memasukkan aspek filsafat dan historis. Karya utama lainnya mendiskusikan teori negara demokratis dan pendidikan.

1. Sebuah kontrak sosial yang baik hanya bisa berfungsi ketika semua manusia sewaktu melahirkan (tatanan) masyarakat mengembalikan hak alaminya untuk kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga dari tatanan tersebut.
2. Kontrak sosial mengacu pada masyarakat warga-monarkis, bukanlah kontrak yang baik.
3. „Kebebasan“ hanya bisa langgeng bila semua keputusan politik terkait hukum berlaku sama untuk semua. Dengan begitu, setiap manusia berada di bawah kemauannya sendiri dan bebas.
4. Lebih dari itu, bagi Rousseau, „Kebebasan“ juga terkait dengan perkembangan pemikiran. Pada setiap orang, ia melihat adanya „kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemampuan“ („perfectibilité“)(Benner/Brüggen 1996: 24). „Kemampuan“ bukanlah sesuatu yang terlahir, tetapi dikembangkan lewat kemungkinan-kemungkinan belajar dan hidup dalam masyarakat.

*Idealnya: sebuah
masyarakat yang
bebas dan setara*

Butir pertama dari kritik Rousseau, memunculkan pertanyaan: Mengapa seseorang harus menyerahkan dahulu hak-hak alaminya dan memperolehnya kembali dari masyarakat? Bukankah dengan demikian, terbuka pintu bagi tirani? Rousseau bersikeras mempertahankan butir ini mungkin mengherankan. Namun, ia memformulasikan hal ini secara radikal, antara lain karena ia ingin memperjelas bahwa tidak ada warisan, kepemilikan yang berdampak terjadinya ketidaksetaraan sosial di dalam sebuah masyarakat untuk pencapaian kebebasan bagi semua. Ia memimpikan sebuah masyarakat yang bebas dan setara.

Rousseau, terutama mempertanyakan dampak riil dari kebebasan dalam sebuah masyarakat. Ia menganalisa bahwa kebebasan yang diproklamirkan waktu itu, hanya berlaku bagi orang kaya di hadapan orang miskin. Hal ini diperuncing dengan mengutip pidato seorang kaya, yang mempromosikan kontrak sosial yang salah dan demi kepentingannya sendiri:

„Marilah kita bersatu’, katanya kepada mereka [para orang miskin itu], untuk melindungi mereka yang lemah dari penindasan, mengamankan mereka yang rajin serta mengamankan setiap orang atas kepemilikannya. Marilah kita tegakkan aturan tentang keadilan dan perdamaian, yang mewajibkan setiap orang, tanpa memandang bulu serta keberuntungan, yang lemah dan yang berkuasa – semuanya tunduk pada kewajiban tersebut. Dengan kata lain: Jangan biarkan kita saling beradu kekuatan. Biarkan kita bersatu dalam sebuah kekuatan bersama secara maksimal.” (Rousseau 1997: 215-217)

Menurut Rousseau, kebebasan bisa dimanfaatkan sebagai „slogan kosong“. Karena itu, perlu dicermati bahwa kebebasan yang dijamin dalam sebuah masyarakat, juga adalah kebebasan yang berlaku bagi setiap individu.

Butir ketiga dari kritik Rousseau tentang aspek yang mendasar dari kebebasan, yaitu tentang keterkaitannya dengan kekuasaan. Sementara Locke (dan sebelum dia Thomas Hobbes yang bersuara lebih keras) berpendapat bahwa peraturan meskipun dilegitimasi oleh rakyat, tetapi rakyat tidak harus menjadi pelakunya. Dengan demikian, Rousseau sebenarnya berorientasi radikal-demokratis. Ia berargumentasi bahwa seseorang hanya akan bebas, yang berarti hanya tunduk pada kemauan politiknya semata, bila ia terikat pada peraturan/hukum di mana ia sendiri ikut terlibat di dalamnya.

Dengan butir keempat kritiknya, Rousseau memperkaya definisi kebebasan Locke pada salah satu sisi sentralnya. Ia meyakini pemahaman bahwa kebebasan manusia hanya bisa terlaksana bukan karena seseorang memiliki “kemampuan” alami, melainkan memiliki kesempatan/kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemampuannya (bandingkan dengan Benner / Brüggen 1996:24). Dengan demikian, pengembangan diri seorang manusia dan kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya merupakan tantangan utama masyarakat demokratis.

*Kebebasan
hanya bagi si kaya?*

*Hubungan
kebebasan
dan kekuasaan*

*„Kemampuan,
ragam kemampuan
untuk berkembang“*

Apa saja batasan kebebasan dalam masyarakat?

Pertanyaan seberapa jauh kebebasan seseorang dalam masyarakat, juga berhadapan dengan negara, hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Misalnya, negara boleh „menyadap secara masif“ atau, contoh lainnya, dalam keadaan darurat kementerian pertahanan bisa memberikan perintah menembak jatuh pesawat penumpang dalam banyak hal, batasan sebuah kebebasan menjadi perdebatan.

Dua jawaban

Dalam definisi batasan kebebasan, sering diajukan dua jawaban filosofis berikut:

„Dalam praktek, kelihatannya rakyat dalam sebuah demokrasi melakukan apa yang diinginkan. Namun, kebebasan politik tidak berarti melakukan apa saja yang diinginkan. Dalam sebuah negara, artinya di dalam sebuah masyarakat di mana terdapat hukum, kebebasan hanyalah berarti seseorang melakukan apa yang diijinkan, dan tidak dipaksa untuk melakukan apa yang tidak diinginkan olehnya. Sebaiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan independensi dan kebebasan. Kebebasan adalah hak untuk melakukan semua yang diijinkan secara hukum. Bila seorang warga bisa melakukan apa yang dilarang, maka berarti ia tidak lagi memiliki kebebasan karena yang lain juga memiliki hak/kekuasaan yang sama.“ (Montesquieu 1992: 212 f.)

Satu-satunya imperatif adalah bertindaklah menurut kaidah berupa keinginan bahwa tindakanmu itu menuruti aturan umum.“ (Kant 1995: 51)

Montesquieu

Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) adalah ahli hukum dan moral-filosof yang kini dikenal berkat karya utamanya “*Ober den Geist der Gesetze*”, 1748.

Antara lain, ia menganjurkan monarki konstitusional dan pembagian kekuasaan (Legislatif, Eksekutif und Judikatif).

Batasan kebebasan, menurut Montesquieu, terletak pada kewajiban menegakkan undang-undang, dan agar semua ikut menjaga undang-undang.

Rumusan Kant lebih luas dan mencakup paparan yang dideskripsikan secara abstrak: Setiap langkah harus dipertanyakan apakah undang-undang umum mampu dipraktikkan. Perluasan bahasan ini tidak hanya terkait dengan peneakan undang-undang, tetapi juga pada pemanfaatan kebebasan dalam kerangka undang-undang. Ilustrasinya diberikan dalam sebuah contoh sederhana berikut. Adalah tidak dilarang mengenderai sebuah mobil lapangan yang boros bensin dan merusak lingkungan, tetapi sebagai rumusan perundangan umum, hal tersebut perlu dinyatakan sebagai merusak lingkungan.

Immanuel Kant (1724-1804), hingga kini adalah satu dari filosof masa Pencerahan dari Jerman yang paling berpengaruh. Karyanya berkaitan dengan hampir semua bidang filsafat masa itu.

Karya-karya terpentingnya, a.l.: *Kritik der reinen Vernunft* (1781), *Kritik der praktischen Vernunft* (1788), *Kritik der Urteilskraft* (1790), *Zum ewigen Frieden* (1795), *Metaphysik der Sitten* (1796/97).

Batas kebebasan, menurut Kant bersifat moralis bagi setiap individu dan terkait dengan kemaslahatan umum. Batasan kebebasan dari perspektif individu ini sebenarnya jauh dari memadai untuk memanfaatkan kebebasan bagi semua dalam sebuah masyarakat. Yang diperlukan, tidak sekedar menghindari kewenangan dan penyalahgunaan kebebasan bagi perorangan,

melainkan juga memperluas batasan kebebasan bagi perorangan yang kebebasannya dipasung. Hal ini hanya bisa terjadi bila berlaku kebebasan yang sama bagi semua. Program dasar SPD yang disepakati di kota Hamburg, memformulasikannya secara singkat dan gamblang: „Setiap manusia terpanggil dan mampu menjalani kebebasan. Apakah ia mampu hidup sesuai keterpanggilannya ini, akan ditentukan dalam masyarakat.“

Teori-teori yang lebih baru, misalnya dari pemenang hadiah nobel dari India, Amartya Sen, berbicara juga tentang „kesempatan artikulasi/mewujudkan“ yang mensyaratkan partisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat, lebih dari sekedar kesetaraan secara fisik².

Batas kebebasan itu moralis dan terkait erat dengan kemaslahatan umum

2) Dalam dua laporan tentang kemiskinan dan kekayaan pemerintah Jerman, secara tepat mengukur kemiskinan tidak sekadar pada indikator material dari kemiskinan, melainkan juga terkait keterpinggiran dan keterlibatan dalam masyarakat.

Memperhatikan diskusi tentang kebebasan, muncul tuntutan kepada sosial demokrasi terkait beberapa hal berikut:

Tuntutan terhadap sosial demokrasi dari diskusi tentang kebebasan adalah:

- Kebebasan individu dan kebebasan untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat harus secara mendasar dijamin dan dipastikan.
- Kebebasan mensyaratkan setiap individu hidup dalam kebebasan.
- Untuk itu diperlukan rambu-rambu sosial dan kelembagaan yang menjadikan semua itu mungkin. Sekedar sebuah rumusan formal tentang kebebasan sebagai hak dasar, tidaklah memadai.
- Kebebasan mensyaratkan bahwa keputusan politik harus dilakukan secara demokratis. Kebebasan juga mensyaratkan bahwa manusia bertindak secara bijak dan bertanggungjawab. Semua tadi adalah tuntutan terhadap pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat demokratis.

„Kebebasan“ dalam program SPD yang dicetuskan di kota Hamburg:

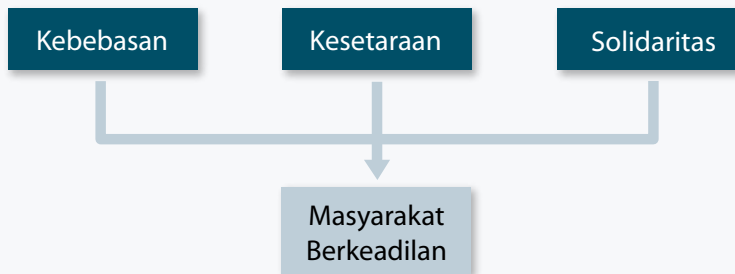
„Kebebasan berarti kesempatan untuk menjalani hidup secara mandiri. Setiap manusia terpenggil dan memiliki kemampuan untuk menikmati kebebasan. Apakah keterpenggilan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan diputuskan dalam masyarakat. Seseorang harus bebas dari ketergantungan yang memasung, bebas dari kemiskinan dan ketakutan, dan ia harus memiliki kesempatan mengembangkan kemampuannya untuk berkembang di dalam masyarakat dan secara politik bertanggungjawab. Hanya mereka yang tahu bahwa secara sosial cukup terjamin, bisa memanfaatkan kebebasannya.“
(Program “Hamburg” SPD 2007: 15)

2.2. Kestaraan / Keadilan

Banyak yang ragu ketika ingin menyebut nilai dasar kedua, apakah “kestaraan” ataukah “keadilan”?

Ketidakpastian ini bisa dijelaskan dengan mudah dari perspektif sejarah filsafat:

Kestaraan atau keadilan?



Gambar 2: Masyarakat berkeadilan dan nilai-nilai dasar

Tercatat dalam sejarah, bahwa tiga nilai dasar yaitu “kebebasan, kestaraan, solidaritas” berasal dari Revolusi Perancis. Dari perspektif filsafat, secara umum kita bisa berbicara tentang masyarakat berkeadilan bila ketiga nilai tersebut telah menjadi realitas.

Pada saat yang sama dalam diskusi tentang nilai dasar “kestaraan” timbul pertanyaan terkait bentuk pendistribusian barang, baik secara material maupun non-material, secara adil. Maka sejak tahun 1980an, posisi berikut ini menjadi dominan, yaitu “keadilan” sebagai nilai sentral dipakai menggantikan “kestaraan”. Saat ini, yang lazim dipakai adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas.

Perbedaan ungkapan filosofis dan bahasa politik saat ini

Meskipun demikian, cukup bermanfaat untuk mencermati diskusi filsafat berikut. Berbeda dari istilah “kebebasan” yang bisa dikaitkan pada setiap insan, istilah “kestaraan” dan “keadilan” adalah istilah yang relatif, karena ada keterkaitan antara masing-masing individu dan anggota masyarakat lainnya.

Secara filsafat, istilah utama adalah “keadilan”.

Berikut ini sebuah kutipan panjang sebagai upaya untuk mendefenisikan „keadilan” secara tepat:

“Apa itu keadilan? Bisakah kita mengajukan pertanyaan tersebut? Keadilan bukanlah “apa”, tetapi sebuah kategori relasi. ia terkait relasi antar manusia. Relasi tertentu, bisa disebut berkeadilan. Karena itu, pertanyaan selanjutnya bukanlah ,Apa itu keadilan?’, melainkan ,apa yang berlaku pada keadilan?’(...) topik keadilan adalah kedudukan orang per orang dalam masyarakat, dalam relasi dengan orang lain (...) Manusia memiliki kebutuhan, posisinya dalam relasi dengan yang lain yang berhubungan dengannya, menentukan, bagaimana dipahami, bagaimana dinilai. (...). Sesuai dengan harga diri perorangan berkaca pada penilaian sesamanya, ia akan merasa diperlakukan secara adil. Manifestasinya terlihat dalam penilaian terkait penyerahan penolakan atau penyitaan komoditas material dan ideal.” (Heinrich 2002:207 dst)

Keadilan, nampaknya juga adalah istilah yang mensyaratkan banyak hal: secara individual, seseorang bisa merasa diperlakukan secara tidak adil, meski secara objektif telah terjadi pendistribusian (barang, kekayaan dst.) yang “adil”. Dengan demikian, apa yang adil atau tidak adil hanya bisa ditetapkan lewat kesepakatan masyarakat. Artinya, keadilan mensyaratkan

- adanya distribusi barang (ideal dan material)
- berorientasi pada pendistribusian sesuai ukuran yang terlegitimasi dalam masyarakat

Hanya bila semua persyaratan tersebut terpenuhi, kita bisa menyebutnya sebagai “Keadilan”.

Sebaliknya, kesetaraan adalah bentuk khusus dari distribusi barang ideal dan material:

“Titik awal dan bukan hasil sebuah tatanan (sosial) (...) adalah kesetaraan. Dalam menentukan ukuran distribusi dibutuhkan sebuah norma dasar sebagai manifestasi keadilan. Norma pendistribusian primer ini adalah kesetaraan numerik, pembagian apa yang mau didistribusikan sesuai jumlah yang harus diperhatikan. Kesetaraan, dibandingkan keadilan, tidak memerlukan kriteria. (...) Ketika untuk kasus konkret tidak terdapat kriteria pendistribusian barang, bila memang tidak ada alasan bahwa seseorang mendapat lebih dari yang lain, maka bila tidak ingin semuanya, semua harus diberikan bagian yang sama.” (Heinrichs 2002:211 dst)

Dengan demikian, tuntutan kesetaraan mensyaratkan bahwa tiada satupun alasan sosial yang bisa dipakai untuk melegitimasi perlakuan yang berbeda dalam pendistribusian barang.

Demikianlah secara defenisi, istilah “kesetaraan” dan “keadilan” dirumuskan tanpa menimbulkan kontradiksi dalam berbagai teori ilmu pengetahuan yang berbeda. Namun yang menarik adalah, argumentasi dalam teori yang menyimpulkan “ketidaksamaan pendistribusian” sebagai sesuatu yang adil. Dalam kaitan ini, telah cukup banyak upaya pendefinisian dan argumentasi yang dikembangkan. Hal tersebut, memang belum bisa dibahas dalam buku ini. Namun sebagai manusia yang tertarik pada politik, wajar akan bertanya, dalam “keseharian” praktek politik bagaimana menyimpulkan apakah sebuah usulan politik bisa dinilai berkeadilan atau tidak.

Berikut ini, deskripsi empat titik masuk terkait istilah “keadilan” yang sejak tahun 1980an dan 1990an baik secara teoretis maupun politis menjadi acuan diskusi. Mencermati defenisi dan titik masuk menjadi jelas bahwa rumusan keadilan menjadi kabur, sementara yang lebih mengemuka adalah motif politik yang patut dipertanyakan. Empat titik masuk tersebut adalah:

- Teori keadilan liberalnya John Rawls
- Kritik sosialis terhadap teori keadilan liberal
- Defenisi Nancy Frasers antara pengakuan dan pendistribusian
- Dimensi politik keadilan

Bagaimana memberi alasan atas „ketidaksamaan perlakuan yang adil“?

Empat pintu masuk ke „keadilan“

2.2.1. Teori Keadilan versi John Rawls³

John Rawls

John Rawls (1921–2002) dianggap sebagai moral filosof terpenting dalam tradisi liberal. Ia adalah profesor bidang filsafat politik di Universitas Harvard.

1971 ia mempublikasikan karya paling berpengaruh „*Theory of Justice*“ yang banyak didiskusikan tahun 1980 - 1990 an.

Dalam konteks filosofis, *Theory of Justice* alias teori keadilan-nya John Rawl yang termashur, dipilih untuk didiskusikan di sini. Tahun 1971, John Rawl telah menyajikan satu teori berdasarkan tradisi liberal. Dampak politisnya baru berkembang secara berarti pada tahun 1980an dan 1990an. Teori ini merupakan

perspektif tandingan terhadap radikalisme pasarnya era Reagen dan Thatcher. Juga sebagai “geistig moralische Wende” alias “Putar haluannya jiwa dan moral”, sebagaimana tuntutan pemerintahan Helmut Kohl (sebagai konteks historis, bandingkan Nida-Rümelin 1997 halaman 15 dst.)- Justru secara sosial-demokratis, teori John Rawl menjadi bahan perdebatan yang sangat hangat.

Dalam teorinya, Rawls menganalisa regulasi dari berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat. Lewat kerjasama anggota masyarakat harus berikhtiar, mendistribusikan secara adil barang/harta benda/kekayaan masyarakat yang relatif pas-pasan.

Rawl berpendapat, bahwa

- ide-ide mendasar dan prinsip-prinsip umum keadilan dapat diformulasikan agar bisa disepakati oleh setiap orang;
- terutama dalam demokrasi ketika keberadaan setiap warga yang bebas dan sama, saling berhubungan satu dengan lainnya,
- bertolak dari landasan ini, bisa ditemukan prinsip-prinsip kerjasama sosial

3) Perlu dicatat, teori John Rawl yang luas itu tidak akan diuraikan. Di sini hanyalah hendak didiskusikan tentang contoh-contoh problem-problem praktis menyangkut definisi keadilan, yang juga selalu dapat muncul dalam kegiatan-kegiatan politis.

“Melahirkan
sebuah „Tatanan
Berkeadilan”

Seperti halnya John Locke, Rawl berangkat dari sebuah titik awal. Hanya saja, Rawl tidak bertolak dari satu kondisi alami yang nyata, melainkan berdasarkan keadaan hipotesis. Di sana, terdapat manusia-manusia yang bebas dan sama, yang hanya mengekor pada kepentingan pribadinya, berkumpul guna berkompromi terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Termasuk juga kedalam eksperimen pemikiran ini adalah belum jelasnya kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Oleh karenanya, bagi Rawl, setiap individu haruslah memiliki kepentingan, bahwa individu yang berkedudukan terburuk setidaknya menempati posisi yang baik („Dalil Maximin“).

Untuk diskusi dan kerja lanjutan Dalam argumentasinya, John Rawl mengundang masuk ke ranah eksperimen pemikiran. Sudikah anda menerima undangannya?

Bila ya, maka silahkan anda bayangkan, sedang berpartisipasi dalam pertemuan ini sebagai individu yang bebas, sederajat, rasional dan argumentatif tentang :

- Prinsip-prinsip apakah yang dapat anda kompromikan?
- Prinsip-prinsip apa yang kontroversial?
- Lewat argumentasi-argumentasi apakah butir-butir yang kontroversial itu dapat dijelaskan?
- Prinsip-prinsip apakah yang sudah dilaksanakan di dalam situasi masyarakat (Republik Federal Jerman) yang sekarang? Dan apa saja yang belum?

Dari teori Rawl yang luas itu, perlu dicermati dua prinsip pokok. Berdasarkan kedua prinsip tersebut dapatlah diuji, apakah prinsip-prinsip pokok tersebut setidaknya sesuai dengan penyebutannya.

Jasa John Rawl, antara lain bahwa ia mengembangkan sudut pandang liberal tentang pembagian barang/kekayaan sosial menjadi satu teori, sehingga keadilan pembagian itu didefinisikan ulang. Dengan demikian, Rawl telah mengawinkan tradisi liberal yang menuntut pemberian dan penjaminan hak-hak kebebasan dengan ide-ide sosial demokrasi tentang kesetaraan dan keadilan.

*Eksperimentasi pemikiran:
„Titik awal“ dari individu yang bebas, setara dan berorientasi tujuan*

„Dalil Maximin“

Dua landasan keadilan

Sebuah definisi baru keadilan-distributif/pemerataan

Dalam teorinya, Rawl memformulasi dua prinsip dasar:

Prinsip 1

„Setiap orang hendaknya berhak atas sistem menyeluruh yang bertumpu pada dasar-dasar kebebasan yang sama. Sebuah sistem yang dapat diterima oleh semua“. (Rawls 1979: 81)⁴

Prinsip 2

„Perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi haruslah memiliki kondisi sebagai berikut: a) Dalam keadaan serba terbatas sebagai akibat (penghematan yang adil), mereka yang berada dalam kondisi terburuk agar dimungkinkan memperoleh keuntungan terbanyak. b) Selain itu, mereka haruslah diberikan akses terhadap jabatan dan kedudukan sesuai dengan persamaan kesempatan. (Rawls 1979: 336)

Prinsip pertama berangkat dari sederet kebebasan dasar, yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar ia dapat memanfaatkan kebebasannya. Petunjuk atas „sistem yang sama“ memperjelas, bahwa setiap perbuatan/tingkah laku haruslah tetap terabstraksikan dari individu yang kongkrit. Prinsip pertama tidak dapat disangkal oleh hampir segenap penulis.

Sesuai tradisi liberal, Rawl berasumsi, bahwa secara mutlak, prinsip pertama haruslah lebih diprioritaskan ketimbang prinsip kedua.⁵

Berbeda dengan prinsip pertama, prinsip kedua yang disebut prinsip perbedaan, kedudukannya terbilang rumit dan kontroversial. Dalam hal ini, Rawl mengusulkan norma abstrak, di mana perbedaan perlakuan bisa dinilai sebagai sah dan dapat diterima. Pembagian yang tidak adil itu hendaknya dikaitkan dengan dua persyaratan berikut :

1. Pembagian yang tidak adil itu menguntungkan pihak yang selama ini dirugikan,
2. Jabatan dan kedudukan terbuka bagi setiap orang.

4) Satu formulasi yang bermakna mirip dengan formulasi Kant: Setiap perbuatan adalah sah, menurut kaidah kebebasan penuh seseorang bisa berlaku bersamaan dengan kebebasan setiap orang yang sesuai dengan hukum" (Kant 1963:33)

5) Akan tetapi, hal ini merupakan pandangan yang problematis, baik faktual maupun logis, seperti yang dibeberkan secara jelas oleh Meyer (bandingkan hal. 93 dst.)

Persyaratan pertama untuk „pembagian tidak adil yang sah/dapat diterima“ oleh Rawl ditetapkan sebagai akibat dari pembagian yang timpang dalam masyarakat.

Persyaratan kedua terkait dengan „keadilan akses“. hanya bisa dilaksanakan jika setiap orang secara prinsip memiliki akses pada jabatan dan kedudukan.

Hanya jika akses pada jabatan dan posisi secara prinsip dimungkinkan bagi setiap orang, maka pembagian tidak adil dapat diabsahkan. Jika diformulasikan secara tajam, hal itu berarti „semuanya mempunyai peluang yang adil“.

Bukan hanya secara ilmiah, namun juga secara politis, „prinsip perbedaan“ ini sangat kontroversial. Akan tetapi, sebelum dapat dipersoalkan, apakah „prinsip perbedaan“ itu merupakan definisi yang tepat atau tidak keliru untuk keadilan, hendaknya argumentasinya diuji pada contoh praktis. Dalam contoh praktis dapat ditemui beberapa argumentasi politis, yang dapat diuji ihwal „legitimisasi“nya terhadap kedua „prinsip“ Rawl.⁶ Sebaiknya, pikirkanlah masak-masak terlebih dahulu, apakah pikiran spontan anda itu anda anggap benar.

Persyaratan untuk „Pembagian tidak adil“

Sebuah contoh dari praktek

Diskusi; pajak penghasilan progresif – ya atau tidak?

Meskipun mayoritas masyarakat tidak menyetujui argumentasi Paul Kirchoff dan golongan ultra liberal, namun orang juga harus menguji argumentasi tersebut. Paul Kirchoff, Menteri Keuangan Kabinet Bayangan Partai Kristen Jerman (CDU) untuk pemilihan DPR nasional menuntut pemberlakuan kuota pajak penghasilan secara umum sebesar 25% yang dikenakan kepada setiap orang. Ini tentu berbeda dengan ketentuan pajak penghasilan progresif yang sudah puluhan tahun berlaku di Jerman. Berdasarkan ketentuan pajak progresif yang berlaku, terdapat besaran penghasilan tertentu yang bebas pajak (*Steuerfreibetrag*) sedangkan terhadap penghasilan sisanya dikenai pajak progresif selaras dengan tingginya penghasilan. Artinya: terhadap penghasilan tiap orang, diberlakukan persentase pajak progresif mulai dari 0 sampai pendapatan brutto.

Pertanyaan:

Seberapa adilkah kedua model di atas, jika diuji berdasarkan Rawl?

6) Selain itu, Rawl bisa diinterpretasi keliru, jika perlakuan yang sama hanya diuji dari prinsip perbedaan belaka. Rawl berasumsi, bahwa kedua prinsip itu secara bersama-sama merupakan persyaratan keadilan.

2.2.2. Kritik sosialis terhadap konsep keadilan liberal

„Yang hanya berlaku di sini adalah, kebebasan, persamaan, hak milik (...) Kebebasan! Sebab penjual dan pembeli sesuatu, contohnya tenaga kerja, hanya bisa ditentukan oleh kehendak yang bebas. Mereka menyempitkan diri, secara hukum sebagai individu-individu yang bebas, yang setara. Persamaan! Karena hubungan antar mereka hanya sebagai pemilik „barang“ dan saling bertukar dengan nilai yang sama. Hak milik! Sebab setiap individu hanya memiliki apa yang dia punyai“ (Marx 1998: 189 dst.)

Realitas masyarakat

Keadilan dan persamaan dalam definisi Heinrichs dan Rawl yang diperkenalkan itu dibatasi dan dibedakan menurut bobot filosofisnya. Definisi Heinrichs dan Rawl berangkat dari pengertiannya dan bukan dari realitas masyarakat.⁷ Per definisi, untuk sementara, tidaklah penting, apakah keadilan dalam masyarakat itu dinilai terpenuhi atau tidak.

Akan tetapi, dampak nyata secara kemasyarakatan dari nilai-nilai dasar tentu merupakan tuntutan utama. Justru tuntutan inilah yang menyangkut konsep-konsep sosialis tentang keadilan,

Konsep-konsep sosialis umumnya beranggapan, bahwa ketimpangan dan ketidakadilan yang ada harus bisa dijelaskan. Bahwa aturan masyarakat agaknya tidak mengantarkan kepada keadaan persamaan atau pembagian yang adil, dapatlah dilihat langsung dari statistik kemiskinan dan kekayaan. Jadi, ketimpangan dan ketidakadilan bukanlah kebetulan atau satu reaksi terhadap ketimpangan yang muncul sekali itu saja, melainkan persoalan kemasyarakatan yang sistematis. Terutama (dan pasti tidak hanya) persyaratan produksi ekonomi pasar yang kapitalistis diidentifikasi sebagai penyebab ketimpangan dan ketidakadilan.

Karena itu, selama 150 tahun terakhir, konsep-konsep sosialis membangun argumenasinya berdasarkan dua pilar berikut. Pertama, tuntutan distribusi kekayaan masyarakat dan kedua, tuntutan keharusan perubahan mendasar cara produksi dan pemilikan barang/kekayaan publik.

7) Harus pula dipahami, bahwa Heinrich tidak berpedoman pada teori liberal, melainkan utamanya berbasis filsafat masyarakat radikal.

*Bagaimana
menerangkan
diminasi
ketidaksamaan dan
ketidakadilan dalam
sebuah masyarakat?*

Dalam konsepnya, Rawl telah membantah posisi tersebut dan beranggapan bahwa secara keseluruhan pasar ekonomi sosial adalah yang terbaik diantara yang buruk.

Posisi sosialis membantah Rawl yang mengatakan, bahwa ketimpangan ekonomi dapat berdampak positif kepada semua terutama kelompok terlemah. Sebaliknya posisi sosialis beranggapan bahwa ketimpangan ekonomi menyebabkan penajaman ketimpangan dan ketidakadilan. Data-data empirik berasal dari studi tahun-tahun terakhir membenarkan pendapat sosialis.⁸

Di samping itu, dalam kubu kiri muncul perpecahan menyangkut hal-hal teoritis. Dalam diskusi tentang keadilan terdapat dua model berbeda yang diperbandingkan. Di satu pihak keadilan pembagian dari barang sosial dan materiil, di lain pihak keadilan akses atau permasalahan apakah dan bagaimanakah kelompok manusia diakui dalam masyarakat dan memperoleh akses ke posisi kemasyarakatan. Inilah diskusi-diskusi politis dan teoritis. Hanya saja, perbandingan dua kutub perbandingan secara kaku dari keadilan distribusi disatu pihak dan keadilan akses di lain pihak, berangkat dari prasangka masing-masing kubu.

Justru para teoretisi yang menitikberatkan pada keadilan akses, secara prinsip tidak menutup mata terhadap distribusi. Umumnya menyangkut pengertian-pengertian keadilan yang kompleks, yang mencakup ketimpangan ekonomi sebagai keadilan.

Perdebatan tentang hal tersebut penting, karena dapat berarti pemilahan kelompok sasaran terutama penting bagi sosial demokras, yakni karyawan dan pengangguran. Saat ini, seperti juga masa lalu, terpolarisasinya kelompok sasaran tersebut justru karena persoalan kebebasan dan kesetaraan.

Pada bagian ini hendak diperkenalkan secara ringkas pengertian keadilan dua dimensi dari Nancy Fraser, yang terutama mengkombinasikan dua dimensi keadilan.

*Bisakah
ketidaksamaan
berguna bagi
semua?*

*keadilan
distribusi versus
keadilan akses*

8) Studi-studi yang mewakili posisi tersebut dan menarik untuk dibaca adalah dari Bourdieu a.l., 1997; Castel 2000; Schultheis / Schulz 2005

2.2.3. Pengertian Keadilan Dua Dimensi Nancy Fraser

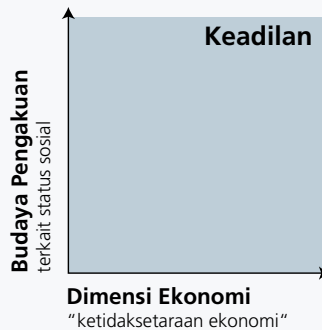
Pemahaman keadilan dua dimensi

Dalam konsep keadilan, Nancy Fraser mencoba melunakkan argumentasi liberal menyangkut pertarungan antara keadilan distribusi dan keadilan akses, dan menawarkan pengertian keadilan berdimensi dua:

„Pada tahapan teoritis perlulah merancang konsep keadilan dengan dua dimensi, yang mampu menyesuaikan tuntutan-tuntutan legitimasi terhadap keadilan sosial dengan tuntutan-tuntutan legitimasi terhadap pengakuan adanya perbedaan.

(Fraser 2003: 17 f.)

Tesis Fraser mengatakan, bahwa setiap ketidakadilan atau pengesampingan baik pengesampingan ekonomis maupun kurangnya pengakuan itu sesungguhnya meliputi bagian-bagian yang spesifik:



Gambar. 3: Ungkapan keadilan Nancy Frasers

Contoh-contoh dari kehidupan praktis

Sebagai contoh pengesampingan kaum LGBT, yang terutama diletakkan di wilayah status dan pengakuan publik. Sekaligus pengesampingan itu tak terpisahkan dari kedudukan buruk kaum ini secara finansial, juga terkait pemajakan partner hidupnya yang sah.

Nancy Fraser (kelahiran 1947) adalah guru-besar ilmu politik pada *New School for Social Research* di New York. Ia tergolong sebagai salah seorang teoritis feminis terkenal.

Publikasi-publikasinya tentang teori feminis, teori keadilan dan teori kritis.

Di sini, keadilan hanya bisa diraih, jika konstelasi spesifik dari penge-sampingan dalam dimensi status dan ekonomi itu diikutsertakan.

Sebagai contoh kedua bisa diajukan tentang stigmatisasi dan eksklusivitas kelompok pengangguran dalam masyarakat. Memang pengesampi-

ngan kelompok ini sebagian besarnya terletak pada buruknya kedudukan materiil. Namun, studi-studi empiris selalu membuktikan, bahwa penghormatan dan pengakuan masyarakat yang artinya status kemasyarakatan, bagi kelompok ini juga merupakan masalah besar. Agar tercipta keadilan dan partisipasi, perlulah strategi yang cukup menyertakan kedua dimensi tersebut.

Jadi, mula-mula Fraser menggambarkan satu cara analitis guna meneliti perlakuan yang berbeda atau ketidakadilan. Tapi, ia juga memformulasinya secara normatif tentang keadilan. Keadilan dipahaminya sebagai paritas (kesamaan nilai) yang partisipatoris.

Katanya: „Inti normatif konsepsi saya terdiri dari satu paritas yang partisipatoris. Berdasarkan norma ini, keadilan membutuhkan tindakan-tindakan pencegahan, yang mengizinkan anggota masyarakat yang dewasa, untuk berhubungan satu dengan lainnya secara setara. Agar paritas yang partisipatoris itu dimungkinkan, paling tidak haruslah, terpenuhi dua persyaratan berikut. Pertama haruslah terjamin pembagian sumberdaya materiil dan “hak-hak bersuara” para partisipan. Hal pertama ini saya sebut sebagai persyaratan obyektif. Dari awalnya saya mengabaikan, bentuk dan tahapan tertentu dari ketergantungan dan ketimpangan ekonomi, yang mempersulit paritas partisipatif (...). Persyaratan kedua sebaliknya, menuntut, „pattern” (pola) nilai kultural yang terinstitusionalisasi memberikan rasa hormat yang sama kepada anggota masyarakat dewasa dan menjamin persamaan peluang dalam memperoleh rasa hormat masyarakat. Hal ini saya namakan persyaratan intersubjektif dari paritas partisipatoris” (Fraser 2003: 54 dst.)

*Keadilan
butuh strategi
multidimensional*

*Bayangan
sebuah „paritas
partisipatoris”*

Seperti yang dilakukan Rawl, Fraser pun menyebutkan, kriteria pengidentifikasian dan pengecualian tentang perlakuan berbeda yang adil dan yang tidak adil. Ia mengusulkan kriteria sebagai berikut:

„Untuk kedua dimensi digunakan kriteria umum yang sama, guna membedakan tuntutan-tuntutan yang sah dan tidak sah. Terlepas dari apakah pembagian atau pengakuan itu kemudian menjadi masalah. Mereka yang dirugikan haruslah menunjukkan, bahwa tindakan pencegahan merintanginya mereka, untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang setara“ (Fraser 2003: 57 dst.)

Langkah-langkah pengujian

1. *Analisa*: Pembedaan perlakuan yang ditemui? Bagaimana penampilan kedua dimensi tersebut?
2. *Penggunaan kriteria*: Bagaimana tindakan pencegahan aturan yang merintanginya paritas yang partisipatoris?
3. *Alternatif-alternatif*: Perubahan dan strategi apa saja yang dapat mengembalikan paritas yang partisipatoris?

Langkah-langkah pengujian ini (analisa berdasarkan dua dimensi terhadap tudingan ketidakadilan yang kongkrit, penggunaan, dan alternatif), menurut Fraser terutama merupakan persoalan perundingan dan tawar-menawar yang demokratis.

Satu uji praktis di sini tentu saja bermanfaat. Contohnya menyertakan diskusi-diskusi tentang asuransi warga dibandingkan asuransi berdasarkan perhitungan rata-rata (hal. 47 dst.).

Guna mengatasi ketidakadilan, Fraser mendiskusikan dua strategi kemasyarakatan yang berbeda (Fraser 2003: 102 dst.). Yakni afirmasi (penyesuaian diri pada keadaan yang ada) dan transformasi (perubahan).

Dengan demikian, negara kesejahteraan liberal menyajikan strategi afirmatif, untuk memperlunak sisi buruk ekonomi pasar bebas. Sebenarnya, dalam negara seperti itu ketimpangan perlakuan modal dan kerja, bukan ditiadakan melain-

kan sekedar dilunakkan belaka. Satu strategi transformatif yang dilakukan oleh kubu sosialis bisa berupa menggantikan ekonomi pasar bebas dengan konstitusi pasar yang sosialis.

Kedua strategi diatas ditolak oleh Fraser. Sebaliknya, ia menyajikan strategi ketiga, yang menurut André Gorz disebut sebagai „reformasi yang tidak reformistik“, Pengertian yang sulit dan saling bertolak belakang itu berkaitan dengan proyek sosial demokratis:

Pada periode Fordist, strategi reformasi yang tidak reformistik menguasai pemahaman sebagian sayap kiri kubu sosial demokrat. Dalam perspektif ini, posisi sosial demokrasi dipahami bukan sebagai negara kesejahteraan liberal yang afirmatif di satu pihak dan sosialis yang transformatif di lain pihak. Sosial Demokrasi lebih dipahami sebagai rejim yang dinamis, yang perkembangannya transformatif berjangka panjang. Pemikirannya adalah, mula-mula melembakan sederet reformasi distribusi yang agak afirmatif, ke dalamnya termasuk tunjangan sosial, pengenaan pajak progresif, tindakan-tindakan makro ekonomis untuk menciptakan keadaan tanpa pengangguran (full-employment), satu pasar bebas sektor publik yang matang dan porsi nyata pemilikan publik dan/ atau kolektif. Kendati tindakan-tindakan politis ini tidak merubah struktur yang kapitalistik, namun tetap diharapkan, bahwa secara keseluruhan, dapat mempengaruhi perimbangan kekuatan antara modal dengan kerja, sehingga secara jangka panjang, juga transformatif sehingga menguntungkan kekuatan kerja. Tentu saja, harapan ini tidaklah keliru samasekali. Namun akhirnya, pemikiran sosial demokrasi ini tak pernah terpenuhi, karena neoliberalisme segera membungkam eksperimen tersebut“ (Fraser 2003:110 dst.)

Strategi “reformasi yang non-reformistik” ini mencoba membangun jembatan antara konsep-konsep keadilannya sosial-liberalistis dengan sosialis.

*Titik tolak
„reformis yang
tidak reformistik“*

2.2.4. Dimensi politik keadilan antara „keadilan kinerja“ dan keadilan kebutuhan“

*Alasan politis
dari perbedaan
distribusi*

Berbagai diskusi filosofis telah memperlihatkan, bahwa keadilan dapat didefinisikan secara berbeda, meski penjelasan filosofisnya hanya sedikit membantu. Alasannya, hal ini menyangkut penetapan pengertian yang relatif, yang dirundingkan bersama, yang menjadi tuntutan kelompok masyarakat yang berbeda untuk kepentingan masing-masing (seperti serikat buruh, asosiasi pengusaha atau partai).

Telah ditunjukkan dalam diskusi-diskusi filosofis, bahwa permasalahan keadilan itu selalu menyangkut pembagian barang materiil atau non-materiil (keadilan distribusi), yang dinilai adil dan tidak adil.

Dalam diskusi politis, setidaknya ada dua pengertian keadilan yang telah memampakan diri. Dari sudut pandang yang berbeda, keduanya mencoba untuk menjelaskan dan mengabsahkan pendistribusian barang-barang/kekayaan masyarakat.

Keadilan prestasi atau „prestasi haruslah memperoleh imbalan“? Terutama kubu Partai Liberal FDP dan Kristen CDU/CSU secara teratur mengumandangkan pandangan mereka, bahwa prestasi pihak berkedudukan yang lebih baik dalam pendistribusian barang/kekayaan masyarakat melegitimasi keadilan prestasi. Pandangan ini berangkat dari asumsi, bahwa keadilan pembagian atas prestasi setiap individu itu bisa diukur.

Satu contohnya adalah batasan iuran asuransi kesehatan. Pada tingkat pendapatan tertentu per tahun, mestilah mungkin buat memilih asuransi kesehatan swasta (dan umumnya pelayanan yang lebih baik ketika menderita sakit). Sebagian besar kubu kiri menyangsikan atau bahkan menolak argumen sejenis itu.

Namun sebaliknya, keadilan prestasi, bagi kubu kiri juga merupakan argumen. „Bahu yang kuat semestinya juga dapat memikul beban yang lebih banyak“, begitu argumen yang meluas, yang juga berpedoman pada keadilan prestasi. Jadi, siapa yang memiliki lebih banyak, maka seharusnya pihak ini menyettor lebih banyak iuran kesejahteraan bersama di bidang asuransi kesehatan (asuransi pengangguran dan pensiunan). Pedoman ini juga sekaligus terikat dengan jaminan penerimaan status sosial. Bahwa barang siapa banyak membayar, ketika

Keadilan prestasi

sangat membutuhkan, menerima lebih banyak.

Argumen kritis serupa bisa disertakan buat melihat struktur penghasilan dalam perusahaan. Apakah dalam hal kesuksesan perusahaan, seorang ketua dewan direksi itu benar-benar punya andil lebih dibandingkan seorang buruh ban berjalan? Atau seorang analis pasar bursa menghasilkan lebih ketimbang seorang perawat?

Jadi terlihatlah: Keadilan prestasi menjadi tuntutan kubu politis yang berbeda. Keadilan prestasi telah memapankan dirinya menjadi landasan argumentasi buat perbedaan pembagian. Namun, pada dasarnya, argumen itu merupakan argumen yang relatif, dan menjadi persoalan perimbangan kekuatan kemasyarakatan dan persoalan negosiasi.

Keadilan Kebutuhan: Keadilan kebutuhan mempertanyakan, prestasi yang bagaimana yang harus diterima oleh pribadi-pribadi yang berbeda, berupa tuntutan situasi sosialnya. Contohnya: seorang penderita yang patut dibantu memerlukan jasa perawatan tingkatan tertentu. Seseorang yang sehat tidak bisa meminta jasa ini, karena secara kemasyarakatan, kebutuhan bantuan ini tidak diakui. Kebanyakan pemberian jasa kebutuhan berorientasikan pada UU Sosial. Alhasil, dalam sistem masyarakat kita, keadilan kebutuhan memiliki landasan legitimasi.

Dua argumentasi yang berbeda tersebut berpengaruh secara politis dari waktu ke waktu dalam diskusi umum.

2.2.5. Kajian: Kesetaraan dan Keadilan Sebagai Ungkapan Sosial Demokratis

*Pergeseran
penekanan dalam
diskusi tentang
keadilan*

Di samping pendekatan filosofis untuk memahami „keadilan“, pengertian-pengertian politis yang pokok secara berurutan di kalangan sosial demokrat sepanjang sejarah Republik Federal Jerman itu menarik ditelusuri. Dari situ, dapat diketemukan adanya pergeseran titik berat dengan diskusi-diskusi politik tentang keadilan, yang timbulnya tidak tergantung pada diskusi-diskusi teoretis. Namun diskusi-diskuis politik itu juga bisa dipengaruhi oleh kelanjutan diskusi-diskusi tersebut.

Oleh karena itu, akan dipilih pengertian-pengertian politik sosial demokrasi yang pernah menempati pemikiran kubu ini. Pemilihan itu disebabkan karena dalam lanskap kepartaian politik Jerman, sosial demokrasi utamanya dipandang sebagai partai keadilan sosial.

Dalam menghidupkan pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat satu urutan yang mencakup niat merubah pengertian-pengertian itu selama era kekuasaan sosial demokratis. Yakni, bagaimana politik keadilan dapat dibangun dan dilaksanakan lewat perlengkapan- perlengkapan negara. Secara berurutan, pengertian „persamaan“ dilengkapi oleh persamaan peluang dan kemudian oleh keadilan kesempatan.

„Persamaan“

Terutama sampai tahun 1959, tatkala kubu sosial demokrat Jerman melalui kongres partai di Godesberg merekrut kelompok pemilih baru, pengertian „persamaan“ masih merupakan bagian politik kemasyarakatan kubu kiri. Pengertian ini bertolak dari segenap bidang kehidupan. Persamaan terkait terutama dengan usaha mengatasi ketidakbebasan dan pemerasan dalam hubungan produksi. Dari tuntutan partisipasi montan (besi, baja dan batubara) sampai gelombang pemogokan tahun 1950an ---peristiwa-peristiwa yang sekarang umumnya diabaikan--- yang diperjuangkan adalah partisipasi meluas atas kerja dan kehidupan. Hasilnya kontroversial, oleh sebab dengan partisipasi satuan usaha *betriebliche Mitbestimmung* dan partisipasi perusahaan *unternehmerische Mitbestimmung*, kemenangan sebagian diraih, namun bersamaan dengan itu tuntutan terhadap persamaan dalam kehidupan bekerja itu tidak selamanya dapat terpenuhi.

Persamaan peluang

Semasa era Brandt dalam pemerintahan koalisi sosialdemokrat-liberal, diciptakan pengertian „persamaan peluang“. Sampai kini, pengertian ini masih memiliki karisma

(tidak hanya di kalangan sosial demokrat) dan terutama mengkarakterisasi progresivitasnya politik era Brandt. Pengertian baru yang tercipta itu cenderung menerima perbedaan kemasyarakatan yang ada dan memfokuskan dirinya pada bidang politik pendidikan, perluasan lembaga-lembaga pendidikan dan sektor-sektor publik/negara menjadi argumen utama untuk meyakinkan *milieu* dan kelompok-kelompok pemilih baru serta memahami perbedaan tidak hanya produk pembagian materiil, melainkan perbedaan pembagian atas peluang pendidikan dalam masyarakat. Tentu saja, dalam tubuh sosial demokrat disadari, bahwa perbedaan pembagian *ressources* dan perbedaan pembagian kesempatan pendidikan itu saling melengkapi. Sebaliknya kubu liberal, fokusnya bukan terletak pada jalinan pengertian „persamaan“ dan „persamaan peluang“, namun lebih kepada subsidi persamaan oleh persamaan kesempatan. Persamaan kesempatan adalah posisi liberal yang membuka peluang buat bekerjasama. Alhasil, hanya dengan begitu, dapat terjalinlah politik sosial-liberal.

Fokus baru saat itu merupakan isyarat satu konstelasi masyarakat ke arah politik yang baru. Karenanya, pengertian „persamaan kesempatan“ menjadi karakteristik. Pengertian itu disajikan pada saat pengertian tentang negara yang positif telah memantapkan situasi ekonomi.

Dalam fase ketiga pemerintahan sosial demokrat di bawah Kanselir Gerhard Schroeder, pengertian „persamaan peluang“ dilengkapi oleh pengertian „keadilan peluang“. „keadilan peluang“ menitikberatkan pada aspek pembagian. Pengertian itu menjelaskan secara gamblang, bahwa peluang dalam masyarakat itu terikat oleh sumberdaya materiil dan immateriil. Dan sumber daya ini secara ekonomis terbatas – demikian argumen yang mencirikan fase pemerintahan ini.

Peluang yang terbatas haruslah dibagi secara adil. Politik Schroeder itu meminjam gagasan politik „keadilan prestasi“. Dalil „bantuan dan tuntutan“ mencakup pemberian peluang dan pembagian sumberdaya materiil, juga seperti halnya imbalan yang diharapkan.

Justru definisi keadilan peluang membelah diskusi-diskusi politik kubu kiri. Pertanyaan-pertanyaan yang kritis didiskusikan dulu dan sekarang, adalah:

- Adakah sebenarnya pembatasan objektif sumberdaya seperti dugaan? Kalau ya, seberapa besarnya? Ataukah ini hanya keputusan-keputusan politik, yang dapat ditetapkan berbeda (contohnya di bidang keuangan negara dan sistem-sistem asuransi sosial)?

„Persamaan
peluang“

Definisi keadilan
peluang membelah
diskusi-diskusi
politik kubu kiri

- Apakah pembagian dan peringanan beban kemasyarakatan yang dipilih bentuknya saat ini dikatakan adil (contoh, keringanan buat perusahaan di satu pihak dan pemangkasan jaringan sosial di lain pihak)?

Terlepas bagaimana jawabannya, namun jelaslah bahwa pengertian keadilan itu baik secara politis maupun teoritis adalah kontroversial.

Tuntutan kepada sosial demokrasi berdasarkan diskusi tentang keadilan:

- Keadilan adalah nilai mendasar, jika menyangkut soal pembagian barang-barang/kekayaan masyarakat materil dan non-materiil. Akan tetapi sosial demokrasi tidak dapat menawarkan satu pengertian keadilan yang seragam. Sebagai landasan legitimasi, maka „keadilan“ sebagai landasan argumentasi itu efektif secara kemasyarakatan, namun kontroversial secara teori.
- „Keadilan agaknya harus dipisahkan untuk wilayah-wilayah kemasyarakatan yang berbeda.
- Persamaan sebagai persamaan pembagian barang-barang/kekayaan masyarakat itu sendiri, tidak miskin penjelasan. Dari sudut penglihatan keadilan, maka penyimpangan-penyimpangannya haruslah didefinisikan dan dinegosiasikan.
- Kebebasan riil yang efektif tak mungkin bisa dibayangkan tanpa persamaan.

„Keadilan dalam program sosial demokrat hasil kongres Hamburg:

Keadilan melandasi kesamaan harga diri setiap manusia. Ia bermakna kebebasan dan peluang hidup yang sama, tidak tergantung pada asal-usul dan kelamin. Jadi keadilan adalah persamaan kesertaan pada pendidikan, kerja, jaminan sosial, kultur dan demokrasi, persamaan akses ke segenap barang-barang/kekayaan publik. Di mana terdapat ketimpangan pembagian dari penghasilan/pendapatan dan kekayaan, maka masyarakat terbagi ke dalam pihak yang memiliki pihak lain, dan pihak yang dimiliki; masyarakat ini bertentangan dengan prinsip kebebasan yang sama, Jadi sekaligus tidak adil. Karenanya, keadilan menuntut persamaan yang lebih luas dalam hal pembagian pendapatan, kekayaan dan kekuasaan (...). Prestasi haruslah diakui dan dihormati. Adil adalah prestasi yang sesuai dengan pembagian pendapatan dan kekayaan. Barangsiapa berpenghasilan di atas rata-rata, haruslah juga berkontribusi lebih (Program Hamburg 2007:15 dst.)

2.3. Solidaritas

Slogan yang paling jarang didiskusikan adalah „solidaritas“ (atau sewaktu Revolusi Perancis disebut: “persaudaraan”). Bisa dipastikan bahwa alasannya, karena slogan ini terkait dengan (hubungan sesama) manusia sehingga lebih sulit diintegrasikan ke dalam sebuah bangunan teoritis.

Secara kasar, bersandar kepada berbagai penulis⁹, solidaritas bisa didefinisikan sebagai

- Satu rasa seperti tanggung jawab sebuah masyarakat yang
- Bertopang pada kepentingan bersama dan
- Pada perilaku demi kemaslahatan bersama, termasuk melawan kepentingan pribadi secara jangka pendek dan,
- Melampaui ambisi formal demi keadilan bersama.

Dengan demikian „solidaritas“ adalah sebuah „identitas sosial“ bersama yang tumbuh subur dalam kemiripan pola hidup dan nilai bersama.

Meskipun demikian, sosiolog dan filsuf-moral asal AS, Walzer, dengan tepat memperingatkan bahwa solidaritas bisa berbahaya „bila ia sekedar sebuah perasaan, sebuah emosi artifisial untuk sebuah kebersamaan, bukanlah cerminan dari sebuah kebersamaan yang nyata dan hidup“ (Walzer 1997: 32).

Kebersamaan yang nyata itu terkait erat dengan lembaga dan struktur masyarakatan di mana solidaritas bisa berkembang dan menjadi pupuk bagi keamanan sosial.

Solidaritas secara sempit juga bisa mengambil bentuk eksklusif dan diskriminatif, misalnya dalam ide-ide ekstrim kanan. Bagi sebuah masyarakat demokratis yang berkembang lewat masyarakat sipil yang terbuka dan plural bentuk-bentuk solidaritas yang melenceng itu adalah bahaya besar yang masih sering dianggap enteng. Padahal, sebuah batasan terlanggar ketika kebersamaan sebuah masyarakat dilandasi oleh diskriminasi terhadap minoritas atau kelompok yang lain. Dengan demikian, solidaritas tidak boleh didiskusikan tanpa realisasi.

9) Lihat, misalnya, Hondrich et al., 1994; Carigiet 2003.

Definisi dari solidaritas

Keterkaitan antara solidaritas dan identitas sosial

Solidaritas sebagai ungkapan kerjasama hari ke hari?

Kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat demokratis.

Betapa pun sulit rumusan istilah ini, ia sangat bermanfaat dan berakar dalam sejarah kemasyarakatan. Seperti itulah ketahanan sosial (asuransi pengangguran, kesehatan, pensiun dan kecelakaan) sebagai lembaga solidaritas para pekerja. Pendiannya pada tahun 1890an dan 1920an terutama berkat tekanan berat para buruh dan kelompok sosialis/ sosial demokrat – termasuk pada saat pemerintahan konservatif Bismarck.

Koperasi pun bisa dikategorikan sebagai paguyuban solidaritas, di mana para anggota berdasarkan kepentingan bersama membangun sebuah paguyuban yang menghindari persaingan yang biasa terjadi dalam pasar bebas.

Lebih dari itu bisa dianggap bahwa solidaritas mensyaratkan penyeragaman kepentingan bagi daya dorongnya. Hal ini juga menunjuk pada kenyataan bahwa solidaritas hanya bisa tumbuh bila memperhatikan perbedaan, tepatnya terutama kesamaan kepentingan dalam argumentasi politik.

Tuntutan kepada sosial demokrasi berdasarkan diskusi tentang solidaritas:

- Solidaritas bisa menjadi perekat sosial sebuah masyarakat bila didukung oleh (sistem) kelembagaan, namun bukan menjadi pencetusnya.
- Dalam sebuah (tatanan) sosial demokrasi, harus diuji bagaimana kelembagaan negara dan sipil berpengaruh pada pemantapan solidaritas.

„Solidaritas“ dalam program SPD yang dideklarasikan di kota Hamburg:

„Solidaritas bermakna saling keterkaitan, kebersamaan dan tolong-menolong. Ia adalah kesediaan manusia untuk saling mendukung dan menolong. Ia berlaku untuk mereka yang kuat dan yang lemah, antar generasi, antar bangsa. Solidaritas menciptakan kekuatan perubahan. Demikianlah pengalaman gerakan buruh. Solidaritas adalah kekuatan besar yang mempersatukan masyarakat (kita) – kesediaan membantu secara spontan para individu, dalam sebuah organisasi dan aturan bersama. Dalam negara kesejahteraan, solidaritas secara politis diyakini dan terorganisir.“ (Program Hamburg 2007: 16).

- Solidaritas harus selalu didiskusikan dalam keterkaitan dengan realisasi dari kebebasan dan kesetaraan.

2.4. Apa Kata (Kelompok) Lain?

Oleh Martin Timpe

Dalam praktek politisnya, pemahaman sosial demokrat tentang nilai-nilai dasar tidaklah berdiri sendiri. Partai-partai lainnya –termuat dalam program-program dasar atau dokumentasi-dokumentasi sejenis—memformulasikan juga pemahamannya tentang nilai-nilai dasar. Secara sepintas, kami hendak mengajak melihat posisi-posisi ini. Sekaligus kami tidak menjamin keutuhan program. Kami menjelajahi program-program itu secara sekilas saja.

*Ciptaan Tuhan
dalam uji sekilas*

► Ciptaan Tuhan, dalam sekilas pandangan: Partai Kristen CDU

Nilai-nilai dasar Partai Kristen adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas yang merupakan program-program dasar produk kongres partai di Hannover Desember 2007. Kendati secara sepintas ketiga nilai-nilai dasar itu identik dengan program Hamburgnya SPD, namun jika dicermati, juga terdapat perbedaan-perbedaan. Pada CDU, terdapat penggarisbawahan orientasi berdasarkan kedudukan manusia secara kristen dan ciptaan Tuhan. Pada CDU, landasannya jelas-jelas agama Kristen. Pada sosial demokrat, interpretasi nilai-nilai dasar hanyalah bersumberkan pada salah satu dari banyak sumber nilai-nilai dasarnya. (Selain itu, pada Partai Kristen Bavaria CSU, orientasi dasar keagamaan kristennya lebih dalam dan dilengkapi oleh orientasi konservatif kanan yang bernafaskan bangsa dan patriotisme).

Selanjutnya, dari titik tolaknya terlihat, bahwa Partai Kristen CDU menggunakan pengertian kebebasan yang berbeda ketimbang partai sosial demokrasi SPD. Pertama-pertama kebebasan dalam CDU diformulasikan secara panjang lebar dibandingkan dengan kedua nilai dasar lainnya – sesuai dengan proses kelahiran program dasar CDU yang berjudul „Keadilan baru lewat kebebasan yang lebih banyak“. Pernyataan ini dapat diartikan sebagai prioritasnya nilai dasar kebebasan ketimbang dua nilai dasar lainnya. Sementara di partai sosial demokrat, nilai-nilai dasar itu disetarakan. Selain itu, dalam program partai kristen, hak-hak kebebasan menangkis, dengan kata lain hak kebebasan negatif dikedepankan ketimbang hak kebebasan yang memungkinkan, yaitu hak-hak kebebasan positif.

➤ Tiga nilai dasar FDP:

Kebebasan, Kebebasan dan Kebebasan

Partai Liberal FDP tidak memiliki program-program dasar. Namun jika dilihat dari dokumen-dokumen pentingnya seperti “Prinsip-prinsip Wiebaden”, yang diputuskan oleh kongres partai tahun 1997, maka terlihatlah bahwa FDP hanya memiliki satu-satunya orientasi, yakni nilai dasar kebebasan. Orang bisa mengatakan, bahwa bisa dipahamilah jika nilai dasarnya hanya tunggal, sebab partai liberal berakar pada liberalisme politik. Namun, secara ringkas, patutlah dibantah. Lihat John Locke, leluhur liberalisme politik, tentu tak terlalu dekat dengan partai liberal, yang juga memfokuskan aspek keadilan. Partai liberal FDP sebaliknya berhiar, setiap aspek orientasi dasarnya selalu berangkat dari pengertian kebebasan. Formulasi-formulasi seperti „kebebasan adalah kemajuan“ atau „kebebasan adalah sesuai dengan masa depan“ memperlihatkan, bagaimana Partai Liberal berusaha, menghubungkan formulasi-formulasinya dengan satu nilai dasar, yang formulasi-formulasinya diakui jelas penting. Juga jelas pula, bahwa satu masyarakat yang hanya mengandalkan kebebasan belaka dan mengabaikan keadilan dan hubungan antar manusia yang solidaris, akan dengan segera memperoleh problem. Sehingga mengancam solidaritas sosial.

➤ Dengan keanekaragaman karangan bunga akanlah semua memperoleh bagian (Buendnis 90/Partai Hijau)

Partai Hijau menekankan penentuan nasib sendiri dari manusia sebagai fokusnya. Partai Hijau mengembangkan pengertian keadilan, yang mempunyai banyak penampilan, sehingga tidak gampang untuk diketahui. Keadilan pembagian yang hendaknya tetap ada, dikawani oleh keadilan ikut memiliki, keadilan generasi, keadilan kelamin dan keadilan internasional. Memang, tak satu dari tuntutan ini keliru. Namun peletakan segenap unsur-unsur tersebut berjajar setara dan tanpa menetapkan prioritas itu, bukanlah satu bentuk yang dapat menjelaskan secara gamblang kepada para pembaca atau para pembaca yang kritis tentang keadilan.

Seperti seharusnya termasuk ke dalam Partai Hijau (*die Grüne*), maka nilai-nilai dasar dilengkapi oleh tuntutan perkembangan berkesinambungan di segenap bidang politik. Namun, tuntutan itu tidak meyakinkan benar. Juga tidak meyakinkan dengan meletakkan tugas-tugas persilangan ihwal kesinambungan seperti kebebasan, keadilan dan solidaritas (tugas-tugas yang jelas penting) secara setara.

*Kebebasan,
Kebebasan dan
Kebebasan, Freiheit*

*Dengan
keanekaragaman
karangan bunga
akanlah semua
memperoleh bagian*

► Semuanya masih cair: Partai „Kiri“ (*Die Linke*)

Sampai kini, Partai Kiri yang merupakan gabungan dari Partai Demokrasi Sosial Kiri *Die Linke* PDS dan gabungan pemilih WASG belum memutuskan satu program dasar. Dalam „sasaran yang programatis“ ditemukan selayang pandang tentang nilai-nilai dasar secara garis besar. Di sana sebagai orientasi nilai, disebutkan tentang demokrasi, kebebasan, persamaan, keadilan, internasionalisme dan solidaritas. Dari perspektif historis yang melegakan adalah kejelasan pengakuan atas kebebasan individual, yang tanpa persamaan akan berujung pada pembentukan individu yang tidak mandiri (*entmuendigung*) dan individu yang dikendalikan (*fremdbestimmung*). Juga sangat jelas –dan tentunya pendukung Sosial Demokrasi pasti akan tidak menolak, kendati formulasinya akan berbeda—adalah pernyataan, bahwa kebebasan tanpa persamaan hanyalah kebebasan buat yang kaya. Justru kaitan antara kebebasan dan persamaan inilah, yang definisinya terdapat dalam diskursus selanjutnya Partai Kiri, haruslah diikuti perkembangannya.

2.5. Nilai-Nilai Dasar Dalam Praktek

Setelah berkuat banyak dengan teori nilai-nilai dasar, baiklah kita mencermati sisi prakteknya. Bagi sosial demokrasi, apa saja peran nilai-nilai dasar dalam diskusi politik keseharian? Sebuah kumpulan contoh dari berbagai sektor, diharapkan bisa memicu ide untuk kontemplasi lanjut.

2.5.1. Kebijakan Pendidikan¹⁰

Masterplan „Sekolah Membuka Kesempatan Masa Depan “ – Realisasi Kebijakan Pendidikan Progresif di Tingkat Komunal¹¹

Oleh Marc Herter

Sejak tahun 2003, ketika Studi PISA yang pertama menemukan berbagai kelemahan, muncul perdebatan baik di tingkat pusat, negara bagian maupun komunal, terkait sistem pendidikan apa yang paling pas untuk Jerman. Bagian dari perdebatan khususnya tentang kenyataan bahwa di Jerman, keberhasilan sistem pendidikan – terutama dibandingkan dengan negara lain – terkait erat dengan latarbelakang sosial dari anak-anak dan remaja. Namun, bagaimana wujud sebuah sistem sekolah yang secara sosial adil dan solidaris serta pada saat yang sama memberikan kebebasan bagi semua untuk menentukan jurusan dan profesi yang diinginkan?

Menjawab pertanyaan tersebut, SPD cabang Hamm mengembangkan perencanaan sosial demokrasi terintegrasi dalam sebuah rencana induk (*masterplan*) bermotto “sekolah membuka kesempatan masa depan”. Sebagai kota, Hamm berfungsi sebagai pemangku sekolah dan dengan demikian bertanggung jawab untuk “pengembangan lanjut sekolah yang berorientasi masa depan”.

➤ Mengapa perlu sebuah *masterplan*?

Selama ini, kebijakan sekolah di Hamm yang dikuasai koalisi CDU/FDP, dikelola dengan sikap responsif. Artinya, bila peminat sebuah sekolah terlalu tinggi atau

10) Bandingkan juga terkait topik pendidikan: Buku Bacaan Sosial Demokrasi 3 (2009)/Negara Sosial dan Sosial Demokrasi”, Bab 7.5, Pendidikan.

11) Contoh ini mengacu pada sebuah rencana pengembangan sekolah yang dilakukan oleh SPD di kota Hamm.

sebaliknya terlalu rendah, (gedung sekolah) diperluas, ditutup atau pembangunannya diundur hingga dibutuhkan. Setelah itu, ditunggu kondisi selanjutnya.

Hal tersebut, bukanlah sebuah basis yang baik untuk sebuah struktur sekolah masa depan.

Selain itu, titik tolak bagi sebuah konsep sekolah adalah pemahaman bahwa untuk keberhasilan pendidikan anak dan remaja, selain sistem sekolah juga diperlukan beberapa hal yang sangat menentukan berikut ini, yaitu dukungan bagi transisi anak menjadi remaja, dukungan bagi pendidikan dan pasar kerja serta dukungan integrasi sosial. Formulasi *masterplan*, berangkat dari analisa terkait tujuan jangka panjang serta area kegiatan sebagai benang merah yang menjamin perbaikan para pemangku pendidikan dan keberhasilan pendidikan itu sendiri.

Sebuah 'Masterplan Sosial Demokrasi'

Tujuannya adalah, menawarkan alternatif sosial demokrasi terkait pengelolaan keberadaan sekolah di hadapan mayoritas parlemen. Betapa mendesaknya langkah ini, selain secara umum terlihat dari hasil studi PISA, juga dengan sangat jelas ditunjukkan oleh dua indikator ketidakberhasilan dari kebijakan pendidikan lama, berikut ini:

- Kuota – murid yang melanjutkan ke - SMU (*Abitur*) di kota Hamm, hanya 30% dari jumlah angkatan, jauh di bawah persentase di kota-kota sejenis di Negara Bagian NRW (*Nordheim Westfalens*). Muenster, misalnya, memiliki kuota 50%.
- Sementara kawasan elit (kaya) di Hamm memiliki kuota pelajar yang melanjutkan ke SMU sebesar 50%; Herringen, sebagai kawasan klasik buruh/pekerja hanya memiliki kuota sebesar 19,5%.

Pada saat yang sama, terutama perkembangan demografi sosial menunjukkan mendesaknya penanganan. Jumlah pelajar, perempuan dan laki-laki, dalam transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan pada tahun 2015 dibandingkan 2005, bakal mengalami penurunan sebesar 25%. Pada tahun 2010 saja, satu dari dua bayi yang lahir di Hamm berasal dari keluarga pekerja migran. Integrasi dan pemanfaatan penuh semua talenta murid, bukan hanya sesuatu yang secara politis sangat berkenaan di hati kekuatan politik progresif, tetapi juga sebuah persyaratan utama bagi keberhasilan pembangunan perkotaan dalam transformasi struktural.

➤ Kebebasan yang kami maksud – Pelayanan penuh hari, bukan hanya bagi segelintir

Prinsip acuan pertama dari ‘masterplan’ adalah memperluas pelayanan penuh hari di seluruh jaringan pengayoman anak bawah tiga tahun. Pengayoman anak yang baik dimulai dengan penawaran yang layak sesuai kebutuhan dan berkualitas. ...

➤ Keadilan Sosial yang Berdampak Positif – Sekolah Yang Membuka Kesempatan Baru

Sebuah prinsip (arahan) lainnya dari rencana induk adalah pada setiap tujuh bagian kota, sistem sekolah yang ada membuka kesempatan untuk menata tangga lanjutan bagi semua muridnya. Setiap lulusan, dimungkinkan melanjutkan sekolah di semua bagian kota. Tujuannya, keberhasilan pendidikan (sekolah) tidak tergantung pada asal-usul keluarga murid. Keadilan sosial ditunjukkan lewat persamaan hak dalam pendidikan dan kesempatan bagi masa depan berupa pemberian akses sekolah lanjutan. Dengan demikian, integrasi dan dukungan perorangan yang lebih intensif tidak saling bertolak belakang, melainkan terkait satu dengan lainnya. Model sekolah yang diajukan SPD ini, adalah sebagai berikut. Setelah perluasan pelajaran bersama di kelas lima dan enam, murid diberikan pilihan melanjutkan pelajaran terintegrasi hingga kelas sepuluh, atau (bisa) melanjutkan ke jenis sekolah *Hauptschule*, *Realschule* dan *Gymnasium*, meski semuanya tetap berada dalam satu atap dan satu *Kollegium*. Di dalam praktek, juga terjadi banyak perubahan. Untuk pertamakalinya, misalnya, terdapat penawaran (sekolah) *Gymnasium* dan *Realschule* di Herringen, sebuah kawasan di kota Hamm. Di tiga kawasan lainnya, juga untuk pertamakalinya ditawarkan pendidikan *Gymnasium* – (sebuah jenjang pendidikan di Jerman sebagai persyaratan untuk bisa melanjutkan pendidikan di universitas, editor). Secara keseluruhan, mencermati perkembangan demografi, nyaris tiada satu pun kawasan kota yang memiliki penawaran berbagai jenis sekolah dalam satu atap.

➤ Solidaritas (yang) Melampaui Kata-Kata Kosong – Dana Dukungan Sosial

Elemen penunjang ketiga dari usulan kebijakan sekolah tersebut adalah Dana Dukungan Sosial. Hal ini bertumpu pada kenyataan bahwa kebutuhan dan persyaratan dukungan di berbagai sekolah diwarnai perbedaan. Di sekolah yang mayoritas muridnya berlatar belakang keluarga migran dan dalam kesehariannya sekolah juga dibebani oleh masalah sosial, biasanya bujet sekolah hampir sepenuhnya masih dipakai untuk mempertahankan berfungsinya hal-hal yang

elementer – seperti ketersediaan buku-buku, keterlibatan murid dalam wisata kelas, ketersediaan makan siang dan fasilitasi ekstra terhadap murid yang membutuhkan; sementara sekolah lain, telah melangkah lebih jauh dalam bentuk pelayanan kualitatif atas pengajaran dan fasilitasi sepanjang hari, termasuk dalam proyek ekstra dan kelengkapan lainnya.

Ironisnya, di sekolah yang membutuhkan dukungan tertinggi, dukungan riil yang diberikan paling minim. Dana dukungan sosial, berfungsi tanpa birokrasi berbelit: Sekolah yang membutuhkan akan mendapatkan tambahan dana dukungan sebesar 10%. Hal ini, untuk membiayai kebutuhan ekstra sehingga, pada gilirannya, memungkinkan sekolah untuk memanfaatkan bujet dasarnya sama seperti sekolah lain.

Konsep ini berbeda dengan bujet per kepala (untuk) sekolah selama ini. Hal ini, tergantung solidaritas sekolah-sekolah yang pendanaannya lebih kuat terhadap sekolah-sekolah yang lebih lemah sehingga dengan demikian memungkinkan keberhasilan pendidikan secara menyeluruh di kota Hamm.

► Dalam Dialog

Setelah dikembangkan bersama fraksi-fraksi di parlemen kota, draft konsep tersebut disosialisasikan dan didiskusikan dengan para orang tua murid, guru dan murid serta warga yang tertarik di tujuh kawasan kota. Pertanyaan sentralnya adalah, bagaimana menerapkan ide tersebut di setiap kawasan kota.

2.5.2. Kesehatan¹²

Asuransi Warga versus Hitungan Per Kepala – Sebuah Pertanyaan Terkait Kebijakan Kesehatan yang Adil

Oleh Martin Timpe dan Christina Rentzsch

Sebuah capaian besar abad ke-20 bahwa pelayanan kesehatan pada prinsipnya tidak tergantung pada penghasilan atau kelas sosial. Kesehatan harus menjadi landasan bagi kehidupan manusia bermartabat dan akses untuk itu harus terbuka bagi semua warga. Sebuah nilai yang secara langsung bisa ditarik dari nilai-nilai dasar sosial demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, di Jerman, timbul perdebatan publik terutama terkait pendanaan sektor kesehatan. Dari sisi pemasukan, terdapat dua model kebijakan yang berseberangan, masing-masing model “*Kopfpauschale*” (hitungan per kepala) dari CDU (Partai Uni Kristen Jerman) dan model “*Buergerversicherung*” (asuransi warga) dari SPD (Partai Sosial Demokrat Jerman). Bagaimana menilai dua model tersebut dari perspektif nilai-nilai dasar sosial demokrasi? Untuk memperjelas, kedua model tersebut perlu diteliti secara rinci, termasuk mencermati kekhususan asuransi kesehatan swasta (PKV).

➤ Asuransi Warga

SPD menuntut pengembangan asuransi kesehatan formal yang diatur secara undang-undang (GKV) menjadi asuransi warga dengan perspektif semua warga membayar sesuai kemampuan pendanaannya. Dalam pembayaran, yang diperhitungkan tidak sekedar penghasilan dari kegiatan *freelance*, tetapi terutama juga gaji dan honor. Termasuk, jenis penghasilan lainnya seperti pemasukan dari (penanaman) modal. Dalam asuransi warga, GKV selain didanai dari anggota asuransi, juga ada tambahan pendanaan dari majikan. Salah seorang dari pasangan suami-istri yang tidak memiliki penghasilan ditanggung dalam jenis asuransi ini, anak-anak pun bertanggung dalam asuransi tanpa pembayaran ekstra.

12) Bandingkan untuk tema kesehatan: Buku Bacaan Sosial Demokrasi 3/Negara Sosial dan Sosial Demokrasi (2009), Bab 7.4 Kesehatan.

➤ Hitungan Per Kepala

Model yang dikembangkan CDU dan disebut sebagai “angsuran kesehatan” mensyaratkan angsuran bulanan per kepala bagi mereka yang wajib mengikuti asuransi. Semua pekerja, terlepas dari besaran penghasilan, harus membayar angsuran asuransi yang sama. Selain itu, terdapat pula kewajiban para majikan. Namun, jumlahnya ditetapkan sebesar 6.5% dari kewajiban angsuran. Dengan demikian, ke depan, para majikan terlepas dari beban bila terjadi kebutuhan menaikkan anggaran. Bagi mereka angsuran kesehatannya melampaui angka 7% dari penghasilan kotornya, perlu diberikan penyesuaian. Angsuran bagi anak-anak mereka, dalam model ini, dibiayai dari pajak.

➤ Masa Depan Asuransi Kesehatan Swasta (PKV)

Ciri khas sistem asuransi Jerman, bahwa sebagian warganya tidak harus terlibat dalam pendanaan solidaritas. Pegawai negeri, disebabkan adanya sistem tunjangan, sejak awal tidak terlibat. Begitu pula dengan pengusaha, terlepas dari besaran penghasilannya, tidak harus mengikuti asuransi formal seperti yang diatur dalam undang-undang.

Mereka yang bekerja (terikat majikan) dengan penghasilan tertentu (batas wajib asuransi), bisa memilih untuk ikut PKV. Semua ini membuat dana hasil angsuran asuransi yang terkumpul, tidak menyisakan pendanaan solidaritas bagi pelayanan medis. Sesuai perspektif dan penilaian politik, seseorang bisa melihat hal ini sebagai masalah atau, sebaliknya, sebagai wujud positif persaingan dalam sektor kesehatan. Penerapan model asuransi warga atau angsuran per kepala, akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap PKV. Sementara asuransi warga bertujuan mengintegrasikan PKV dalam pendanaan solidaritas, penerapan angsuran per kepala membiarkan status profil dari PKV. Bahkan, asuransi anak-anak yang bebas angsuran dalam asuransi swasta, bakal dibiayai oleh pajak.

➤ Pendanaan Solidaritas – Keterlibatan yang Adil Sesuai Kemampuan

Bahwa ciri-ciri utama asuransi warga lebih dari sekedar solidaritas, menemukan pembuktian berikut: Setiap warga terlibat sesuai kemampuannya dalam sebuah sistem asuransi bersama lewat pendanaan sektor kesehatan. Partai CDU juga mengatakan bahwa modelnya berprinsip solidaritas. Alasannya, model yang diusulkan mempertimbangkan “penyeimbangan pajak”. Namun, dari dua sudut pandang, model tersebut bermasalah. Di satu sisi, tidak jelas, seberapa jauh penyeimban-

ngan pajak bisa dilakukan ketika CDU dan mitranya FDP (Partai Liberal) semakin melemahkan kemampuan negara dengan menurunkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan besar. Di sisi lain, kemungkinan pelaksanaan penyeimbangan yang solidaristis lewat sistem perpajakan mensyaratkan terorganisirnya sebuah sistem perpajakan yang solidaristis.

Rencana yang diajukan CDU dan FDP, bertolak belakang dengan persyaratan tersebut. Dalam kontrak koalisi dua partai pemerintah yang saat ini memerintah, prinsip siapa yang kuat memikul beban lebih besar dibandingkan yang lemah seperti yang tertanam dalam pajak progresif, disepakati untuk dihapus. Model ini pun tidak solidaris ketika pegawai negeri, juga di masa depan tidak dilibatkan dan PKV, paling tidak secara formal, dibiarkan tetap dalam struktur lamanya yang bersifat kompetitif.

Sebenarnya, penerapan asuransi warga samasekali tidak berarti bahwa terdapat penyunatan “kebebasan memilih”. Hal tersebut, hanya akan berarti sekedar membandingkan dua konsep kalkulasi peserta asuransi. Sebaliknya, yang ditawarkan adalah “persyaratan kompetisi yang adil” lewat penetapan awal yang mengikat bagi berfungsinya sebuah sistem bersama. Peserta asuransi, diharapkan menjalani sebuah kompetisi demi struktur-struktur pelayanan yang baik ketimbang kompetisi terkait “risiko yang baik” berupa peserta asuransi yang lebih muda dan lebih sehat. Dengan demikian, kebebasan bagi segelintir dengan mengorbankan solidaritas komunitas, digantikan oleh kesempatan yang lebih besar bagi semua untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu kedokteran. Sebuah pertanyaan terkait keadilan adalah, kelompok masyarakat mana yang perlu dibebani dan mana yang perlu dikurangi bebannya. Terkait hal ini pun, kedua model berbeda satu dengan lainnya. Ketika dalam konsep asuransi warga, keluarga beranak dua dibebaskan dikurangi bebannya, pada konsep per kepala mereka bisa terkena beban berupa pengurangan dana sebesar 900 Euro per tahun. Kondisi sebaliknya berlaku bagi mereka yang masih single (bujangan), karena dalam asuransi per kepala mereka bisa memperoleh keringanan sebesar 1.300 Euro per tahun. Sebaliknya, dalam asuransi warga, mereka hanya sedikit memperoleh keuntungan. Seperti ditulis di atas, kesehatan adalah basis bagi kehidupan yang manusiawi dan harus menjadi hak setiap insan. Karena itu, sebuah sistem kesehatan, selain harus diarahkan memiliki kemampuan pelayanan, juga – dan terutama, memberikan persamaan kesempatan dan keadilan kebutuhan bagi semua.

2.5.3. Kebijakan Pasar Kerja¹³

Ketidakamanan yang Berlanjut? Dunia Pekerjaan Baru dan Nilai-Nilai Sosial Demokrasi

Oleh Matthias Neis

Beberapa dekade setelah Perang Dunia II, nampaknya telah tercapai kesepakatan luas antara modal dan kerja di Jerman. Dalam sebuah fase luar biasa pertumbuhan ekonomi pasca 1949, pekerjaan bergaji menjadi sesuatu yang normal. Lewat pekerjaan bergaji, seseorang pada saat yang sama juga menjadi pemilik dari “kekayaan sosial”, bagian dari asuransi bergaransi, perlindungan pekerjaan dan PHK, pengambilan keputusan dalam perusahaan serta standar tariff/gaji yang dijamin undang-undang (Dörre 2005).

Pekerjaan bergaji – dalam sebuah negara sosial, yang dinamakan relasi pekerjaan normal (NAV), selain memberikan keamanan material juga penghargaan minimal yang terukur. Kondisi kilas balik yang mengesankan sebuah fase harmoni, ternyata tidak sepenuhnya bebas konflik. Kompromi, harus selalu dan diperjuangkan dengan “cara-cara keras” dengan capaian maksimal mengurangi ketimpangan pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Paling tidak, sebagian besar masyarakat, memiliki kepastian berlandaskan pekerjaan yang dimiliki untuk secara perlahan dan konsisten mampu memperbaiki standar hidup mereka.

Sejak 1980an, NAV semakin kehilangan daya pancarnya. Memang sebagian besar masyarakat masih bekerja secara normal, namun jumlah tersebut semakin berkurang. Pertumbuhan pekerjaan, hanya terjadi di jenis berikut: kerja paruh waktu, berjangka pendek atau terbatas dan pekerja pinjaman¹⁴

Kondisi tertekan serupa, juga terjadi pada “kekayaan sosial”. Semi-privatisasi pada pengayoman usia lanjut, pelonggaran perlindungan PHK dan menurunnya ikatan tariff, terutama di Jerman (bagian) Timur adalah beberapa aspek yang terlihat nyata dalam proses ini. Kita bisa mengajukan beberapa penyebab dari perkembangan ini. Misalnya, semakin pentingnya kegiatan pelayanan dan informasi, sebuah jenis kegiatan yang lain dan lebih fleksibel dibandingkan moda produksi masa-masa sebelumnya.

13) Bandingkan untuk topic Kebijakan Pasar Kerja: Buku Bacaan Sosial Demokrasi 3/Negara Sosial dan Sosial Demokrasi (2009), Bab 7.2. Pekerjaan.

14) Antara 1991 dan 2003, jumlah pekerja paruh waktu misalnya dari sekitar lima juta meningkat menjadi sembilan juta jiwa.

Di bawah persyaratan persaingan yang, tidak hanya, terjadi antar perusahaan tetapi juga intra perusahaan antara tim atau divisi, “kekayaan sosial” berubah cepat menjadi “cadangan fleksibilitas”. Pengusaha yang berhasil melonggarkan atau bahkan melepas hak-hak perlindungan, memiliki keuntungan persaingan, sesingkat apapun hal tersebut berlaku.

Sebagian besar masyarakat mencemaskan perkembangan ini. Dalam sebuah penelitian *Friedrich-Ebert-Stiftung* pada tahun 2007, 63% responden mengekspresikan ketakutan mereka terhadap perubahan sosial yang terjadi (*Neugebauer* 2007). Kondisi, di mana perasaan ketidakamanan mayoritas yang disebabkan oleh perubahan dalam perekonomian dan lapangan kerja, oleh sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, dideskripsikan sebagai “prekaritas”. Kondisi tersebut, tidak hanya terkait dengan turunnya gaji dan kontrak kerja berjangka pendek. Yang tak kalah penting adalah bagaimana ketidakpastian itu dialami dan diolah. Mempertimbangkan hal tersebut, terlihat bahwa prekaritas bukan sekedar ada sewaktu pre-karir. Hal tersebut, ternyata, merasuk jauh hingga ke dalam pusat pekerjaan. Banyak pekerja tetap di sebuah perusahaan, merasakan ketidakpastian akibat keberadaan pekerja *outsourcing*.

Alternatif yang ditakutkan para pekerja terlihat jelas didepan mata, yaitu terpaksa menerima tawaran gaji dan persyaratan pekerjaan yang biasanya pasti ditolak oleh mereka. Antara para pekerja normal dan mereka yang sepenuhnya tergantung pada kondisi jenis pekerjaan, para pekerja pinjaman itu pun berada dalam keadaan fluktuatif yang tidak stabil. Kecemasannya, semakin dalam terperosok, sementara mimpinya mendekati zona NAV (pekerja normal). Sementara realitas, seringkali hanya menawarkan prospektif, selamanya berlutut dengan ketidakpastian.

Apa saja dampak perkembangan tersebut terhadap proyek (sebuah kondisi) sosial demokrasi?

Pentingnya pekerjaan normal bagi sosial demokrasi di masa lalu harus diapresiasi setinggi mungkin. Hal ini, dalam negara sosial binaannya merupakan salah satu faktor utama dari tiga nilai-nilai dasarnya. Ia menciptakan keamanan bagi banyak (meski, tidak semua) orang dan dengan demikian memuluskan sebuah persyaratan mutlak bagi tercipta dan mekarnya kebebasan positif. Apa yang, bagi nilai keadilan berupa pemerataan relevan dan benar-benar terjadi diorganisir lewat sistem ketenagakerjaan. Pada akhirnya, “kekayaan sosial” diarahkan pada berkurangnya siriko di hari tua. Keamanan sosial, dikembangkan lewat pekerjaan normal,

memerlukan identifikasi sebagian besar masyarakat dengan nilai-nilai dasar sosial demokrasi. Terutama SPD, didalam program-program dasarnya sangat mengacu pada NAV (pekerjaan normal) dan pekerjaan penuh. Pekerjaan normal mencakup semua yang mampu bekerja adalah sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari partai politik pengunjung sosial demokrasi.

Dengan NAV, ikatan erat itu pun lepas. Para reformator kebijakan pasar kerja dan sosial beberapa dekade terakhir, misalnya dalam proses normalisasi pekerja pinjaman (*outsourcing*) dan dalam reformasi asuransi pengangguran, juga dengan keterlibatan SPD mencoba menjawab perubahan radikal komunitas kerja dengan respon perubahan arah yang tak kalah radikalnya.

Nilai-nilai sosial demokrasi, masih memperoleh dukungan dukungan dalam masyarakat. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut tidak otomatis dikaitkan langsung dengan pendukung politiknya. Alasan mendasarnya adalah tidak rampungnya pekerjaan rumah politik untuk kembali menegakkan keamanan sosial dalam gempuran fleksibilisasi yang berlangsung. Apa artinya semua ini bagi sebuah acuan jati diri baru Sosial Demokrasi terkait nilai-nilai dasar yang mendukungnya?

► Kebebasan

Dunia kerja baru, nampaknya memiliki janji kebebasan baru. Sekelompok kecil, meskipun cukup penting akan memperoleh manfaat dan keuntungan bekerja sebagai *freelancer* atau "manager mandiri" dalam menata bebas terkait bentuk proyek yang memerlukan kebebasan kreativitas dan arahan independen. Selain itu, di pasar pekerjaan, berkat fleksibilitasnya mereka dapat menuntut imbalan yang baik. Memiliki cadangan yang cukup, mereka bisa memanfaatkannya waktu menganggur jangka pendek sebagai kesempatan menambah pengetahuan. Kondisi serupa, bagi mereka yang bekerja dengan gaji pas-pasan tanpa cadangan yang cukup, bisa membawa krisis mendalam, yang sekaligus menyunat hak-hak kebebasan positif maupun negatif.

Bagi sosial demokrasi, adalah penting untuk mengembangkan sebuah janji kebebasan sosial yang positif dan realistis. Untuk itu, diperlukan sebuah alat pengamanan kolektif yang baru. Semua potensi kebebasan dari fleksibilisasi, untuk semua pekerja hanya bisa direalisasi apabila berbagai risiko dan krisis yang tak terelakkan, tidak harus ditanggung sendiri.

➤ Keadilan

Adil adalah bagi seseorang yang memiliki ambisi legitim atas yang menjadi haknya yang diputuskan secara bersama. Cukup lama berlaku, tuntutan kepemilikan (*shareholder*) diperoleh lewat kesediaan berprestasi, yang terdokumentasikan lewat pekerjaan. Sejak dulu, sebuah gambaran tentang keadilan menarik garis batas yang tegas, misalnya antar kelamin, serta kecenderungan individualisasi dari pertanggungjawaban. Norma ini, terbukti sangat stabil dan berkembang dalam sebuah komunitas pekerjaan sebagai pendorong ketidaksetaraan, di mana pertimbangan tentang kinerja terus menguat, namun kemungkinan bagi akses terhadap pekerjaan menjadi semakin rumit. Bahkan dalam waktu tertentu, terlempar berkali-kali dari sistem pekerjaan yang ada sebagai pemula, menjadi sebuah pengalaman biasa. Meski, hal tersebut harus dilihat sebagai bukan sesuatu yang legitim. Banyak pekerja pemula memiliki ambisi kesediaan berprestasi dalam bekerja untuk didokumentasikan. Ketika hal ini tidak terjadi, seseorang dituntut untuk lebih giat. Bentuk individualisasi ini, sebenarnya menyelubungi bentuk kesenjangan distribusi dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan bisa berseberangan dengan kesetaraan.

Karena itu, sebuah proyek sosial demokrasi haruslah dituntut menempatkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi yang positif satu dengan lainnya. Positif, artinya tekanan bagi setiap individu hanya boleh ditingkatkan dalam ukuran seberapa besar setiap individu memiliki kesempatan untuk mengartikulasi diri masing-masing. Hanya berdasarkan hal tersebut, adalah masuk di akal untuk menuntut tanggung jawab individual.

➤ Solidaritas

Restrukturisasi sistem pengamanan kolektif, sebuah ungkapan institusional tentang solidaritas di dalam sistem pekerjaan lama, bisa dianggap sebagai sebuah elemen dari krisis umum perilaku solidaritas. Di dalam situasi aktual, maka garis sentral pertentangan sosial - antara "yang di atas" dan "yang di bawah" di mana juga terjadi pertentangan sistem ini – diwarnai oleh pemisahan antara "yang di dalam" dan "yang di luar". Dua perbedaan tersebut, tidak terpisah satu dengan lainnya, namun keduanya mengakibatkan terjadinya pertentangan sosial yang sepenuhnya berbeda. Kondisi persaingan di dalam sebuah perusahaan, dikombinasikan dengan perasaan setiap saat bisa digantikan oleh seseorang yang telah siap di depan pintu, sangat sulit untuk menyediakan sebuah pondasi bagi

sebuah perilaku solidaris. Dia “yang di dalam”, semakin merasa bahwa mereka “yang di luar” sebagai ancaman.

Sebaliknya, elemen keamanan kolektif yang relatif masih berfungsi di lingkungan pekerja pemula dan penganggur, semakin merasakan sebagai beban yang dijaga agar terus menjadi “yang di luar”. Bahwa perasaan ini bukannya tidak berdasar, terlihat dengan sangat nyata pada saat krisis baru-baru ini. Setelah pengurangan drastis kontrak kerja bagi banyak perusahaan di Jerman, musim panas 2008, para *out sourcing* yang secara langsung harus terdepak. Nyaris dalam satu hari, ratusan ribu *out sourcing* yang terkena PHK. Protes dari pekerja dan serikat pekerja, hanya muncul secara sporadis, karena boleh jadi hal tersebut mengamankan lapangan kerja bagi pekerja tetap yang notabene adalah anggota serikat pekerja.

Dengan demikian, perkembangan saat ini memunculkan pertanyaan apakah masih bisa dibayangkan adanya solidaritas dalam dunia pekerjaan. Juga dalam menunggu munculnya sebetuk solidaritas yang terpikirkan, diperlukan sebuah instrumen pengaman sosial sebagai titik acuan sosial demokrasi. Hal tersebut harus bisa mengembalikan kepercayaan terhadap “kekayaan sosial”. Untuk itu, instrumen tersebut harus mengacu pada terpotongnya riwayat (pengalaman) kerja untuk memperkecil kontroversi antara “yang di dalam” dan “yang di luar”.

Di dalam komunitas kerja, keterkaitan sebagian dari nilai-nilai sosial demokrasi dengan pekerjaan tidak lagi sesuatu yang lumrah seperti di masa lalu, sebagian lagi memiliki keterkaitan “yang terlalu bagus” sehingga ada urgensi kebutuhan bagi sebuah perdebatan tentang substansi dari tiga ungkapan berikut.

Keterkaitan antara kebebasan, keadilan dan solidaritas dengan komunitas kerja perlu didefinisikan sebagai sebuah proyek utama bagi pemangku politik pemikiran sosial demokrasi.

Tidak ada tanda-tanda bahwa di masa akan datang, pekerjaan bergaji akan kehilangan fungsinya sebagai motor kepemilikan dan pengakuan. Wajah sosial demokrasi, selanjutnya masih digambarkan oleh (kondisi) bagaimana masyarakat bekerja. Berdasarkan pengalaman pada akhir dekade ini, bahwa semakin dibutuhkan dalam sebuah sosial demokrasi – juga dalam perekonomian dan pekerjaan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip demokratis.

2.5.4. Kebijakan Pendidikan Tinggi

„Swasta Ketimbang Negeri“ atau Barang Publik? Dua Model (yang saling) Bertolak Belakang Tentang Pendanaan Kuliah

Oleh Martin Timpe und Frederike Böll

➤ Latarbelakang Sosial Menentukan Kesempatan Pendidikan

Tak ada satu pun negara industri anggota OECD, di mana latarbelakang sosial sangat berpengaruh terhadap perjalanan pendidikan seseorang seperti yang terjadi di Jerman. Dari 100 anak-anak keluarga intelektual (artinya, sedikitnya satu dari orang tua sang anak memiliki ijazah perguruan tinggi), 83 melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sementara pada keluarga non-akademisi, hanya 23 dari 100 yang menempuh pendidikan tinggi di sekolah tinggi atau universitas (vgl. Isserstedt 2007: 11). Lebih dari itu, dibandingkan negara OECD lainnya, persentasi mahasiswa terbilang sangat rendah. Pada tahun ajaran 2009, jumlah mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama akibat angkatan lulusan *Gymnasium* (*abitur*) yang double, hanya 43% dari total angkatan yang lulus. Bila ingin, agar persentase tersebut meningkat tajam menjadi di atas 50% seperti rata-rata negara anggota OECD, maka anak-anak dari keluarga non-akademisi perlu dimotivasi, karena disinilah terletak potensi terbesar. Hal ini, bukan saja secara perekonomian berdampak baik, namun juga dilihat dari sudut pandang keadilan sosial.

➤ Permasalahan Pendanaan Kuliah

Sebuah langkah penting untuk menciptakan lebih banyak persamaan kesempatan dan meningkatkan kuota belajar di perguruan tinggi terletak pada pendanaan perkuliahan. Karena, banyak lulusan sekolah menengah atas yang berasal dari keluarga non-akademisi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan alasan – meski jumlahnya tidak terlalu tinggi – biaya kuliah yang seringkali membuat mereka, secara pendanaan, tergantung pada orang tua (bandingkan dengan Heine/Quast 2009:16).

➤ BAFöG

“Tetapi ada BAFöG (dukungan bagi mahasiswa, editor)”, boleh jadi akan ada bantahan seperti itu. Sayangnya, dukungan ini hanya bisa dinikmati oleh sekitar 18%, yang berarti hanya sebagian kecil mahasiswa yang kuliah di berbagai universitas di Jerman (bandingkan dengan (lihat 17. BAFöG-Bericht 2007: 8).¹⁵ Selain itu, jumlah yang diterima untuk ongkos kehidupan biasanya lebih sedikit dari kenyataan di lapangan, karena dalam undang-undang, tidak ada klausul yang secara otomatis menyamakan antara penerimaan dan kebutuhan. Tidak kalah menakutkan bagi banyak calon mahasiswa bahwa 50% dari BAFöG adalah pinjaman, bukan bantuan gratis. Di keluarga non-akademisi, kesediaan untuk mengambil kredit jauh lebih kecil dibandingkan pada keluarga akademisi. Sebuah kondisi yang juga menolak usulan pendanaan kebutuhan hidup dan iuran kuliah lewat kredit. Terakhir, untuk mendapatkan bantuan lewat BAFöG, tingkat penghasilan orang tua disyaratkan demikian rendah sehingga banyak keluarga, meski tidak mampu membiayai kuliah anaknya namun tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sebuah kondisi yang disebut sebagai “lobang kelas menengah”.

➤ Biaya Kuliah

Lebih dari itu, di enam negara bagian di Jerman saat ini, iuran kuliah berjumlah hingga sekitar 500 Euro per semester. Sejak pada tahun 2005, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa kebebasan menentukan iuran kuliah di perguruan tinggi tergantung masing-masing negara bagian, terdapat tujuh negara bagian yang dipimpin CDU memutuskan berlakunya iuran umum. Di negara bagian Hessen, ketika parlemen daerahnya memiliki mayoritas merah-hijau (SPD dan Grüene), iuran kuliah dihapus. Juga di Saarland, dengan koalisi pemerintahan hitam-kuning-hijau (CDU-FDP-Grüene), memutuskan untuk menghapus iuran kuliah. Di beberapa negara bagian berikut, yaitu Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen dan Nordrhein-Westfalen, di mana lebih dari mahasiswa Jerman berada, iuran kuliah masih tetap berlaku. Artinya, terdapat 2 model pendanaan kuliah yang berseberangan: di satu sisi, model yang memperkuat kontribusi non-negara (swasta) dalam pendanaan kuliah dan karena itu, misalnya, mendukung berlakunya iuran kuliah; di sisi lain, tuntutan bagi kuliah gratis yang mengacu pada pemahaman pendidikan adalah hak asasi manusia. Dari pemahaman terakhir, pendidikan adalah barang publik (*public goods*), yang diperuntukkan bagi semua – tidak tergantung pada penghasilan serta latarbelakang ekonomi dan sosial.

¹⁵ Tercantum di sini adalah bagian dari semua mahasiswa yang memperoleh dukungan

➤ Pendanaan Kuliah dan Nilai-Nilai Dasar Sosial Demokrasi Kebebasan

Kebebasan, demikian argumentasi sosial demokrasi, juga selalu memiliki persyaratan material. Hanya mereka yang memiliki akses ke pendidikan, bisa memanfaatkan kebebasannya. Hak terhadap kuliah di perguruan tinggi, tidak akan berguna bila seseorang tidak mampu membayar sewa di asrama mahasiswa. Hak untuk bebas memilih jurusan di perguruan tinggi, akan tidak terlalu berguna bila seseorang secara finansial tergantung pada orang tua sehingga, langsung atau tidak langsung, dipaksa lebih mengikuti pandangan orang tua tentang profesi dan jurusan yang cocok dibandingkan keinginan sendiri. BAföG yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, nampaknya cocok, kebebasan formal terkait kuliah bisa terpenuhi. Sebuah kebebasan yang fiktif, adalah janji yang diberikan oleh berbagai model (pembiayaan lewat) kredit untuk pendidikan. Hal tersebut menciptakan ketergantungan baru dalam bentuk utang dan kewajiban terhadap pemberi kredit.

➤ Keadilan

Ketika mendiskusikan tentang biaya kuliah dan keadilan, selalu muncul sebuah argumen yang sama, meski lewat pengulangan menjadi tidak benar. Lewat pajaknya, seorang perawat “membiayai” kuliah anak lelakinya dokter kepala, tempatnya bekerja. Padahal, seorang dokter kepala sebenarnya sangat mampu untuk membiayai kuliah anaknya. Kondisi tersebut, sangat tidak adil dan, karena itu, sebuah keluarga yang mampu harus secara langsung membayar biaya kuliah perguruan tinggi bagi anak-anaknya. Kenyataan yang ada, sebuah ketidakadilan untuk membenarkan hal berikut: buruknya kesempatan yang sama dalam sistem pendidikan dan ketidaksamaan dalam pendistribusian pajak masyarakat. Anak lelaki seorang dokter, sangat bisa kuliah dengan atau tanpa iuran (pungutan biaya kuliah). Ketika iuran kuliah dinaikkan, kesenjangan sosial terkait akses ke perguruan tinggi dibakukan. Dengan demikian, kesempatan seorang anak perempuan seorang perawat perempuan, akan semakin mengecil dibandingkan saat ini. Namun, siapa pun yang mengkritisi bahwa seorang dokter kepala teralalu sedikit berkontribusi dalam pendanaan perguruan tinggi dan sebaliknya perawat perempuan terlalu banyak, sebaiknya mencermati sistem perpajakan ketimbang berkuat sekedarnya pada iuran kuliah. Ia seharusnya, secara konsekuen menuntut beban pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang berpenghasilan tinggi dan pengurangan beban bagi mereka yang berpenghasilan menengah bawah. Keadilan itu adalah kebebasan yang sama (bagi semua)

– demikian keyakinan sosial demokrasi. Kebebasan yang sama untuk kuliah, minimal akan terganggu oleh kenaikan iuran kuliah. Keadilan kontribusi terhadap pendanaan yang menjadi tanggung jawab negara itu berbentuk setiap warga harus berkontribusi sesuai kemampuannya dalam sistem perpajakan.

► Solidaritas

Akhirnya, adalah bermanfaat untuk sejenak memikirkan akibat dari biaya kuliah terhadap kondisi sosial masyarakat. Perguruan tinggi (di Jerman), memberikan kontribusi penting dalam perkembangan demokratisasi dan masyarakat. Bukankah sangat masuk di akal, bahwa para mahasiswa dan dosen untuk saling belajar bagaimana bersikap solidaritas dan demokratis satu dengan lainnya? Namun yang terjadi, biaya kuliah dan berbagai instrumen kebijakan perguruan tinggi, memunculkan dominannya relasi-relasi pasar, pelanggan (*client*), dan pesaing. Selain itu, biaya kuliah juga menyebabkan kesenjangan penghasilan antara akademisi dan non-akademisi semakin besar. Apakah perkembangan - dimana perbedaan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar, baik bagi sebuah masyarakat, jawabannya kami serahkan pada penilaian anda.

3. MODEL KEMASYARAKATAN DALAM PERBANDINGAN

Mingguan “Der Spiegel” dalam terbitannya 22 Oktober 2007, menggunakan judul sampul (*cover*) yang provokatif:



Spiegel: 4312007, sumber: www.spiegel-online.de, 22.10.2007

Karikatur pada sampul mingguan *Der Spiegel* tergambar beberapa pemimpin partai SPD yang nampaknya berada dalam kapal yang sedang karam. Kapten Gerhard Schröder terlihat sendirian dalam kapal, sementara Gregor Gysi dan Oskar Lafontaine terlihat menyerobot perahu penyelamat pergi meninggalkan kapal yang sedang karam. Judul karikatur, „Ketika kita berenang berdampingan“. Dalam kasus ini, kata “berenang” diartikan sebagai “tidak paham” ke mana orientasi yang dituju. Karikatur juga menggambarkan tenggelamnya kapal secara dramatis di mana orientasi sama dengan naik ke kapal.

Apa pendapat anda tentang judul sampul „*Der Spiegel*“ ini? Apa yang ingin dikatakan tentang pemahaman sebuah partai politik – dalam hal ini SPD?

Yang menarik, terlepas dari pendapat perorangan, bahwa „*Der Spiegel*“ secara cerdas membuat sebuah metafora berikut. Ia menganalog sebuah kecemasan dan kesan bahwa ketika dalam (tenggelamnya partai tersebut) sedang diprogramkan. Pernyataan yang tak jarang memprediksi kenyataan ini sama dengan keseluruhan aransemen.

*Apa judul sampul
Der Spiegel?*

*Apa yang tidak
diperlihatkan oleh
karikatur “Der
Spiegel” – sebuah
komentar untuk
interpretasi*

*Sebuah perdebatan
tentang koordinat
adalah sebuah
keharusan*

Berupa sebuah “kompas sosial” bagi partai politik demokratis apapun, sesuatu yang tidak sekadar dimungkinkan, tapi juga diperlukan untuk memperdebatkan dan menentukan “koordinat” atau posisi politiknya.

Terkait itu, bisa dipastikan belum terjadi apa yang disebut „tenggelamnya” atau pecahnya (kapal) SPD: Sebuah transformasi politis, seperti pergantian kepemimpinan usai kekalahan dalam pemilu bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan sebuah keniscayaan – itu bukanlah kapal yang pecah.

Juga „rantai perintah” bertolakbelakang dengan proses pengambilan keputusan secara demokratis dalam sebuah partai. Karena yang diperlukan, dalam keadaan darurat dipertanyakan koordinat yang ada dan menyelaraskannya dengan „kompas sosial-politis” yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, sampul majalah “Der Spiegel” mempresentasikan pemahaman otoriter tentang politik, sesuatu yang bertolakbelakang dengan tuntutan demokrasi.

*„Kompas sosial
politik”*

„Kompas sosial-politis” tidak terlihat dalam gambar sampul tersebut. Padahal, itu adalah persyaratan untuk menentukan arah politik. Coba kita cermati apa yang dimaksud dengan „navigasi”.

Sebuah „kompas sosial-politis” mensyaratkan adanya gambaran tentang arah politik yang menggambarkan posisi yang dimiliki sebagai acuan untuk melakukan „navigasi”.

*Pertanyaan
terkait koordinat
dan navigasi*

Sebagai gambaran, „navigasi” tak jarang terjadi dalam „pelayaran” pengambilan keputusan politik. Bahkan dalam pengambilan keputusan yang tidak mendasar pun, dasar keyakinan kita ikut mempengaruhi.

Keuntungannya, dan ini sekaligus mempersulit penjelasan, bahwa setiap dari kita memiliki kompas masing-masing. Dengan demikian, tidak mungkin untuk menawarkan kompas masing-masing, melainkan paling banter berbicara tentang beberapa koordinat pada saat yang sama. Bagaimana memanfaatkan „navigasi” bagi kebutuhan pribadi, terserah masing-masing. Dalam partai politik dan organisasi demokratis, hal ini berkaitan dengan negosiasi.

Namun, untuk navigasi terdapat dua persyaratan mendasar: Setiap dari kita harus mengenal posisinya sendiri. Dengan kata lain perlu dianalisa di mana situasi masing-masing berada, begitu pula situasi masing-masing dalam masyarakat.

Persyaratan berikutnya adalah bahwa setiap dari kita perlu sepakat tentang „arah politik “ yang ingin dituju.

Keduanya, titik awal dan tujuan (atau kenyataan dan keinginan), diselimuti oleh gambaran sosial-politik yang saling bersaing. Baik argumentasi liberal, konservatif, sosialis maupun sosial demokratis berupaya untuk mendefinisikan titik awal dan tujuan agar „navigasi“ ke arahnya dimungkinkan.

Berbicara tentang sosial demokrasi sebagai model masyarakat, sebagai sebuah pilihan sistem koordinat, katakanlah sebagai sebuah arah (model) masyarakat yang dituju, haruslah bisa diperbandingkan dengan konteks model masyarakat lainnya.

3.1. Kapitalisme Pasar dan Demokrasi

Sebagai awal, dua istilah: „kapitalisme pasar“ dan „demokrasi“

Sebelum kita membuat gambaran tentang berbagai koordinat yang berbeda, diperlukan dua penjelasan tentang pengertian, yang sangat mendominasi konstitusi masyarakat. Yakni: Kapitalisme Pasar dan Demokrasi.

Kapitalisme pasar dipahami sebagai sistem, di mana

- barang-barang dapat dipertukarkan secara bebas di pasar
- produksi barang-barang berdasarkan sistem kapitalisme, terutama berlandaskan kewenangan kekuasaan ekonomi swasta atas alat-alat produksi
- terdapat pihak penerima upah di satu pihak dan pemilik modal di lain pihak
- tak ada regulasi, paling-paling hanyalah lembaga-lembaga yang membingkai di luar pasar

Demokrasi merupakan prestasi historis, yang

- hendak merealisasikan gagasan kebebasan yang sama bagi segenap manusia satu masyarakat dalam satu negara
- menerapkan otonomi politik lewat keputusan mayoritas yang demokratis
- memberi peluang partisipasi bagi semuanya dalam sebuah masyarakat yang berkonstitusi (negara).

Definisi minimalis ini memperlihatkan, bahwa suatu masyarakat yang diorganisir secara kapitalisme pasar maupun demokratis, akan mengalami ketegangan sebagai konsekuensi dampak kapitalisme pasar murni dan tatanan masyarakat demokratis akan berkontradiksi satu sama lainnya.

Kapitalisme pasar menghambat demokrasi, bila

- kekuasaan segelintir atas alat-alat produksi menyebabkan perbedaan pembagian kekayaan, yang bertentangan dengan kebebasan dan partisipasi bagi semua dalam masyarakat,
- ketimpangan kekuasaan antara majikan dan pekerja begitu dominannya, sehingga secara keseluruhannya bertentangan dengan kemandirian pengurusan kehidupan pekerja; kapitalisme pasar lewat nafsu meraup laba, segelintir bertentangan dengan kesejahteraan bersama, padahal

Kontradiksi demokrasi dan kapitalisme pasar

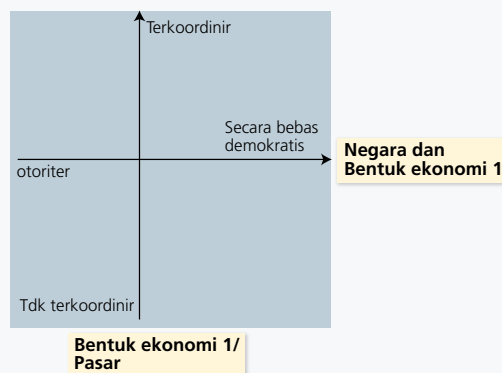
- kebersamaanlah yang bisa menjamin prinsip-prinsip demokratis;
- negara hanya berperan menangani keamanan dan ketertiban belaka.

Demokrasi menghambat kapitalisme pasar yang murni jika

- kebebasan perusahaan dibatasi dan ditiadakan secara signifikan oleh keputusan-keputusan demokratis;
- lewat keputusan-keputusan demokratis intervensi negara mengancam perkembangan dan kebebasan individu (misalnya lewat pengambilalihan hak-hak pribadi demi kepentingan umum), jadi terjadi intervensi wilayah privat individu.

Demokrasi dan pasar kapitalisme dapat digambarkan sebagai ketegangan wilayah.

Tarik-menarik antara berbagai bentuk perekonomian



Gambar. 4: Sistem koordinat untuk memetakan model-model masyarakat

Untuk bentuk ekonomi pasar dapatlah mengambil contoh kutub „koordinasi“ dan „non-koordinasi“. Di satu pihak non-koordinasi, yakni pasar yang dibiarkan bebas, di lain pihak pasar terregulasi dan terkoordinasi.

Selain itu, terdapat tensi antara tatanan negara otoriter dan demokratis yang mengakui hak-hak kebebasan individu. Kapitalisme pasar dan demokrasi adalah dua pengertian utama, yang dapat menggambarkan koordinat masyarakat. Teori-teori politik fokus pada berbagai definisi terkait cara koordinat ini diinterpretasi dan diarahkan.

Pertanyaannya, bagaimana meletakkan berbagai gagasan atau model kemasyarakatan di dalam sistem koordinat ini:

- Posisi Liberal
- Posisi Konservatif
- Posisi Sosialis
- Posisi Sosial Demokrasi

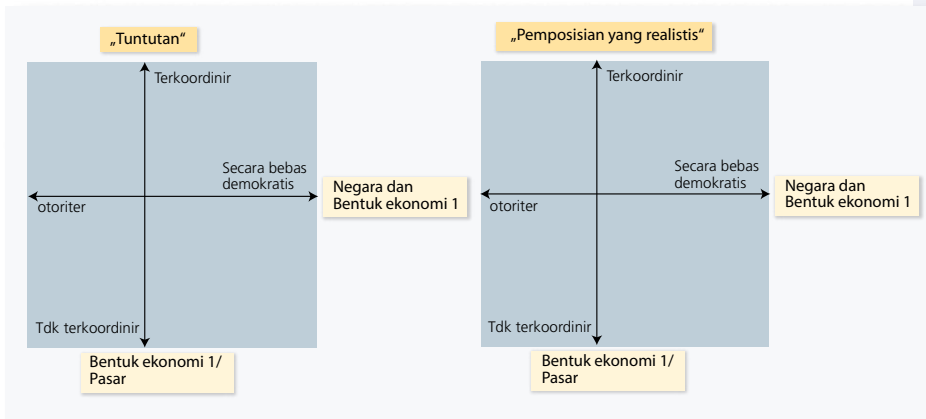
Untuk diskusi dan pekerjaan rumah:

Letakkanlah model-model masyarakat di atas sesuai pemikiran anda.

Apakah dalam meletakkan model-model masyarakat itu anda agak ragu? Ataukah anda begitu cepat dan yakin?

Jika anda agak ragu, maka bukanlah kesalahan anda, melainkan keraguan anda mempunyai beberapa alasan. Kita akan segera menyaksikan, bahwa keraguan itu dapat berasal dari masalah sistematis.

Mungkin pembedaan selanjutnya akan membantu anda: pada langkah pertama, cobalah mengisi sistem koordinasi itu dengan memasukkan model-model masyarakat yang mempunyai tuntutan-tuntutan tertentu. Pada langkah kedua, berangkat dari pemikiran anda, pikirkanlah posisi yang realitis bagio model-model masyarakat tersebut.



Gambar 5 :Tuntutan dan pemosisian yang realistis

Maka pertanyaan yang menggelitik adalah: jika penempatan „satu model masyarakat“ dalam „versi klaim“ dan „versi realitas“ berbeda, maka di mana letak perbedaan itu? (kita hentikan di sini dengan kesimpulan bahwa persepsi kita tidak sesuai)

Sebaiknya anda ingat, kedua sistem koordinat dengan posisi model-model masyarakat itu. Anda akan bisa mengujinya, apakah penjelasan selanjutnya akan membantu anda.

Permasalahan tentang perbedaan antara klaim dengan realitas hanya dapat dijawab, jika di satu pihak model-model masyarakat itu dicermati secara teoretis, dan di lain pihak berdasarkan data empirik dilakukan pengujian, seberapa jauh negara yang akan atau telah berorientasi pada model-model tertentu itu sesuai dengan tuntutananya. Jika antara klaim dengan realitas terdapat jurang perbedaan, maka hal ini akibat retorika yang menyesatkan (umpamanya demi mempertahankan kekuasaan), yang mencoba, menjual sesuatu sebagai keuntungan yang umum demi kepentingan pribadi. Di sini harus diajukan pertanyaan mendasar, *Cui bono?* Siapa yang diuntungkan? Siapa yang memperoleh keuntungan dengan argumentasi-argumentasi ini?

Ataukah terdapat lubang teoretis, yang harus dilengkapi guna menutupi perbedaan antara temuan empiris dan klaim teoritis dalam masyarakat saat ini.

Bila klaim dan realitas sebuah model jauh berbeda, apa penyebabnya?

Siapa yang memperoleh manfaat?

*Di lain pihak:
utopisme atau
diagnosa?*

Ini bisa berarti, bahwa model masyarakat tersebut merupakan sebuah model jangka panjang yang tidak realistis. Inilah sebuah model tatanan masyarakat yang utopis. Model tersebut patut dikritik karena utopisme politis itu menghalangi hal yang realitis dikerjakan sekarang. Sehubungan dengan itu, dapatlah ia disebut sebagai persyaratan sekunder, bahwa suatu gagasan politik harus bisa terlaksana secara realistis secara demokratis.

*Utopisme yang
mewah*

Utopisme tanpa dampak baik bagi masyarakat merupakan hal mewah, yang hanya dapat dikerjakan oleh mereka yang sudah mapan. Apakah utopisme tanpa dukungan politik masyarakat memiliki masa depan, sulit dijawab secara umum. Yang perlu ditelisik adalah apakah strategi kelompok politis ini dalam sikap kongkritnya bisa diuji atau tidak.

Sebagai kompas anda dan penjelasannya, cukup sekian saja, ketika terbentang dalam jurang antara klaim dan realitas. Dalam membaca halaman selanjutnya tentang berbagai aliran politik dan gagasan, sebaiknya anda menyimpan „posisi“ anda tentang gambaran kemasyarakatan di belakang kepala.

*Empat gambaran
tentang tatanan
masyarakat*

Dalam bab selanjutnya akan diperkenalkan secara ringkas berbagai gambaran tentang tatanan masyarakat dari liberalisme, konservatisme, sosialisme hingga sosial demokrasi. Kendati bisa terancam kekurangan informasi akibat ringkasnya bahasan terkait model tatanan masyarakat tersebut, namun di sini sebaiknya diperkenalkan sekedar argumentasi pokok dari setiap aliran. Untuk „versi realitas“ akan diberikan beberapa penjelasan pada akhir pengantar.

Karena hanya bisa sekedar memperkenalkan ikhtisar belaka, maka setiap penutup suatu model yang diperkenalkan, akan disebutkan acuan bacaan yang lebih mendalam.

3.2. Posisi Liberal

Dalam hubungan antara pasar dengan demokrasi, posisi liberal menggarisbawahi pasar bebas dan memfokuskan kebebasan pengusaha. Keputusan-keputusan demokratis hanya terbatas dalam bidang kenegaraan saja, yang bertugas sebagai penjamin keberadaan pasar bebas. Beberapa asumsi mendasar posisi liberal adalah:

- Pasar mengatur dirinya sendiri, di mana pasar mengamankan aturan penawaran atas barang-barang materiil dan non-materiil berdasarkan permintaan masyarakat.
- Kebebasan mempunyai prioritas mutlak terhadap persamaan dan solidaritas, prioritas utama kedudukan individu terhadap masyarakat.
- Kebebasan terealisasi langsung lewat pasar. Pengekangan (terutama) terhadap kebebasan pasar dapatlah disamakan dengan pengekangan sama sekali kebebasan dan karenanya ditolak.
- Negara menerima tugas, menciptakan persyaratan-persyaratan bagi pasar dan risiko sosial yang menimpa manusia ketika terjerumus ke kondisi darurat tanpa kesalahannya. Paling tidak, mengamankannya dari tuntutan nilai-nilai dasar. Wilayah politis yang terkurung sempit ini diregulasi oleh demokrasi. Negara hanyalah berwenang membuat „kerangka tatanan“ masyarakat.
- Gambaran tentang manusia berorientasikan kebebasan, yang membedakan satu sama lainnya oleh prestasi dan hidup sebagai makhluk pemaksimal manfaat.
- Konsep-konsep liberal bertolak dari bank sentral yang independen, yang terutama target prioritasnya adalah stabilitas nilai uang („moneterisme“).

Secara dini, liberalisme berkembang bersamaan dengan masyarakat borjuis. Filosof dan „pendiri“ liberalisme yang berpengaruh adalah John Locke (1632–1704) (bandingkan hal. 11 dst.).

*Asumsi dasar
argumentasi liberal*

*Salah seorang
tokoh neo-liberal
terkenal adalah
F. A. von Hayek*

Bentuk klasik liberalisme di bidang konstitusi negara (bukan di bidang konstitusi ekonomi) telah memberikan pengaruh besar kepada argumentasi-argumentasi sosial demokrat saat ini (bandingkan halaman hal. 72 dst).

Friedrich August von Hayek (1899-1992), ekonom asal Austria yang merupakan salah seorang pemikir liberalisme penting abad ke 20.

Ia adalah pendukung utama kebebasan pasar dan penolak segala bentuk intervensi negara. Karenanya, ia dikenal sebagai pengecam terpedas terhadap sosialisme.

Namun, dilihat dari konteks sejarah, pada paruh pertama abad ke 20 kubu neoliberal¹⁶ lebih mengukung sambil mempertajam posisi Locke yang moderat. Karena itu, Friedrich August von Hayek¹⁷ berpendapat bahwa kebebasan dan demokrasi hanya mungkin terealisasi dalam satu sistem ekonomi yang berlandaskan pemilikan pribadi dan

persaingan tak terbatas. Masyarakat lahir sebagai „tatanan yang spontan“, di mana subyek-suyek ekonomi berhubungan dan bersaing satu sama dengan lainnya lewat pasar. Tugas yang diemban oleh negara sebatas mendefinisikan aturan-aturan umum terkait sikap setiap individu terhadap sesamanya (bandingkan Conert 2002: 287). Masalahnya, dengan demikian kebebasan dan demokrasi bakal menjadi barang langka yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir, sehingga “tatanan spontan”-nya Hayek menjadi kehilangan arti. Juga, bahwa kebebasan ekonomi seseorang dalam *free fight capitalism* menjadi penyebab kondisi darurat ekonomi dan ketidakbebasan bagi yang lain. Sampai di sini, kita tidak akan menelusuri lebih jauh berbagai argumen Hayek. Bahasan baik dan mendalam, bisa dibaca dalam karya Conert.

Bahwa terdapat jurang perbedaan antara tuntutan dengan realitas argumentasi neoliberal, dapat juga ditemui dalam argumentasi Wilhelm Roepkes. Menurut Wilhelm Roepkes, liberalisme itu merupakan satu-satunya alternatif terhadap bentuk tatanan masyarakat tiran dari sosialisme. „Barang siapa yang menolak kolek-

16) Dalam tulisan selanjutnya, penggunaan penerian „neoliberal“ sebagai posisi teoritis terkait dengan liberalisme klasik pada paruh pertama abad ke 20 dan, yang terkait dengan itu, berkembang sejak tahun 1980an. Namun akhir-akhir ini, di kelompok kiri, pengertian neoliberal umumnya dinilai sesuatu yang merendahkan serta menjadi slogan perjuangan. Terlepas apa posisi seseorang terhadap neoliberal, yang bisa berbahaya adalah ketika semua hal yang buruk dicap sebagai neoliberal. Untuk menghindari cara berargumentasi analitis yang tak bersih, kami menggunakan istilah „neoliberal“ (new-liberal)..

17) Perlu dijelaskan di sini, bahwa berbagai argumentasi Hayek pada beberapa posisi-kunci (misalnya dalam soal konstitusi dari masyarakat dan gambaran sejarah) sangat berbeda dari konsep-konsep neoliberal. Dengan demikian, meski Hayek adalah teoritis berpengaruh, namun bukan berarti tidak kontroversial di kalangan kubu neoliberal itu sendiri.

tivisme”, tulisnya, haruslah menghendaki ekonomi pasar (...). Tapi, ekonomi pasar adalah kebebasan pasar, kebebasan harga dan ongkos yang lentur. Artinya kemampuan penyesuaian dan penjajahan produsen berada di bawah kendali (kekuasaan) permintaan. Secara negatif berarti kebalikan dari monopoli dan konsentrasi serta anarki kelompok-kelompok kepentingan, yang merambah di semua negara seperti tempat-tempat mucikari.

Ekonomi pasar berarti, prinsip kolektif yang usang dan bejat itu harus diganti regulasi pasar sebagai satu-satunya prinsip yang tersedia bagi sebuah tatananan masyarakat yang terdeferensiasi rinci dan berteknologi tinggi. Namun, harus dijamin agar proses ekonomi berjalan, maka regulasi tersebut harus tanpa kepalsuan dan (tidak boleh) membusuk oleh kuasa monopoli “ (Röpke 1946: 74).

Di sini nampaklah posisi-posisi liberal yang bertentangan. Di satu sisi, digembarkan bahwa pasar yang (hampir sepenuhnya) meregulasi dirinya sendiri, terbebas dari sederetan belenggu politik. Di lain sisi, monopoli dikritik tajam dan karena itu dituntut adanya pengawasan negara agar persaingan tidak dilumpuhkan. Ini bertentangan dengan gambaran sebuah „pasar bebas“. Tampaknya, pasar terpecah dalam berbagai friksi sehingga tidak mampu meregulasi dirinya sendiri. Negara sebagai pengatur, ternyata memang diperlukan.

Selain itu, posisi neoliberal berkeyakinan bahwa dengan adanya kebebasan pasar maka telah cukup terkoordinasi kebebasan setiap individu. Sebuah kesimpulan yang tak bisa dipertahankan sehubungan dengan dampak keterpinggiran masyarakat (miskin) yang nyata akibat kapitalisme pasar.

Paling tidak sejak tahun-tahun 1960an, telah tumbuh jaringan luas di kalangan neoliberal berupa jaringan penelitian, konsultasi politik, lembaga-lembaga ekonomi dan lobi-lobi. Berbagai jaringan ini cukup berperan dalam „peralihan berbasis neoliberal“ tahun 1980an, contohnya di bawah Thatcher dan Reagan.¹⁸

Posisi „neoliberal“ umumnya didukung oleh pemilik modal dan mereka yang hidupnya berkecukupan (biasanya, berwujud burjuis ekonomi dan pendidikan). Jadi, dari dua sisi mata koin neoliberalisme adalah model tatanan masyarakat elit. Ia tumbuh kembang di kalangan berada sekaligus mewakili kepentingan mereka.

18) Sebuah tulisan menarik tentang kelahiran jaringan neoliberal bisa dibaca dalam Plehwe / Walpen 2001.

Bacaan yang mendalam tentang neoliberal dan para pengkritiknya:

Friedrich August von Hayek (1946), Der Weg in die Knechtschaft, Zürich.

Wilhelm Röpke (1942), Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Zürich.

Wilhelm Röpke (1946), Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Zürich.

Hansgeorg Conert (2002), zur Ideologie des Neoliberalismus – Am Beispiel der Lehre F. A. von Hayeks, in: Conert, S. 275–296.

David Harvey (2007), Kleine Geschichte des Neoliberalismus, Zürich.

3.3. Posisi Konservatif

Yang paling sulit dimengerti adalah posisi konservatif, karena alasan historis maupun sistematis.

Konservativisme: orientasi pada yang sudah ada (tradisi)

Ditinjau dari sisi historis posisi konservatif - seperti tercermin dari namanya- pada intinya selalu berorientasi pada sesuatu yang ada dan ingin dipertahankan. Sebagai sebuah ide/gagasan yang asli dan bersifat historis, tidak ditemukan pada kubu konservatif. Singkatnya, konservatif selalu ada, tetapi tidak ada konsep konservativisme yang berkesinambungan.

Sewaktu Revolusi Prancis dan masa restorasi tigapuluh tahun pertama abad ke 19, posisi konservatif mewakili kelompok privilese baru dan kepentingan kaum bangsawan. Dalam kekaisaran Jerman yang baru muncul ketika itu, konservatif mendukung pembentukan negara-negara kecil Jerman, kemudian untuk kekaisaran. Pada masa Republik Weimar sebagian besarnya mendukung restorasi kekaisaran Jerman dan menentang demokrasi. Pada tahun 1980-an kelompok konservatif lebih suka berlindung di balik nilai-nilai neoliberal klasik dan memblok upaya reformasi tahun 1970-an. Sebuah garis berkesinambungan posisi konservatif tidak dapat didefinisikan.

Landasan pemikiran konservatif

Meskipun demikian – terutama pada saat ini - dapat disimpulkan beberapa landasan pokok pemikiran konservatif, sebagai berikut:

- Konservatif biasanya berorientasi pada nilai-nilai dasar keluarga, tanggung jawab sendiri dan pemikiran tentang prestasi. Tradisi dijunjung tinggi.
- Negara, biasanya dilihat sebagai nilai-nilai “tatanan yang lebih tinggi” seperti , tercermin dalam istilah bangsa. “Tatanan yang lebih tinggi” ini biasanya berdasarkan lebih pada pemikiran yang berorientasi hirarki dan relasi positif terhadap elite (berprestasi) di masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan dalam masyarakat terjustifikasi.
- Di Jerman – juga di banyak negara- pemikiran konservatif berorientasi pada gambaran manusia dalam agama Kristen. Inti dari ajaran sosial Katolik (caritas, prinsip subsidiaritas) dijadikan pedoman nilai-nilai.
- Sejak beberapa tahun istilah “kewargaan baru” (Buchstein/Hein/Joerke 2007:201) dipergunakan oleh pihak konservatif.
- Istilah ini menggambarkan seorang warga yang dalam hidupnya berhubu-

ngan dengan nilai-nilai seperti keluarga, santun dan ramah dan memasukan nilai-nilai tanggung jawab ke dalam masyarakat sipil serta profesinya. Seperti yang diformulasikan oleh Udo di Fabio: “Menjadi warga saat ini, berarti menyatukan beban, dan kesenangan, kasih sayang dan pertengkaran, penderitaan dan kemakmuran satu dengan lainnya.. Kebebasan, juga dipahami sebagai kebebasan untuk terikat sementara keberhasilan sebagai prestasi diri, yang patut dinikmati sekedarnya, tanpa mengabsolutkan ikatan dan prestasi . Menjadi warga, artinya dalam setiap urusan individual, tidak melupakan mereka yang lemah maupun yang memerlukan pertolongan. Selain kebebasan dan persamaan, persaudaraan pun harus diperlihara. (di Fabio 2005 hal. 138). Dalam istilah kewargaan baru, tercermin pula pengertian tentang kebebasan individu, yang pada intinya menyerukan penegakan moral setiap individu. Hal ini, jelas berbeda dengan gambaran manusia sosialis, sosial demokrat, dan juga posisi liberal.

- Sejak tahun 1980-an dan dengan “perubahan mental - moral” yang diwakili oleh pemerintahan Helmut Kohl, terbentuk sebuah campuran konservatisme yang berasal dari gambaran manusia dari sudut pandang Kristen Konservatif di satu sisi dan liberalisme ekonomi di sisi lain.
- Sebaliknya sejak pemerintahan Angela Merkel ditambahkan elemen-elemen dan cara berpikir sosial demokrat (meski dalam bentuk yang telah diubah dan diperlunak) ke dalam konsepnya. Sebagian terutama dalam kebijakan keluarga - telah menimbulkan potensi konflik yang cukup besar antara “Kelompok Modern dan Konservatif” dalam partai Uni Kristen Demokrat (CDU).

Hal tersebut memperkuat pandangan, sulit memastikan keterhubungan konservatif dengan salah satu partai secara jelas dan, keberlanjutan historis posisinya.

Yang lebih jelas, ketika menguraikan secara tepat kelompok sasaran posisi konservatif: Kelompok pendukungnya terutama warga cukup berada yang berasal dari kelas menengah dunia usaha dan berpendidikan serta (terutama dari lingkungan) gereja Katolik.

Bacaan yang mendalam tentang Konservatisme:

:
Udo di Fabio (2005), Die Kultur der Freiheit, München.

Edgar Jung (1932), Deutschland und die konservative Revolution, München.

Martin Greiffenhagen (1971), Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland, München.

3.4. Sosial Demokrasi dan Demokrasi Sosial

Sosialisme demokrasi sebagai model pemikiran dan sosial demokrasi sebagai kekuatan politik memiliki tradisi pemikiran panjang, yang terkait erat dengan lahirnya gerakan buruh. Berbeda dengan konsep konservatif dan liberal, model pemikiran politik ini terbukti mampu melakukan perubahan. Ini menyangkut model pemikiran yang selalu memiliki kesadaran mencatat kesejarahannya. Oleh karena itu sangat berguna untuk menengok kembali sejarah gagasan aliran sosial ini.

3.4.1. Pemikir Terdepan Gerakan Buruh

„Kapan lahirnya sosialisme demokrasi sebagai sebuah gagasan?“ Sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Hermann Duncker memastikan: “Sejarah sosialisme dimulai dengan sejarah umat manusia” (Duncker 1931 : 9) . Ada pula yang mengaitkan gagasan sosialis dengan ajaran kristen purba. Sedangkan yang lainnya mengemukakan, bahwa sosialisme awal berasal dari Prancis atau Inggris.

Demikianlah orang membicarakannya melalui sejarah dan selalu saja ada tema baru mengenai kelahirannya. Semua posisi tentu memiliki alasannya masing-masing dan juga legitimasinya. Meskipun demikian, semua itu menyesatkan, karena lebih penting dari pertanyaan, kapan lahirnya sebuah, adalah pertanyaan, sejak kapan gagasan tersebut berdampak menentukan dan apa penyebabnya.

Pertanyaan ini mudah dijawab: gagasan sosialisme berpengaruh besar dengan adanya gerakan buruh – di Jerman dengan industrialisasi pada abad ke 19.

Di sini tidak dimaksudkan untuk mengedepankan sejarah sebuah gagasan secara yang lengkap, melainkan mendiskripsikan secara singkat kemunculan dan dinamikanya.

1848 hingga sampai akhir abad ke 19: munculnya (sebuah) aliran politik
1848 tidak hanya berlangsung revolusi borjuis di Jerman, tetapi juga merupakan tahun lahirnya manifesto partai komunis, sebuah misi yang disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engel .

Perkembangan sejarah dalam model

Kapan „sosialisme“ sebagai ide berdampak menentukan?

Karl Marx (1818-1883) seorang ekonom sosial yang menonjol dan salah satu filsuf terpenting abad ke 19.

Yang tetap sangat penting sampai sekarang ini adalah analisa ekonominya mengenai kapitalisme, jauh melampaui uraian sederhana para pengritiknya, maupun para pengikutnya.

Untuk pertama kalinya, sebuah program gerakan buruh diformulasikan dalam bahasa yang mudah dimengerti .

Landasan teori dari program politik ini kemudian diperkuat dalam karya-karya Karl Marx. Asumsi mendasar dari sosia-

lisme sebagai model pemikiran pada saat itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Menurut Marx, kapitalisme (pasar) telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ketidakbebasan banyak manusia terhadap beberapa orang yang “bebas”. Di satu sisi terdapat pemilik modal dan di sisi lain mereka yang tidak memiliki modal dan oleh karenanya harus menjual tenaganya dalam kerja upahan. Kapitalisme dibangun berdasarkan kondisi bahwa buruh tidak memperoleh upah yang sama dengan nilai barang yang diproduksi. Dengan demikian, pemilik modal selalu dapat mengakumulasi lebih banyak modal. Tidaklah penting, apakah pemilik modal tersebut dalam bentuk perorangan, perusahaan bermodal besar atau pemberi modal.
- Melalui persaingan dan tekanan yang berlanjut, pemilik modal harus selalu mengakumulasi modal agar dapat kembali berinvestasi dalam produksi dan selanjutnya dapat memproduksi lebih murah dibandingkan pemilik modal lainnya. Melalui “roda tupai” ini kondisi kerja para buruh selalu berada dalam keadaan tertekan dan, di samping kemiskinan, akan terjadi *over production*. Kelebihan barang, selanjutnya tidak dapat dijual, dan modalpun tidak dapat lagi diinvestasikan atau akan akibat krisis *over production*, barang-barang dimusnahkan. Hal inilah - secara garis besarnya - mengapa Marx berpikiran bahwa krisis ekonomi merupakan bagian terpenting (dan yang tidak dapat dihindarkan) dari sistem kapitalistik.
- Ketimpangan dan ketidakbebasan yang dilihat sebagai akibat sistematis dari kapitalisme pasar, menegaskan tuntutan kebebasan yang sama bagi seluruh manusia.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan sebagai penanda

Persaingan dan tekanan terhadap buruh

- Dengan demikian, demokrasi sebagai sebuah tuntutan hanya bisa direalisasi bila pemilikan alat produksi dimasyarakatkan (kolektifitas) serta keputusan tentang pemanfaatan modal diambil lewat struktur demokratis. Kepemilikan pribadi – berbeda yang umum diasumsikan, bukanlah bagian dari sesuatu yang “dimasyarakatkan”.
- Gambaran (tentang) manusia yang marxistis, biasanya dibangun berdasarkan perbedaan: secara prinsip, manusia yang bebas, setara dan solider hidup dalam sebuah sistem yang tidak setara, tidak bebas dan sepenuhnya berorientasi maksimalisasi keuntungan.

Teorinya Marx dan Engel, menjadi sebuah titik tolak bagi gerakan buruh - di samping berbagai teori dan ajaran lainnya,.

Lassalle dan lahirnya ADAV

Ferdinand Lassalle (1825–1864) terlibat dalam kelahiran ADAV (*“Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins”*/Perhimpunan Gerakan Buruh Jerman) pada tahun 1863 di Leipzig.

Dalam karyanya *“System der Erworbenen Rechte”*, ia mendorong pemahaman tentang negara demokratis

Namun, dampak dari program politik ini ternyata terbatas. Hal ini, karena Marx dan Engel dalam analisisnya tidak memasukkan atau tidak mampu memperhatikan beberapa faktor kunci. Terutama, terkait pertanyaan tentang relasi antara sosialisme dan negara.

Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak bagi Ferdinand Lassalle. Pemikirannya tentang beberapa titik tolak penting, antara lain:

Asumsi Lassalle

Lassalle bertolak dari asumsi bahwa sistem negara dan sistem hukum harus berangkat dari kebebasan manusia. Hasilnya, bagi Lassalle, basis UU harus merupakan cerminan dari kesadaran tentang hukum dari seluruh masyarakat.

Dengan pemahaman inilah, maka secara prinsip negara dibayangkan sebagai gabungan dari manusia-manusia bebas. Sebuah provokasi, mengingat pemikiran ini lahir pada masa negara Prusia dan - beberapa tahun kemudian lahir pula Kekaisaran Jerman - yang diwarnai oleh struktur hirarkis dan monarkis.

“Negara memiliki fungsi mensukseskan pengembangan kebebasan serta pengembangan umat manusia. Tujuan negara, dengan demikian, bukanlah sekedar melindungi kepemilikan pribadi dan kebebasan pribadi yang konon menurut ide borjuasi telah ada di dalam sebuah negara. Tujuan negara seharusnya lebih pada mempersatukan orang per orang ke dalam kondisi mencapai sebuah tangga keberadaan, yang tidak mungkin dicapai oleh orang per orang; mereka (harus) dimungkinkan untuk menggapai pendidikan, kekuasaan dan kebebasan yang tidak mungkin dicapai secara sendiri-sendiri.” (Lassalle 1987:222 dst.)

Tujuan negara adalah “pendidikan dan pengembangan umat manusia menuju kebebasan”. Arti dari pilar ke empat atau pilar buruh, bagi Lassalle, adalah sepenuhnya mendukung pemahaman tentang negara seperti ini. Tuntutan dasar, dengan demikian, adalah pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan langsung serta emansipasi lewat pembentukan asosiasi/serikat buruh. Pembentukan ini, demikian Lassalle, harus terjadi lewat dukungan negara.

Dengan demikian, Lassalle telah mengemukakan dua titik tolak bagi diskusi tentang sosial demokrasi dan sosialisme demokrasi. Di satu sisi, pertanyaan terkait negara demokratis dan persyaratannya. Di lain sisi, adalah pertanyaan tentang strategi terbaik apakah yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan buruh.

Wilhelm Liebknecht (1826–1900) dan **August Bebel** (1840–1913) adalah sendiri terpenting “Sozialdemokratische Arbeiterpartei” (Partai Buruh Sosial Demokrasi), di Eisenach pada tahun 1869. Selain itu, mereka adalah anggota parlemen (Norddeutschen Reichstag), 1867/1870. Liebknecht adalah juga pemimpin redaksi jurnal **Vorwärts**.

Kritik terhadap Lassalle, yang terpenting, berasal dari Wilhelm Liebknecht dan August Bebel. Fokus kritik mereka terutama berkaitan dengan terlalu sederhananya program Lassalle. Tanpa kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berhimpun serta transformasi mendasar dari negara, maka kepentingan

buruh di dalam dan lewat negara, menurut mereka, tidak akan tercapai.

Pada tahun 1875, “Allgemeine Deutsche Arbeiterverein” dan “Sozialdemokratische Arbeiterpartei” bergabung menjadi “Arbeiterpartei Deutschland” (Partai Buruh Jerman) di Gotha. Di Kekaisaran Jerman, dengan demikian, telah diletakkan fon-

*Tuntutan dasar
Lassalle*

*August Bebel dan
Wilhelm Liebknecht*

*Penyatuan
kongres partai
di Gotha pada 1875*

dasi bagi penyebaran sosial demokrasi – termasuk melawan UU Sosialis Bismarck. Namun, penggabungan ini menyisakan titik-titik konflik yang awalnya di desak ke belakang, namun kemudian meledak dan berakibat pecahnya gerakan buruh.

3.4.2. Pecahnya Gerakan Buruh

Teori pokok permasalahan dan tiga kubu

Sudah sejak tahun 1890an, telah terjadi perdebatan dalam tubuh kubu sosial-demokrat. Perdebatan tersebut menyangkut soal teoretis: akankah kapitalisme terjerumus ke dalam krisis yang mengakhiri eranya, sehingga dengan demikian, dalam perjuangan kelas proletariannya gerakan buruh dapat menanggulangi kapitalisme dan mencapai sosialisme? Dan jika demikian, apakah artinya ini bagi strategi kubu sosial demokrat?

Secara garis besarnya, kubu revisionis terbagi terutama ke dalam tiga kubu yang berbeda (bandingkan Euchner / Grebing dkk 2005: 168; Grebing 2007: 66–94).

seputar Karl Kautsky dan August Bebel

Karl Kautsky (1854-1938) adalah pendiri dan penerbit harian *Die neue Zeit* yang teoretis dan berorientasi ke Partai Sosialdemokrat Jerman. Kautzki punya andil besar, sehingga analisa masyarakat marxian tertanam dalam tubuh Partai Sosialdemokrat Jerman. Di samping Eduard Bernstein, Kautsky adalah penggagas utama Program Erfurt.

Jerman yang kian radikal dan mengarah ke peperangan demi nafsu imperialsimenya, bisa mensyaratkan perlunya perlawanan dan sebuah kebijakan parlemen jalanan lewat pemogokan massal. Sehingga, daya juang gerakan buruh dapat memaksa peralihan ke sosialisme.

Satu kelompok di seputar Karl Kautsky dan August Bebel bahkan mengharap, dengan mayoritas di parlemen dan kaum buruh yang terorganisir baik dapat mencapai masa peralihan ke sosialisme. Namun, kelompok tersebut menemukan kenyataan bahwa politik kekaisaran

Revisionis contoh, z. B. Eduard Bernstein

Eduard Bernstein (1850-1932) adalah salah satu wakil kaum „revisionis“ dalam sosial demokrat yang paling berpengaruh. Dalam bukunya *Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie* terbitan tahun 1899, ia mengulas marxisme secara kritis. Di samping Kautsky, Bernstein, adalah penggagas utama Program Erfurt

Di samping pandangan sejarah ini, berkembang kubu yang menamakan dirinya revisionis, yang sangat dipengaruhi oleh Eduard Bernsten dan yang melakukan upaya pengujian terhadap marxisme lewat data-data statistik.

Dalam kesimpulannya, kubu revisionis berpendapat, bahwa reformasi di dalam masyarakat dan segala yang kapitalistik itu mungkin dilakukan. Lagipula, tak akan terjadi kebangkrutan kapitalisme dengan sendirinya; apalagi krisis-krisis dalam kapitalisme bukanlah semakin sering, melainkan semakin jarang. Lewat penguatan serikat-serikat buruh dan koperasi-koperasi dapat dicapai reformasi dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat mengembangkan sosialisme. Tokoh serikat buruh Adolph von Elm mengungkapkan secara pas program revisionis sebagai berikut:

„Lewat evolusi menuju revolusi – lewat demokratisasi dan sosialisasi badan-badan masyarakat secara berkelanjutan menuju ke perubahan total masyarakat kapitalistik menjadi sosialistik. Kesimpulan tersebut, secara ringkasnya adalah posisi kaum revisionis dalam partai“ (dikutip dari nach Euchner / Grebing u. a. 2005: 171)

Rosa Luxemburg (1871-1919) adalah salah seorang pendiri Partai Sosial Demokrat Polandia dan Lituania. Tahun 1899 ia ke Berlin. Ia adalah teoritisi utama sayap kiri partai sosial demokrat Jerman. Di antaranya adalah teori imperialisme. Tahun 1918 ia merupakan salah seorang pendiri partai komunis Jerman KPD. Tahun 1919 ia dibunuh oleh beberapa perwira ‚Freikorps‘ (pasukan sukarelawan)

Rosa Luxemburg membantah pendapat Berstein. Menurutnya, kapitalisme tunduk pada kontinuitas persaingan para pemilik modal akibat struktur internalnya.

Cara produksi kapitalis senantiasa membutuhkan ekspansi dan pengambilalihan tanah yang semula tidak termasuk ke dalam wilayah kapitalistik:

Maka, bagi sosial demokrasi mengorganisir perjuangan praktis sehari-hari adalah demi reformasi sosial, demi perbaikan nasib rakyat yang bekerja di dalam tatanan yang masih ada sekarang, agar perangkat-perangkat demokrasi diarahkan terutama ke satu-satunya jalan untuk memimpin perjuangan kelas yang proletaris dan bekerja menuju ke tujuan akhir, yakni merebut kekuasaan politik dan meniadakan sistem pengupahan. Bagi sosial demokrasi, antara reformasi sosial dan revolusi sosial terdapat hubungan yang tak terpisahkan. Bagi kaum sosial demokrat menggunakan, perjuangan reformasi sosial adalah alat, namun perubahan sosial secara total merupakan tujuan.“ (Luxemburg 1899: 369)

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg juga tidak menolak kerja parlementaris. Namun menurutnya, hal tersebut tidaklah cukup guna mencapai sosialisme. Karenanya, Rosa Luxemburg menitikberatkan pada gerakan kaum buruh diluar parlemen.

Ketiga aliran dalam gerakan buruh tersebut dan partai sosial demokrat Jerman masih dapat bekerjasama sebagai akibat tekanan berat kekaisaran Jerman. Sebagai konsekuensi persetujuan mayoritas partai sosial demokrat Jerman SPD terhadap kredit perang dan terpecahnya USPD dengan SPD serta dengan berakhirnya perang dunia pertama yang berkaitan masalah pembentukan masyarakat yang demokratis, akhirnya gerakan buruhpun terpecah.

1919 dan pembentukan Republik Weimar

Pada tahun 1919, partai sosial demokrat Jerman SPD memegang pemerintahan pertama Republik Weimar – menghadapi perlawanan kubu konservatif, nasionalis dan reaksioner, serta juga kubu komunis. Peluang historis kubu kiri ini, untuk pertama kalinya secara politis bisa menerapkan cita-citanya, muncul di sana-sini dalam diskusi-diskusi sosialis.

Sementara kubu komunis dan sebagian kubu sosialis bekerja untuk pembentukan negara dengan dewan-dewan buruh dan prajurit, maka di pihak lain kubu sosial-demokrat terutama terlibat dalam pembentukan satu demokrasi keterwakilan dan kemudian membangunnya sampai tahun 1920 serta pada tahun-tahun berikutnya.

Bagi argumentasi sosial demokrat, Fritz Naphtali merumuskannya dengan pas:

„Dalam periode ketika kapitalisme masih bebas sepenuhnya, tampaknya tak ada tawaran alternatif lain terhadap kapitalisme yang tak terorganisir selain organisasi ekonomi secara menyeluruh yang sosialis (...). Akhirnya diketahui, bahwa struktur kapitalisme itu bisa merobah dirinya. Sebelum ambruk, kapitalisme itu juga dapat dibengkokkan.“ (Naphtali 1929; dikutip dari Euchner / Grebing u. a. 2005: 305).

Secara ringkas bias dikatakan bahwa polemik terjadi disebabkan oleh perbedaan antara revolusi dan reformasi. Di satu sisi (revolusioner), untuk meraih sebuah tatanan masyarakat yang baru, terdapat perkiraan dominan tentang pentingnya penghancuran hubungan pemilikan yang berlaku serta perubahan total konstitusi negara; di lain sisi para reformistis beranggapan, bahwa tatanan masyarakat

kat yang sesuai jamannya dengan konstitusi negara hendaknya dikembangkan menuju ke sosialisme yang demokratis. Perbedaan-perbedaan gagasan ini tercerminkan juga dalam beragam model-model negara:



Gambar : Sistem dewan dan „kapitalisme terorganisir“reformasi

„Sosialisme yang demokratis“, yang dilontarkan oleh Partai Sosial Demokrat Jerman sebagai gagasan, berangkat dari demokrasi parlementer dan pemisahan antara wilayah politik dan ekonomi. Di dalam kedua wilayah itu – baik politis maupun ekonomis—hendaknya dicapai demokratisasi sesuai dengan kehendak kaum pekerja dan serikat-serikat buruh. Dalam kaitan ini, „sosialisme yang demokratis“ berarti, satu pelengkap yang kompleks dan hubungan timbal balik dari ekonomi sosialistik dengan kaum buruh sebagai aktor-aktor utamanya (serikat-serikat buruh, partisipasi satuan usaha dan perusahaan) serta demokrasi parlementer.

Sosialisme demokratis sebagai ide

Tahun 1959, Program Godesberg dari Partai Sosial Demokrat Jerman SPD telah menemukan dalil utamanya untuk „pasar bebas“. Katanya, „persaingan sebebaskan mungkin dan perencanaan sejauh yang dibutuhkan“ (Dowe / Klotzbach 2004: 332). Di sini diformulasikan satu posisi yang mengatakan hendak berpegang teguh pada „sosialisme yang demokratis“ sebagai sebuah tatanan ekonomi dan sosial yang baru, namun bersamaan dengan itu menerima kapitalisme pasar yang tunduk pada bentuk pengendalian dibawah primat politik. Dengan demikian, kubu sosial demokrasi memisahkan dirinya dari ekonomi terencana seperti yang ditertapkan di Uni Soviet.

3.4.3. Sosialisme yang Demokratis vs. Sosialisme Negara

Setelah perang dunia kedua, semakin jelas muncul perbedaan antara SPD yang berorientasikan pada sosialisme yang demokratis dengan sosialisme negara. Lewat program Godesberg tahun 1959, secara resmi SPD memisahkan diri dari marxisme sebagai *weltanschauung* (pandangan dunia), meski juga tidak dari segenap analisisnya. Dengan pemisahan itu, sekaligus SPD juga melepaskan diri dari gagasan satu perkembangan alami menuju sosialisme. Sebaliknya, sosialisme dikatakan sebagai „tugas yang terus menerus“, yang dapat beralaskan religius dan filosofis. Paling utama dalam penentuan sosialisme demokratis adalah ketiga nilai-nilai dasarnya, yaitu „kebebasan, keadilan dan solidaritas“. Dari nilai-nilai dasar inilah, kubu sosial demokrasi menguraikan tuntutan-tuntutan utamanya, yakni pengakuannya terhadap kebebasan dan demokrasi.

„Tidak ada sosialisme tanpa kebebasan. Sosialisme hanya bisa direalisasikan lewat demokrasi, dan demokrasi hanya bisa terampungkan oleh sosialisme“ (pernyataan prinsip-prinsip dari kaum internasional yang sosialis, Frankfurt am Main 1951, zit. nach Dowe / Klotzbach 2004: 269)

Dari pemahamannya akan kebebasan, maka sosialisme yang demokratis kian jelas membedakan dirinya dari rejim-rejim totaliter, dan terutama dari apa yang dinamakan dengan demokrasi-demokrasi rakyat dari blok timur.

3.4.4. SPD Sekarang – Tantangan Baru, Solusi Baru

Kilasan sejarah gerakan buruh menggambarkan perdebatan strategis tentang peranan negara dan masyarakat. Sampai sekarang, „sosialisme demokratis“ merupakan visi penentu bagi Partai Sosial Demokrat Jerman SPD. SPD menjadikan visi ini sebagai tugasnya. „sosialisme demokratis“ itu sama dengan satu (tatanan) masyarakat, di mana kebebasan, persamaan dan solidaritas benar-benar mendominasi. Prinsip aksi SPD, demikian Program Hamburg, hendaknya „sosial demokrasi“. Maka di sini dijelaskan, bahwa pencapaian sosialisme demokratis diraih lewat keputusan demokratis dan begitu pula dengan realisasi nilai-nilai dasar politis, ekonomis dan kultural.

„Sejarah kita ditempa oleh sosialisme demokratis, satu (tatanan) masyarakat dari insan-insan yang bebas dan setara, di mana nilai-nilai dasar kita terealisasi, Sosialisme demokratis menuntut satu tatanan ekonomi, negara dan masyarakat, di mana nilai-nilai dasar secara warganegara, politik, sosial dan ekonomi bagi segenap manusia dijamin. Bagi kami, sosialisme demokratis tetaplah menjadi visi satu (tatanan) masyarakat yang adil dan solidaritas, dan perealisasiannya menjadi tugas kami secara terus-menerus. Prinsip tindakan kami adalah sosial demokrasi (Program Hamburg 2007: hal. 16)

Saat ini, sosial demokrasi menghadapi tantangan globalisasi pasar terhadap pengaruh pasar uang dan penjurungannya terhadap pasar kerja untuk bereaksi dan menentukan, bagaimana menciptakan perimbangan antara kapitalisme pasar dengan demokrasi. Atau dengan kata lain, bagaimana mencapai sosialisme demokrasi di bawah persyarikat-persyaratan tersebut. Bahwa bukan hanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul, namun juga jawaban-jawaban pertamanya, tersiratkan secara jelas dalam program Hamburg-nya SPD (bandingkan juga dengan bab 6).

Tambahan dari ekonomi terkoordinasi dan demokrasi representatif oleh politik sebagai panglima itu juga dikembangkan oleh program Hamburg, namun sebagai tuntutan buat masa depan dan berdasarkan norma-norma Eropa dan dunia

Sosialisme demokratis sebagai visi – sosial demokrasi sebagai prinsip bertindak

Tantangan saat ini

„Pasar perlu rekayasa politik – dalam masa globalisasi juga melampaui batasan nasional. Bagi kami berlaku: seluas mungkin persaingan dan sebanyak regulasi negara sesuai keperluan“ (Hamburger Programm 2007: 43)

Jika dicermati model-model gagasan dari sosial demokrasi, liberal dan konservatif, maka model-model tersebut merupakan model alternatif, sehingga tidaklah benar jika dikatakan bahwa program partai-partai beraliran tersebut di atas sudah saling mendekati dan menyamai.

3.4.5. Kajian: Partai „Kiri“ dan Kontradiksinya

„Die Linke“

Dengan perubahan iklim politik Jerman tahun 1990, mula-mula di bekas Jerman Timur berdiri satu partai kiri penerus Partai Komunis Jerman Timur SED. Yakni Partai PDS (Partai Sosialisme Demokrasi). Sementara ini, PDS telah bergabung dengan WASG (*Wahlalternative Arbeit soziale Gerechtigkeit* pilihan alternatif pro kerja dan keadilan sosial) menjadi partai “Die Linken” (Kiri) dan juga memampukan dirinya di beberapa negara bagian di wilayah mantan Jerman Barat.

Pengelompokan Partai Kiri ini sangat sulit dilakukan – masih banyak hal-hal yang masih belum pasti. Karenanya, pada tahun 2007, partai kiri ini tidak memutuskan program partai secara klasik, namun hanya butir-butir program belaka.

Pilar program

Dalam butir-butir program tersebut, partai kiri mengakui pro sosialisme demokratis:

Orientasi nilai-nilai kami adalah demokrasi, kebebasan, persamaan, keadilan, internasionalisme dan solidaritas. Kesemuanya itu tidak terlepas dari perdamiaan, penjagaan dan perawatan alam serta emansipasi. Ide sosialisme demokratis menjadi visi utama buat perkembangan tujuan-tujuan politik kubu kiri. Tindakan-tindakan politik kubu kiri berangkat dari hubungan antara tujuan, cara dan orientasi nilai-nilai. Kebebasan dan keadilan sosial, demokrasi dan sosialisme itu saling membutuhkan. Keadilan tanpa kebebasan individu berujung pada ketidakmandirian dan heteronomi. Kebebasan tanpa persamaan itu hanyalah kebebasan bagi kelompok kaya. Manusia yang menindas dan memeras sesamanya itu juga tidak bebas. Tujuan dari sosialisme demokratis, yang hendak

menundukkan kapitalisme melalui proses transformatoris, adalah satu (tatanan) masyarakat dengan kebebasan itu tidak membatasi yang lain, melainkan sebagai persyaratan buat kebebasannya sendiri (Butir-Butir Partai Kiri 2007:2)

Selain butir-butir di atas, dapatlah dibebankan beberapa butir-butir lain yang mencoba menjelaskan Die Linke dan programnya:

- Partai Kiri „Die Linke“ adalah gabungan gerakan politik terdiri dari mantan kader-kader partai komunis Jerman Timur SED, mantan sosial demokrat yang kecewa, bagian dari gerakan-gerakan sosial baru, anggota-anggota serikat buruh, para pemilih yang protes, para politisi komunal/daerah yang orientasinya pragmatis dan kaum komunis dsb. Kesemua grup-grup ini memberikan beragam gagasan (tatanan) kemasyarakatan ke dalam partai *Die Linke*. Maka, satu model gagasan atau konsep seragam masih belum tampak.
- Seringkali, menurut pandangan publik, Partai Die Linke dinilai sebagai Partai Protes. Namun, istilah ini kurang pas, sebab dua aspek yang diperpendek itu digabungkan. Yang pertama adalah persoalan para pemilih partai *Die Linke*. Seperti sebelum-sebelumnya, terdapat perbedaan para pemilih partai *Die Linke* di bekas Jerman Timur dan bekas Jerman Barat. Aspek kedua menyangkut persoalan strategi politik atau tekad pengejawantahan politis – dan dapat juga dilihat dari hasilnya yang sangat berbeda di negara-negara bagian atau secara federal.
- Tulisan-tulisan yang sedikit di dalam dunia ilmu pengetahuan, yang membahas soal *Die Linken*, menjelaskan *Die Linken* bukan hanya heterogen, namun juga sangat kontradiksi. Di satu pihak *Die Linke* dijelaskan sebagai partai yang pragmatis, moderat dan modern, namun di lain pihak berlandaskan pada ideologi yang ortodoks dengan jurus-jurus mendekati radikal (Bandingkan. Decker u. a. 2007: 327). Nampaknya, kesan ini dibenarkan, oleh sebab terdapat perbedaan antara pernyataan-pernyataan tekad yang mendasar dengan politik pemerintahan pragmatis yang dijalankan di parlemen-parlemen daerah, tapi yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan tekad yang mendasar itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan gejala „Die Linken“ ini, pastilah harus dinantikan, apakah dan dengan isi yang bagaimana *Die Linken* itu dapat memaparkan keberadaan dirinya secara langgeng.

3.4.5. Gambaran Manusia Sosial Demokratis?

Satu gambaran tentang manusia sosial demokratis itu sangatlah sukar ditemukan. Lebih tepatnya, gambaran manusia yang sosial demokratis itu ditempa oleh banyak sumber dan pluralisme penjelasan.

Maka terdapatlah persilangan antara tradisi gerakan buruh, teori liberal, ajaran agama serta pengaruh-pengaruh humanisme dan marxisme. Yang menjadi landasannya adalah kebebasan setiap manusia seperti liberalisme, namun juga menganalisa, seperti konsep-konsep marxian, rintangan-rintangan (tatanan) masyarakat guna perealisasi nilai-nilai dasar.

Dalam bukunya *Die Zukunft der Sozialen Demokratie* (Masa Depan Sosialdemokrasi), Meyer dan Breyer mencoba lewat bentuk matriks guna membedakan gambaran manusia berdasarkan paham libertarian („neoliberalen“) dengan gambaran manusia berdasarkan paham sosial demokrasi. Sebagai orientasi, di sini kami menambahkan satu tabel tentang „gambaran manusia sosialis“:

	„Demokrasi Libertarian“	„Demokrasi Sosial“	„Demokrasi Sosialis“
Anthropologis	Anthropologi yang skeptis	Anthropologi yang realistis	Anthropologi normatif, utopis
Pengertian kebebasan	pengertian kebebasan negatif	Pengertian kebebasan positif	Pengertian kebebasan positif
Motif-Sikap	Kepentingan pribadi	Kepentingan pribadi dan masyarakat	Kepentingan bersama sebagai kepentingan pribadi
Gambaran manusia	Egoisme yang rasional dan terkalkulasi	Pribadi yang berorientasikan pada komunikasi	Peribadi yang berorientasikan pada perjuangan dan pembentukan manusia-manusia baru pada masa depan

Sumber: Meyer / Breyer 2005: 33 – tabel terakhir ditambah oleh T. Gombert

Pertemuan berbagai aliran/sumber dalam „pandangan hidup sosial demokrasi“

Meskipun gambaran lewat matriks di atas itu sangat menggampangkan, namun hal tersebut memperlihatkan kecenderungan:

- Teori *Libertarian*, umumnya bertolak dari anggapan, bahwa „kepentingan pribadi“ merupakan motornya manusia. Kepentingan pribadi ini dapat dihidupkan, jika ia dilindungi terhadap yang lain (juga negara), agar membiarkan setiap insan menggunakan kebebasan buat maksimalisasi manfaat.
- Teori-teori sosialis memiliki tradisi yang panjang, di mana diikhtiarkan buat meraih satu (tatanan) masyarakat yang manusiawi lewat pembetulan „manusia-manusia baru“ (bandingkan Adler 1926 dan Heinrichs 2002: 308–314). Secara historis, Manusia katanya menjadi sedemikian jauh busuknya sebagai akibat tatanan masyarakat kapitalis dan ketimpangan sosial, sehingga tertumbunlah kemampuannya untuk mengenali kepentingan bersama sebagai kesejahteraan pribadinya dan untuk mewakili kepentingan bersama itu secara solidaris. Maka tugas pembimbingan/pengasuhan dan pendidikan kelak adalah, menundukkan perbedaan antara keadaan hidup sosial dengan tuntutan dari manusia (secara bersama) yang bebas dan solidaris.
- Anthropologi sosial demokrasi –paling tidak menurut Meyer/Breyer—mencoba untuk melakukan penyeimbangan, di mana kepentingan pribadi sesuai dengan kepentingan mereka-mereka berkesejahteraan bersama. Maka, gambaran manusia anthropologi sosialdemokrasi adalah peyeimbangan „kepentingan yang sah/sesuai hak.

Bacaan lanjut :

Walter Euchner,
Helga Grebing u. a.
(2005), *Geschichte
der sozialen Ideen
in Deutschland.
Sozialismus –
Katholische Sozial-
lehre – Protestan-
tische Sozialethik.
Ein Handbuch*, 2.
Aufl., Wiesba-
den, S. 13–595.

Thomas Meyer
und Nicole Breyer
(2005), *Die Zukunft
der Sozialen Demo-
kratie*, Bonn.

Dieter Dowe und
Kurt Klotzbach (Hg.)
(2004), *Programma-
tische Dokumente
der Deutschen
Sozialdemokra-
tie*, 4., überarbei-
tete und aktuali-
sierte
Aufl., Bonn.

4. TEORI-TEORI SOSIAL DEMOKRASI THOMAS MEYER

Dalam bab ini akan

- diperkenalkan teori sosial demokrasi dari Thomas Meyer;
- diterangkan relasi antara kapitalisme pasar dan demokrasi, bahwa di satu sisi terdapat tensi, namun pada sisi lainnya keduanya saling melengkapi;
- dideskripsi perbedaan utama antara liberal, libertarian dan sosial demokrasi;
- diterangkan relasi antara nilai-nilai dasar, hak-hak dasar dan perangkatnya;
- didiskusikan dan diolah perbedaan antara hak kebebasan negatif dan positif; dan
- didiskusikan tentang kewajiban bertindak negara.

Berbagai diskusi tentang nilai-nilai dasar dan tinjauan terhadap perbedaan model-model masyarakat dalam bab-bab sebelumnya memperlihatkan, bahwa sosial demokrasi mempunyai satu tradisi pemikiran. Pengertiannya membedakan diri dari model-model gagasan lain. Bahkan sangat berbeda. Sehingga tak cukup menjelaskan pengertian tersebut dengan hanya menyebut nilai-nilai dasar seperti kebebasan, persamaan dan solidaritas guna merealisasikan satu masyarakat yang adil. Juga tak cukup menjelaskan dengan menyebut liberalisme, konservatisme dan sosialisme.

Pada awal pengantar tulisan ini disebutkan ihwal teori sosial demokrasi. „Sosial Demokrasi“, mesti didefinisikan secara jelas, jika ingin didiskusikan dan dijadikan argumen.

Empat perspektif tentang sosial demokrasi sudah diutarakan. Tiga darinya akan diulang kembali di bawah ini:

“Sosial demokrasi – bukankah adalah istilah yang menjawab diri sendiri?” tanya seseorang;

Lalu, „Sosial Demokrasi – bukankah kita di Jerman telah merealisasikannya dengan ekonomi pasar sosial sebagai „model Jerman?“, tanya yang lain

Terakhir, sosial demokrasi – bukankah itu milik SPD, dan oleh karenanya cuma urusannya kaum sosial demokrat saja, itu kan teorinya mereka?“, pendapat pihak ketiga.

*Apa itu sosial
demokrasi?
Tiga jawaban*

Dari sudut pandang politik praktis terhadap sebuah teori, maka pertanyaan-pertanyaan awal tersebut di atas, tentulah benar. Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah dijawab, bila teori tentang sosial demokrasi akan dimanfaatkan secara politis.

Pertanyaan pertama, bahwa „sosial demokrasi sebagai istilah yang menjelaskan dirinya sendiri“, telah terjawab sebelumnya. Yakni, mengembangkan gambaran tentang pengertian „sosial demokrasi“ secara tepat itu perlu. Alasannya:, terdapat kaitan-kaitan yang sangat berbeda, yang hanya bisa dijelaskan secara bersama. Hanya saja, ke dalam pengertian tersebut di atas telah termaktubkan pokok normatif yang utama: aturan-aturan dan norma-norma bersama apa saja yang dapat kita jadikan landasan, jika permasalahannya adalah merealisasikan sosial demokrasi.

Sekilas mencermati nilai-nilai dasar telah menunjukkan, bahwa banyak argumen filosofis bisa memperjelas, namun tidak cukup buat dijadikan landasan normatif, justru karena plural dan kontroversialnya definisi-definisi tersebut. Alhasil, untuk teori sosial demokrasi haruslah ditemukan landasan normatif yang spesifik sebagai titik tolak.

Pertanyaan kedua, bahwa „sosial demokrasi di Jerman telah direalisasikan lewat ekonomi pasar yang sosial dalam „model Jerman“, selanjutnya dibahas, terutama lewat studi-studi banding antar negara (bandingkan hal. 107 dst). Pada wilayah yang bertensi tinggi telah diperlihatkan, bahwa sosial demokrasi bukanlah menyangkut masalah „Pencapaian sosial demokrasi secara seketika atau bersamaan“ (seperti pertandingan lari cepat 100 meter). Apalagi terdapat keanekaragaman yang luas untuk model-model masyarakat yang berbeda. Di situ pulalah kelompok-kelompok yang berkepentingan berkeinginan menavigasi menuju model-model masyarakat tersebut. Petunjuk tentang „model Jerman“ atau „ekonomi pasar sosial“ tidak cukup menjelaskan, sebab petunjuk itu mengabaikan para pelaku politik kemasyarakatan yang berbeda. atau „ekonomi pasar sosial“ akan tidak cukup menjelaskan, oleh sebab petunjuk itu mengabaikan para pelaku politik kemasyarakatan yang berbeda.

Terhadap pernyataan ketiga, bahwa „sosial demokrasi termasuk ke dalam Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) dan oleh karenanya sosial demokrasi cuma

urusannya dan teorinya kaum sosial demokrat belaka”, patutlah diragukan. Menunjuk „sosial demokrasi” sebagai partai dan aliran politik bolehlah dinilai sebagai jawaban yang mendekati, tapi bukanlah jawaban yang lengkap:

„Menurut kebiasaan saat ini, sosial demokrasi itu bermakna ganda, yaitu sebagai definisi dasar teori demokrasi dan sebutan bagi program sebuah aliran politik. Kendati antara kedua definisi yang lazim dipakai ini terdapat hubungan timbal balik yang beraneka ragam, namun kedua definisi itu adalah merupakan dua fakta yang jelas untuk dibedakan, . Sebab keduanya memiliki perbedaan tuntutan. Baik landasan normatif maupun peranan yang termaktub di dalamnya. Selain itu, perbedaan dalam cara untuk merealisasikannya, teori sosial demokrasi tidak bertumpu pada para pelaku politis tertentu. Kendati demikian, tentu saja setiap langkah realisasinya tergantung pada aktor-aktor politis yang memperjuangkan program tindakan praktis yang dijabarkan dari teori tersebut. Para pelaku politis yang beranekaragam dapat memanfaatkan definisi sosial demokrasi sebagai nama program, jika nama ini dipandang menguntungkan, terlepas dari apakah dan seberapa jauh upaya-upaya politis itu terwadahi atau terkait dengan teori sosial demokrasi, “ (Meyer 2005:12).

*Sosial demokrasi
sebagai model
gagasan*

Pada prinsipnya, sosial demokrasi sebagai model gagasan dan sosial demokrasi sebagai partai politik (atau aliran) selalu memiliki titik-titik temu. Tapi keduanya tidak sama. Sebagai model gagasan, sosial demokrasi harus memiliki tuntutan, bahwa gagasannya berbasis ilmiah terkait norma dan nilai, bahwa dalam penjabaran dan realisasi hak-hak dasarnya dapat dilakukan penelitian di beranekaragam negara dan kemudian dibeberkan secara konsisten. Soal partai-partai politik yang menganut gagasan tersebut, tidak akan dibicarakan di sini.

Dengan demikian, bahasan berikut ini bukan tentang sosial demokrasi, melainkan terkait sebuah model gagasan yang wacananya terbentuk sejak 1980an dan 1990an.

Sebagai titik awal pembahasan, digunakan teori sosial demokrasi karya Thomas Meyer. Di sana terkait teramat banyak untaian yang beraneka ragam, yang telah mewarnai bingkai wacana tentang sosial demokrasi dan, masih terus mewarnainya hingga kini.

4.1. Titik Awal

Pertanyaan utama dalam teori sosial demokrasi Thomas Meyer (seperti yang sudah diungkapkan di atas) adalah, sejauh mana hubungan antara demokrasi dan kapitalisme pasar

Keduanya – demokrasi dan kapitalisme pasar – dipahami sebagai dua pilar utama sistem masyarakat kita dalam “ketegangan” hubungan satu dengan lainnya.

*Pertanyaan awal:
bagaimana sikap
dan keterkaitan
antara demokrasi
dan kapitalisme
pasar?*



Gambar. 7: Keterkaitan antara Kapitalisme Pasar dan Demokrasi

Jadi, Meyer beranggapan, bahwa di satu pihak kapitalisme dan demokrasi saling melengkapi. Jadi, kapitalisme pasar merupakan persyaratan pembentukan dan stabilitas demokrasi. Di lain pihak, Meyer menemukan ketegangan yang unik, sebab pasar yang tanpa kendali bertentangan dengan persyaratan yang diperlukan bagi partisipasi publik.

*Syarat kelahiran
dan faktor
kerawanan? Apa
sikap kapitalisme
pasar terhadap
demokrasi?*

Meyer menggambarkan hubungan sistem ekonomi dan demokrasi lewat dua tesis (asumsi) berikut. Di satu pihak, ia menganalisa persyaratan kelahiran demokrasi secara historis. Dilain pihak, ia meneliti keterkaitan empiris antara demokrasi dan ekonomi pasar untuk masyarakat mutakhir.

Semula, kehadiran kedua tesis itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima luas, : karena dianggap kontroversial, baik secara teoritis maupun politis, seperti yang dapat dibaca di atas.

Pertanyaannya, apa yang merangsang Meyer tetap mewakili kedua tesis tersebut sekalipun banyak ditentang?

Bagaimana Meyer mempertahankan tesisnya?

4.1.1. Alasan Historis

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, terutama karena tesis itu berkaitan dengan alasan historis. Bagi Meyer, demokrasi dalam sejarahnya, umumnya terbentuk setelah atau berhubungan langsung dengan kebangkitan pasar-pasar bebas – di Eropa. Demokrasi berhasil ditegakkan di negeri-negeri yang berbeda dalam kurun waktu yang tidak sama sebagai satu „model masyarakat borjuis“:

Historis argumen

Masyarakat borjuis dimaksud sebagai model tatanan ekonomi, sosial dan politik demi penaklukan absolutisme, peniadaan privilese berdasarkan kelahiran dan pemaksaan seseorang menjadi penurut model klerikal (keagamaan). Caranya, lewat realisasi prinsip kebebasan individu berdasarkan hukum dan keteraturan bagi segenap manusia; menjamin kehidupan manusia secara bersama berdasarkan ukuran akal budi; terorganisirnya ekonomi berdasarkan persaingan pasar, hukum dan keteraturan; terjaminnya peluang hidup sesuai dengan akal budi, pembatasan kekuasaan negara berdasarkan negara hukum dan konstitusi yang liberal di satu pihak serta pengikatan kekuasaan negara pada kehendak warga yang dewasa lewat kepublikan, pemilihan umum dan organ keterwakilan dilain pihak (Kocka 1995: 23).

Pasar bebas, borjuis ekonomi dan gagasan tentang hak kebebasan serta jaminan negara tersebut berkembang dalam saling ketergantungan secara historis, kesemuanya itu tidak terpisahkan.

4.1.2. Alasan Berdasarkan Studi Banding Penelitian Demokrasi

Tesis Meyer itu juga didukung oleh banyak penelitian empiris, yang dilakukan dalam kerangka studi stabilitas demokrasi.

Begitu pula dukungan dari hasil-hasil empiris produk penelitian transformasi yang dilakukan terutama di negara-negara bekas Uni Soviet. Di sana diperlihatkan, bahwa ekonomi pasar bebas ternyata berperan positif menstabilkan demokrasi yang sedang berkembang. Juga hasil-hasil empiris dengan kasus kebalikannya memperlihatkan, bahwa ketika kekuatan ekonomi masuk ke dalam wilayah politik, di mana partisipasi demokratis dirongrong oleh berbagai bentuk monopoli dan kolusi, maka terbukalah jalan mengarah ke demokrasi yang cacat, paling banter sekedar menjadi demokrasi formal.

Paparan di atas menunjuk pada ambisi teori sosial demokrasi untuk tidak sekedar melihat negara konstitusional secara formal, tetapi perlu mengujinya secara empiris, apakah struktur-struktur demokrasi dan hak-hak dasar manusia benar-benar dapat diterima oleh setiap warganegaraanya.

Dalam ringkasannya, begitu argumentasi Meyer, dapatlah disimpulkan, bahwa sebuah ekonomi pasar bebas dapat „mendukung“ proses demokrasi (bandingkan Dahl 2000; Meyer 2005: 581).

Namun pernyataan itu bukan berarti, bahwa Meyer melihat hubungan demokrasi dengan kapitalisme secara gampang dan tidak kritis – ini juga sulit diterima melihat berbagai kontradiksi yang dipaparkan sebelumnya. Artinya, diskusi saat ini nampaknya harus dibedakan dengan sejarah pembentukannya.

Alasan berdasarkan penelitian stabilitas demokrasi

Tensi antara demokrasi dan kapitalisme

Apa saja yang membuat kapitalisme pasar, misalnya, bertentangan dengan demokrasi:

- kapitalisme pasar menyebabkan ketimpangan (ekonomi) antar manusia
- perbedaan alokasi sumberdaya materil mengakibatkan perbedaan kesempatan guna berpartisipasi dalam masyarakat dan demokrasi
- kapitalisme pasar berfungsi semakin mengglobal, sementara partisipasi demokratis hanya berkuat di tataran nasional. Karenanya, kapitalisme pasar mengancam struktur-struktur demokrasi di setiap negara.

Keseimbangan antara kapitalisme pasar dan demokrasi sebagai negosiasi antar para pelakunya

Kapitalisme pasar memiliki gaya sentrifugal, yang memecut perbedaan dan ketidakpastian. Karenanya dapat mengancam landasan legitimasi dan stabilitas yang demokratis.

Kebebasan pasar dan kebebasan buat segenap manusia dalam satu masyarakat, biasanya saling bertentangan.

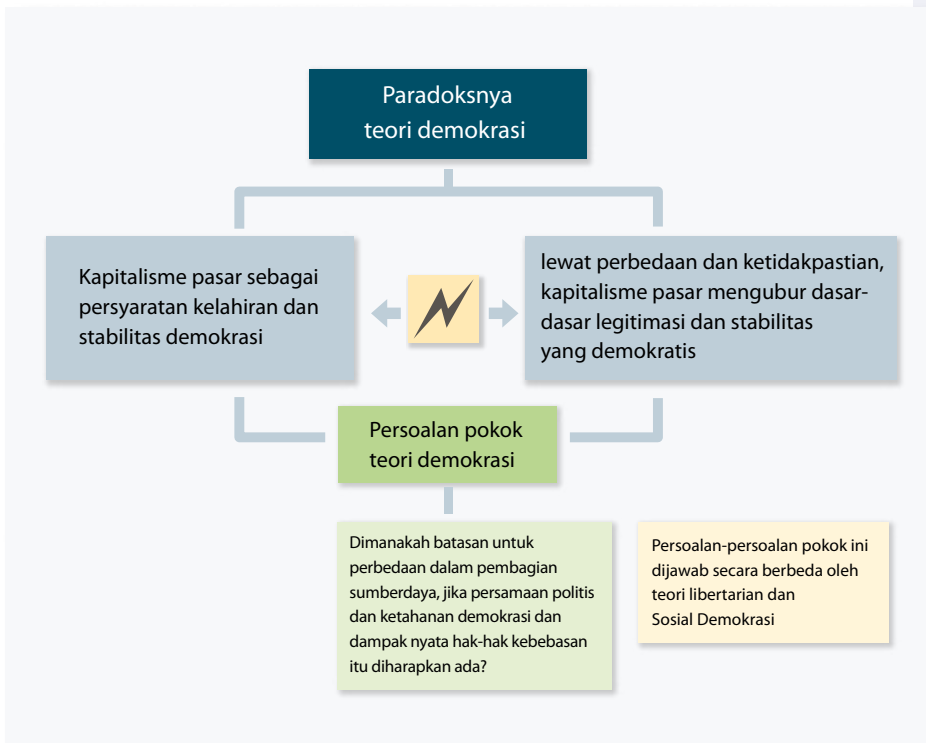
Karenanya, demikian Meyer, kapitalisme pasar dan demokrasi berada dalam ketegangan unik satu dengan lainnya.

Tensi unik antar keduanya ini tak dapat begitu saja dihapuskan atau ditiadakan., ia hanya bisa diatur dan dijinakkan – ini merupakan saripati, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian historis dan empiris, yang digunakan Meyer dalam argumentasinya.

Merunjuk kepada perbedaan model gagasan liberalisme dan sosial demokrasi, dapat disimpulkan, bahwa mencampakkan tuntutan kebebasan, yang secara historis terkait dengan produk tradisi pemikiran liberalisme adalah sesuatu yang fatal, termasuk terperangkap dalam penyempitan neoliberal. Jadi, mencermati hubungan liberalisme dan sosial demokrasi secara peka adalah satu persyaratan utama.

Sehubungan dengan itu, dalam teorinya, Meyer membedakan dua „tipe ideal“ yang dikembangkan dari teori liberal, di satu sisi libertarianisme, di sisi lain sosial demokrasi .

Tugas bagi teori Sosial Demokrasi: Tuntutan kebebasan dari liberalisme agar tidak dicampakkan.



Gambar 8: Paradoks teori demokrasi

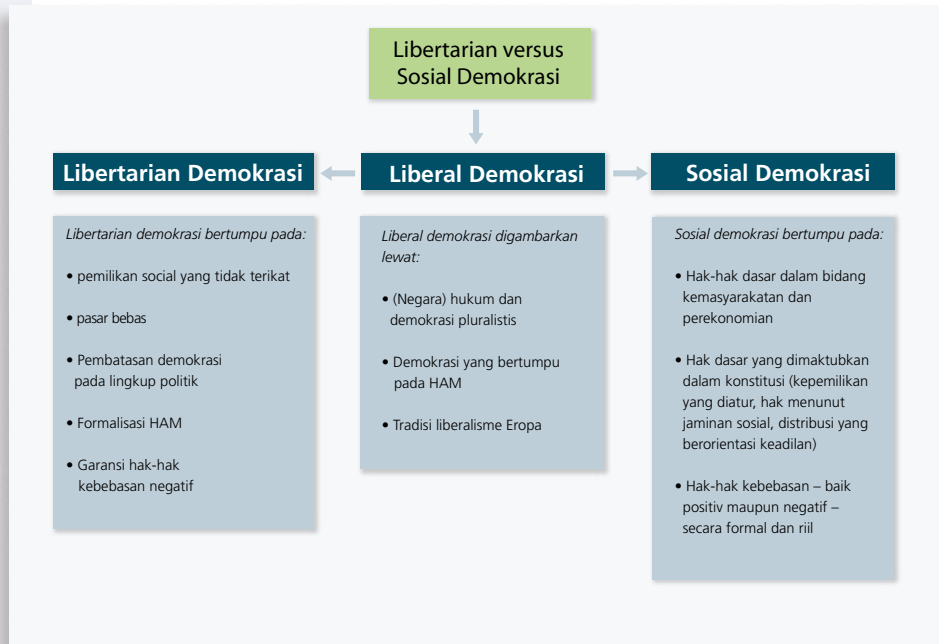
4.2. Libertarisme versus Sosial Demokrasi

Teori sosial demokrasi berbeda dengan teori libertarian demokrasi dalam hal normatif, teoretis dan empiris. Keduanya memiliki akar yang sama, yaitu dari liberal demokrasi yang berkembang sejak era pencerahan abad 17 dan 18.

Istilah „libertarian“ dan „demokrasi liberal“, dalam beberapa hal memiliki argumentasi ilmiah yang berbeda. Karena itu, sebuah definisi yang jelas dan sama, sangat diperlukan dalam memulai diskusi.

Perlu dipertegas bahwa ungkapan libertarisme dan sosial demokrasi adalah bentuk-bentuk ideal yang dalam bentuk murninya tidak bakal ditemukan di mana pun. Libertarisme dan sosial demokrasi lebih didefenisikan sebagai kutub-

kutub di sisi berbeda, di mana masyarakat bisa memposisikan diri dalam skala antara dua kutub tersebut.



Gambar 9: Liberal, Libertarian dan Sosial Demokrasi dalam Perbandingan

Liberal demokrasi

Akar yang sama dari liberal demokrasi

- Terkait dengan tradisi liberalisme Eropa (bandingkan dengan halaman 11 dst.)
- Bertahan dalam demokrasi (negara) hukum dan pluralistis,
- Serta bertumpu pada HAM.

Libertarian demokrasi¹⁹ merupakan sebetuk model pemikiran ideal berdasarkan pada:

- Pemilikan sosial yang tak terikat
- Sebuah pasar yang mengatur diri sendiri (bebas)

19) Terlihat bahwa „Libertarisme“ maupun libertarian nyaris sama dengan posisi neoliberal yang didiskusikan di halaman sebelumnya. Bagi Meyer, penggunaan istilah-istilah baru terutama bahwa pemahaman mendasar terkait 'historian Liberalism' nampaknya tidak identik dengan simplifikasi neoliberal, bahwa liberalisme juga bisa dikaitkan untuk Teori Sosial Demokrasi.

Libertarian demokrasi

- Pembatasan demokrasi di bidang politik dan karenanya jaminan hak-hak kebebasan negatif (pengertiannya lihat halaman 102 dst.)
- Pemberlakuan formal hak asasi manusia

Sebaliknya, demokrasi sosial bercirikan:

- Nilai-nilai dasar dalam bidang kemasyarakatan dan ekonomi
- Satu penyesuaian konstitusi yang memuat nilai-nilai dasar yang adil (baik formal maupun dalam dampak nyatanya)
- Hak-hak kebebasan negatif dan positif yang diberlakukan secara formal dan dampak nyatanya (baca halaman selanjutnya)

Jadi, Meyer membuat pembedaan teoretis antara kedua tipe ideal demokrasi libertarian dan sosial demokrasi, yang bisa ditemukan – meski tidak sepenuhnya - pada posisi konkrit tiap aliran dan partai politik.

Tensi antara demokrasi dengan kapitalisme pasar, tidak tunduk pada tatanan yang tersusun secara pasti, namun diselesaikan lewat tawar-menawar di antara para pelaku dalam masyarakat. Di berbagai negara yang berbeda, perimbangan-perimbangan kekuatan di antara para pelaku itu dapat bergeser dan menciptakan perimbangan-perimbangan baru antara kapitalisme pasar dan demokrasi.

Sebagai contoh tentang saratnya tensi serta tidak mulusnya hubungan antara kapitalisme pasar dan demokrasi serta produknya kemudian dapat dilihat dari UUD Jerman dibandingkan dengan pakta-pakta PBB tentang hak-hak dasar di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya (lihat halaman 99 dst.)

Karena berangkat dari pengalaman sejarah kelam dari masa rejim Nazi, maka hak-hak kebebasan yang terutama bersifat “menangkis” itu terformulasikan jelas dalam UUD Jerman 1949. Namun konstelasi kekuatan yang hadir dalam masa pembentukan Republik Federasi Jerman, yaitu di satu pihak kekuatan borjuis dan di lain pihak kekuatan kiri, menyebabkan keberadaan hak-hak kebebasan dalam UUD Jerman itu akhirnya berkedudukan kurang dominan. Karenanya juga, dalam diskusi ilmu hukum terdapat perbedaan sudut pandang interpretasi terhadap UUD Jerman tersebut. Pihak yang satu memfokuskan perhatiannya pada ketetapan tentang hak-hak dasar dalam ayat-ayat pertama, sementara pihak lain yang lebih kritis, berangkat dari persoalan kepemilikan (pribadi) sebagai titik tolak

Sosial demokrasi

*Pertanyaan terkait
para pelaku*

*Contoh:
Tawar-menawar
konstitusi*

yang menentukan (bandingkan dengan Haverkate 1992; lihat juga tabel hak-hak dasar manusia dalam UUD Jerman dan pakta-pakta PBB pada halaman 99 dst).

Pakta PBB dalam perbandingan

Sebaliknya, sebagai akibat dari perspektif internasional dan juga perkembangan masyarakat, maka dalam pakta-pakta PBB tahun 1960an dikembangkan satu formulasi yang lebih luas mengenai hak-hak kebebasan negatif dan positif.

Teori-teori ilmiah seperti yang telah diungkapkan pada halaman-halaman sebelumnya memberikan jawaban yang berbeda ketika teori-teori tersebut menjelaskan hubungan antara Pasar dan Demokrasi

Perbedaan-perbedaan aliran teoretis itu terutama ditemukan pada apa yang disebut sebagai libertarianisme dan teori sosial demokrasi, apabila menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya hubungan antara demokrasi dan pasar dan alasan-alasan yang mendasari jawaban-jawaban tersebut.

Padahal, kedua aliran teoretis itu berakar sama: liberalisme, yang secara historis, berkembang sejak abad ke 17.

Sebenarnya, itulah titik pangkalnya, bagaimana kebebasan setiap insan dalam satu masyarakat dapat terealisasi. Terhadap hal ini, teori-teori ilmiah memberikan solusi yang berbeda.

Agar bisa menilai solusi-solusi yang berbeda itu, maka perlulah mendefinisikan „hak-hak kebebasan“ secara lebih lanjut.

Namun, sebelum membahas definisi hak-hak kebebasan dalam libertarianisme dan demokrasi sosial, haruslah diketengahkan satu penjelasan pemahaman tentang hak-hak kebebasan: Kenapa berbicara tentang „hak-hak kebebasan“? Kenapa tidak langsung membahas tentang „Kebebasan“ dan nilai-nilai dasar?

Pertanyaan terpenting: Bagaimana mentransfer kebebasan dalam sebuah masyarakat?

4.3. Kajian: Tiga Nilai-Nilai Dasar, Hak-Hak Dasar dan Perangkatnya

Pada bab pertama kita telah menyaksikan, bahwa teori-berbagai politik dan filsafat memiliki konsep yang berbeda tentang ketiga nilai dasar, yaitu kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Jadi, kita bergumul dengan „pluralisme argumen“, yang melintasi berbagai model pemikiran dan aliran politis.

Bagi suatu teori yang menyeluruh, pluralisme argumen ini menyimpan satu masalah: Jika sebuah teori berangkat dari aspek atau untaian alasan khusus, maka teori ini kehilangan tuntutan umumnya, dan secara potensial argumennya terisolasi dari tradisi-tradisi filsafat, etnis atau religius.

Karena alasan tersebut, maka sebuah teori sosial demokrasi, menurut Meyer, haruslah memilih landasan argumentasi seluas mungkin. Untuk itu perlu diketemukan satu tingkatan argumentasi, yang tidak terlalu dibentuk oleh kekhususan kultural, akan tetapi oleh kerangka yang luas dan terlegitimasi (secara) demokratis yang dapat menggambarkan teori tersebut.

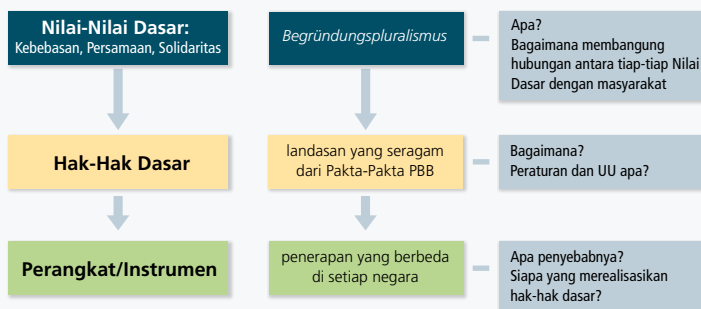
Dengan demikian, sebagai basis argumen, tataran nilai-nilai dasar dapatlah diabaikan. Nilai-nilai dasar itu memang membentuk konteks penting dan argumentatif, namun bersifat variabel dan terikat secara kultural.

Jadi, argumentasi yang benar bagi penjelasan sosial demokrasi harus dicari di tataran lain. Tiga tataran dapatlah secara kasar dibedakan sebagai berikut:

Trio dari nilai-nilai dasar, hak-hak dasar dan perangkatnya

Apa basis argumentasi menyeluruh?

Tiga tataran



Gambar 10: Bab Nilai-nilai dasar, nilai dasar dan perangkatnya

Nilai-nilai dasar

Pada tingkatan nilai-nilai dasar kebebasan, kesetaraan dan solidaritas dijelaskan, bagaimana hubungan setiap individu terhadap masyarakat dan bagaimana kehidupan dalam masyarakat hendak ditata. Cita-cita masyarakat, di mana nilai-nilai dasar itu didefinisikan dan dijadikan tuntutan, seperti dijelaskan di atas, berasal dari berbagai sudut pandang sosial-politik dan filosofis.

Hak-hak dasar

Pada tingkatan hak-hak dasar, nilai-nilai dasar tersebut dijabarkan dan diterapkan dalam norma-norma perilaku (perbuatan) yang mengikat, demokratis dan sah. Berbeda dengan nilai-nilai dasar, maka hak-hak dasar ini tidak tunduk pada pluralisme argumen, namun mengatur kehidupan bersama, tak tergantung pada alasan-alasan masyarakat.

Perangkat

Pada tingkatan perangkat (instrumen), institusi-institusi masyarakat didefinisikan, di mana negara-negara dan persekutuan antar negara hendaknya mengamankan dan menjamin tuntutan perbuatan, yang berasal dan diturunkan dari pengabulan penerapan hak-hak dasar. Berbagai perangkat tersebut sangat berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu budaya ke budaya lain, seperti yang diperlihatkan oleh studi perbandingan negara-negara di dunia.

Agar diperoleh landasan argumentasi seluas mungkin bagi teori sosial demokrasi, maka sebaiknya tataran hak-hak dasar dipilih sebagai titik masuk. Meyer memilih dua pakta PBB tentang hak-hak dasar di bidang politik, ekonomi dan budaya sebagai landasan argumentasinya. Berbagai alasan berikut, mendukung pilihan Meyer:

- Pakta-pakta PBB adalah sumber hak-hak dasar yang universal, seragam dan mengikat secara hukum, yang mengatasi budaya dan lintas negara. Pakta-pakta PBB itu diratifikasi oleh 140 negara dan dengan demikian menjadi hukum yang diberlakukan.
- Pakta-pakta PBB bertumpu pada perkembangan masyarakat dan transformasi hak-hak dasar dalam kerjasama internasional. Negara-negara tersebut di atas berkewajiban memperbaikinya secara berkelanjutan dalam realitas hak-hak dasar yang ada.
- Pakta-pakta PBB berisi formulasi hak-hak manusia yang hampir menyeluruh dan rinci yang bisa diajukan sebagai tuntutan oleh setiap individu.

Argumen terakhir terutama dapat digambarkan dengan baik lewat perbandingan antara hak-hak dasar menurut Konstitusi Jerman dan formulasi hak-hak dasar menurut pakta-pakta PBB :

Bidang Pengaturan	Konstitusi Jerman	Pakta-pakta PBB
Hak individu	Martabat manusia tidak bisa diganggu-gugat. Menghormati dan melindunginya merupakan kewajiban segenap kekuasaan negara (Pasal 1)	Setiap manusia memiliki hak alami buat hidup. Hak ini harus dilindungi oleh UU. Hidup seseorang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang (Pasal 6 ayat 1 Pakta PBB PR)* (1) Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan keamanan individual (Pasal 9 ayat 1 Pakta PBB PR)
Hak mendapatkan pekerjaan	„(1) Semua warga Jerman memiliki hak memilih profesi tempat kerja dan pendidikan. Pelaksanaan profesi bisa diatur dengan UU atau turunannya. (2) Tidak ada seorangpun bisa dipaksa melakukan sebuah pekerjaan, selain dalam kerangka umum yang berlaku untuk semua, berupa kewajiban pelayanan publik“ (Pasal 12)	(1) Negara-negara yang menandatangani perjanjian mengakui hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan ini meliputi hak setiap individu untuk memanfaatkan peluang mencari nafkahnya sendiri lewat pekerjaan pilihannya atau pekerjaan yang diterimanya secara bebas. Negara-negara penadatangan perjanjian mengusahakan langkah-langkah yang sesuai guna melindungi hak-hak tersebut. (2) Langkah-langkah yang diambil oleh negara penadatangan perjanjian guna merealisasikan sepenuhnya hak-hak tersebut meliputi konsultasi kejuruan dan profesi, program-program pendidikan/pelatihan serta penetapan prinsip-prinsip dan prosedur untuk meraih pembangunan secara berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan kultur dan keadaan tanpa pengangguran yang produktif. Kesemuanya ini hendaknya melindungi kebebasan dasar politis dan ekonomis setiap individu (Pasal 6 Pakta PBB WSKR)**

*) Pakta internasional tentang hak-hak warga dan politik 19 Desember 1966 (dikutip menurut Heidelberg 1997: 233-244)

**) Pakta internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 19 Desember 1966 (dikutip menurut Heidelberg 1997: 244-250)

Bidang Pengaturan	Konstitusi Jerman	Pakta-pakta PBB
Hak milik / standar hidup	<p>(1) Hak milik dan hak warisan dijamin. Isi dan pembatasan-pembatasannya diatur oleh UU. Hak milik berkewajiban. Penggunaannya hendaknya sekaligus mengabdikan demi kesejahteraan umum (Pasal 14)</p>	<p>1) Negara-negara penandatangan perjanjian mengakui hak setiap individu guna memperoleh standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan dan papan yang cukup, memperbaiki secara terus menerus persyaratannya. Negara-negara penandatangan perjanjian mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin hak-hak tersebut dan mengakui kegunaannya sebagai arti penting bagi kerjasama internasional yang berlandaskan kebebasan kerjasama (Pasal 11 Pakta PBB VVSKR)**</p>
Pendidikan	<p>(1) setiap orang berhak mengembangkan kepribadian dirinya, sepanjang ia tidak mencederai hak-hak orang lain dan tidak bertentangan dengan tatatan yang konstitusional serta tidak melanggar hukum susila (Pasal 2)</p> <p>(1) Segenap lembaga pendidikan berada dalam pengawasan negara</p> <p>(2) Pihak-pihak yang berhak mendidik, berhak menentukan kesertaan anak untuk ikut dalam pendidikan agama (Pasal 7)</p>	<p>1) Negara-negara penandatangan perjanjian mengakui hak individu untuk memperoleh setiap pendidikan. Negara-negara penandatangan sepakat, bahwa pendidikan harus ditujukan guna mengembangkan sepenuhnya kepribadian dan kesadaran demi martabat manusia dan demi penguatan penghormatan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Negara-negara penandatangan perjanjian selanjutnya sepakat, bahwa haruslah dimungkinkan memberikan akses pendidikan bagi setiap orang, bahwa pendidikan harus berperan sebagai hal yang bermanfaat dalam masyarakat yang bebas, bahwa pendidikan memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa serta antar kelompok ras, etnis dan agama, bahwa pendidikan haruslah menunjang kegiatan PBB demi menjaga perdamaian.</p> <p>(2) Negara-negara penandatangan perjanjian mengakui, demi terrealisasinya hak-hak tersebut di atas, maka a) pendidikan dasar untuk setiap orang haruslah merupakan kewajiban dan haruslah terbuka dan cuma-cuma bagi setiap orang (...) c) pendidikan di perguruan-perguruan tinggi, dengan kebijaksanaan yang sesuai, terutama lewat penerapan tanpa biaya, haruslah terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kecakapannya (Pasal 13 Pakta PBB WSKR) **</p>

Kedua pakta PBB itu memperlihatkan gambaran yang komplis tentang bagaimana hak-hak dasar lambat laun dan lewat kerjasama internasional direalisasikan. Dalam pakta tentang hak-hak ekonomi, sosial dan disebutkan:

Setiap negara-negara penandatangan perjanjian berkewajiban, secara mandiri dan lewat bantuan dan kerjasama internasional, terutama berbentuk ekonomi dan teknis, dengan mengerahkan segala kemungkinan, dalam menentukan kebijakan, agar lambat laun dengan segala perangkat yang pas. terutama melalui kebijakan pembuatan UU, demi pencapaian penuh hak-hak yang diakui dalam pakta (pasal 2, ayat 1)

Dalam pakta-pakta PBB tertulis perspektif pembangunan, kewajiban bertindak bagi negara guna merealisasikan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya, yang berangkat dari hak-hak politis yang terjamin dan mendasar. Begitu pula mendukung perwujudannya secara terus menerus lewat „segala perangkat yang sesuai“. Pada akhirnya tersiratkan tuntutan kepada negara-negara penandatangan perjanjian agar melakukan tindakan. Dan tuntutan ini merupakan gambaran sebuah negara yang aktif.

Bukan karena menjamin hak-hak dasar, namun justru karena intervensi negara itulah yang bertentangan dengan demokrasi libertarian.

Namun, hati-hati: Realisasi hak-hak dasar tersebut di banyak negara bermasalah. Tuntutan dan penerapan hukum jauh berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, dapat dipahami munculnya berbagai pertanyaan kritis tentang manfaat Pakta PBB tersebut. Tak ada insititusi internasional yang mampu melaksanakannya.

Namun perlu dicatat, bahwa dibandingkan dengan Konstitusi Jerman, pakta-pakta PBB memuat formulasi yang lebih rinci tentang hak-hak dasar. Formulasi ini dapat digunakan sebagai landasan (ambisi) sosial demokrasi.

Pasal 20 UUD Jerman, memang menyebutkan bahwa Republik Federal Jerman merupakan negara federal yang demokratis dan sosial. Namun, kewajiban bertindak, seperti yang terdapat dalam pakta-pakta PBB, sangat terbatas disebutkan.

Bahwa dalam realisasinya peranan aktif negara menjadi persoalan dan tidak pasti, bisa ditemukan pula dalam diferensiasi hak-hak dasar berikut ini. Di situ terlihat, bahwa dalam libertarisme murni yang direncanakan secara konsekuen, adalah sebuah pertentangan dalam dirinya.

*Perspektif
perkembangan
Pakta-Pakta PBB*

*Tetapi: Pakta PBB
dilanggar di mana-
mana karena tidak
memiliki kekuatan
penindakan*

4.4. Hak-Hak Kebebasan Positif dan Negatif

Definisi: Hak-hak kebebasan positif dan negatif

Demokrasi liberal mendefinisikan dirinya terutama pada penekanan Hak-hak kebebasan sebagai hak setiap individu dalam masyarakat. Hak-hak kebebasan, menurut Isaiah Berlin, dapatlah dibedakan antara Hak-hak kebebasan negatif (formal, bersifat menangkis/mempertahankan diri) dan Hak-hak kebebasan positif (yang dimungkinkan secara sosial).

Isaiah Berlin *Dalam Two Concepts of Liberty* Mon 1958, Isaiah Berlin membedakan dua hak-hak kebebasan sebagai berikut:

- Hak-hak kebebasan negatif (misalnya hak untuk keselamatan dan keutuhan tubuh) dicapai lewat jaminan perlindungan dari pelanggaran negara dan masyarakat
- Hak-hak kebebasan positif (misalnya hak memperoleh pendidikan) dicapai lewat tindakan-tindakan masyarakat dan negara yang memungkinkan dan menunjang kebebasan setiap individu

Perbedaan antara demokrasi libertarian dengan sosial demokrasi terutama terletak pada seberapa jauh kedua teori itu menempatkan makna hubungan antara hak-hak kebebasan negatif dan positif.

Di sinilah teori sosial demokrasi-nya Meyer menetapkan tolak ukurnya, sehingga diskusi tentang hak-hak kebebasan itu dapat dilakukan secara lebih pasti. Seperti yang telah dibicarakan pada halaman-halaman sebelumnya, perdebatan berangkat dari diskusi filosofis tentang tipe-tipe ideal, terlepas apakah hal tersebut benar-benar eksis (dalam kenyataan, tak pernah diketemukan dalam bentuknya yang murni).

Dalam argumentasi filosofis inilah, terlihat perbedaan antara demokrasi libertarian dengan sosial demokrasi:

Tesis libertarian

Tesis Libertarian

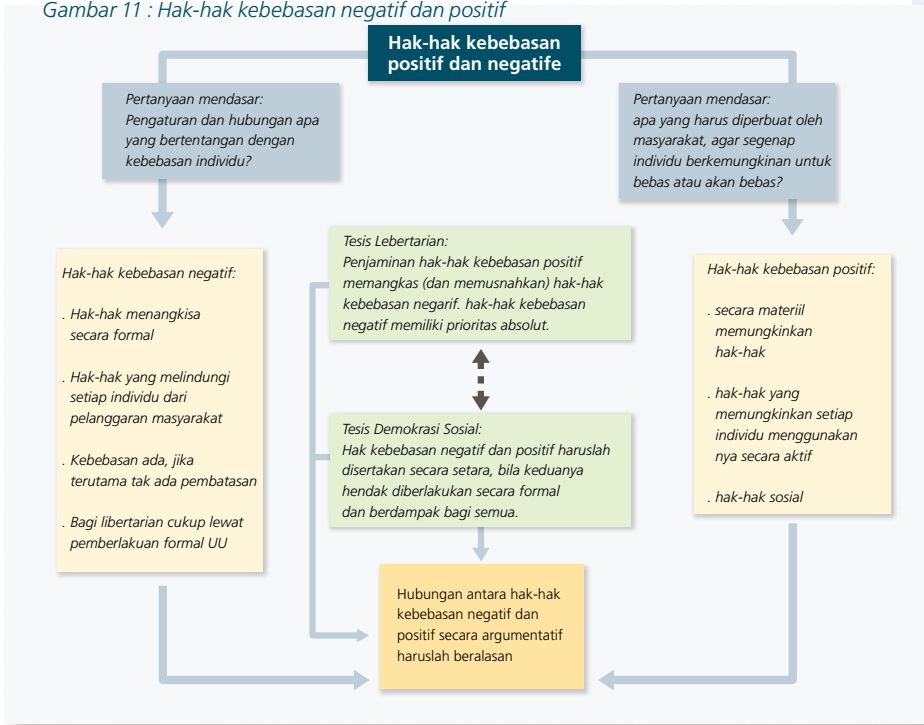
Penjaminan hak-hak kebebasan positif memangkas (dan memusnahkan) hak-hak kebebasan negatif. Hak-hak kebebasan negatif haruslah secara absolut diprioritaskan. Inilah ringkasan tesis yang dicetuskan di Berlin, yang saat ini banyak dianut kaum neoliberal.

Tesis sosial demokrasi

Tesis Sosial Demokrasi

Keduanya, baik hak kebebasan negatif maupun positif, harus diberlakukan secara setara, bila diinginkan agar keduanya berlaku bagi semua, secara formal dan nyata.

Gambar 11 : Hak-hak kebebasan negatif dan positif



Pembedaan antara demokrasi libertarian dengan sosial demokrasi perlu dicermati lebih jauh guna mengetahui bagaimana relasi antara hak-hak kebebasan negatif dan hak-hak kebebasan positif.

Secara logis, Meyer membantah arugentasi-argumentasi libertarian:

Argumentasi-argumentasi libertarian memprioritaskan hak-hak kebebasan negatif secara absolut di depan hak-hak kebebasan positif. Sementara itu teori *sosial demokrasi* memberi keduanya dalam realsi yang logis, penuh ketegangan dan kesetaraan.

Teori *demokrasi sosial* membantah tesis tesis libertarian dan membuktikan adanya keterkaitan antara keduanya.

Libertarian: Hak-hak kebebasan negatif secara absolut

Asumsi

Argumentasi Meyer berlandaskan pada empat langkah argumentatif: Pertama, ia berangkat dari asumsi, bahwa dalam argumentasi libertarian hak-hak kebebasan negatif secara universal berlaku dan berpengaruh. Berbeda dengan argumentasi-argumentasi libertarian yang hanya memprioritaskan hak-hak kebebasan negatif.

Kapan tesis libertarian terbantahkan?

Tesis Libertarian dengan sendirinya akan terbantahkan, ketika terdapat konstelasi yang menunjukkan bahwa hak-hak kebebasan negatif itu tak bisa berlaku bagi seseorang akibat tidak diberikannya hak-hak kebebasan positif.

Dibantahkan lewat contoh-contoh

Dengan mudah konstelasi ini bisa diperoleh: Seseorang yang tidak memiliki hak-hak kebebasan positif atas pendidikan, begitu pula seseorang yang tidak memiliki infrastruktur yang memungkinkannya berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan seseorang yang tidak mampu membayar biaya Pendidikan dengan modal yang ia miliki, maka hak-hak kebebasan positifnya atas kebebasan berbicara pun tak akan berguna. Alhasil, hak-hak kebebasan negatifnya itu menjadi omong kosong belaka.

Kesimpulan: keterkaitan hak-hak kebebasan positif dan negatif

Agar hak-hak negatif tidak hanya berlaku secara formal saja, namun berfungsi bagi segenap orang, maka haruslah diberikan hak-hak kebebasan positif. Hal ini berarti juga, kekayaan yang dimiliki masyarakat haruslah dibagi. Tindakan ini hanya sedikit mengintervensi hak-hak kebebasan negatif (terhadap hak milik).

Dari pertimbangan tersebut, prioritas absolut hak-hak kebebasan negatif tidak akan mungkin berfungsi. Hak-hak kebebasan negatif tidak dapat berlaku dan berdampak bagi semuanya, tanpa dilengkapi oleh hak-hak kebebasan positif.

Hak-hak kebebasan negatif hanya berfungsi dan bermanfaat bagi semua jika hak-hak kebebasan positif „dimungkinkan“ untuk terjamin. Hak-hak kebebasan formal yang dijamin pun tak akan membantu, jika hak-hak kebebasan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh setiap individu guna mensukseskan tuntutan mereka terhadap negara.

Tanpa pengaturan distribusi kekayaan yang umumnya diorganisir oleh negara, realisasi hak-hak kebebasan bagi segenap semua anggota masyarakat menjadi mustahil. Meyer berkesimpulan bahwa , perimbangan antara hak-hak kebebasan negatif dan positif haruslah dirundingkan dan dilaksanakan oleh negara.

4.5. Kewajiban Negara untuk Bertindak

Realisasi hak-hak kebebasan negatif dan positif bagi setiap orang merupakan kewajiban (bertindak) negara. Ini berbeda dengan negara libertarian yang hanya menuntut hak-hak dasar, sementara realisasinya diserahkan kepada pasar. Tuntutan untuk meralisasikan secara nyata hak-hak dasar bagi setiap individu dibebankan kepada negara.

Negara, dengan demikian, dibebani peranan aktif berikut kewajiban bertindak, terutama menyangkut :

- pembukaan akses, terjaminnya peluang terhadap infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan hidup
- pemberian peluang partisipasi aktif bagi semua lewat pemerataan sosial dan demokrasi
- secara formal, memagari ekonomi pasar sedemikian rupa sehingga struktur-struktur demokrasi dan kepentingan-kepentingan kaum buruh dapat terjamin dan secara bebas terwakili.

Perangkat (instrumen) negara yang bisa memenuhi tuntutan-tuntutan warganya itu tidaklah seragam di setiap negara. Lewat sebuah contoh sederhana, hal tersebut bisa dijelaskan:

Sejak tahun 1890an, di Jerman berkembang sebuah sistem jaminan sosial. Sistem ini sangat berperan membuat penduduk, secara umum, dapat hidup secara manusiawai. Lewat keterlibatan solidaritas kaum pekerja, pemerintah sebagai organisator memastikan loyalitas warga terhadap negara.

Negara-negara lain, seperti negara-negara Skandinavia, memiliki sistem sosial yang berbasis pajak. Dalam hal ini, seperti bisa dilihat dalam stusi-studi banding antara negara (bandingkan halaman berikut, hal. 107 dst), dapatlah dikatakan, bahwa terdapat penyediaan kebutuhan hidup dan pemenuhan tuntutan setiap warga terhadap negara. Kendati demikian, terlihat perbedaan gradual, jika sistem-sistem itu diperbandingkan, yang terkuak dalam hal kesuksesan pelaksanaan hak-hak kebebasan negatif dan positif.

*Kewajiban negara
untuk bertindak*

*Kewajiban
terpenting*

*Instrumen yang
tergantung
(pada) arah*

Namun kewajiban bertindak yang diturunkan dari hak-hak kebebasan dapat diselesaikan (lebih baik dan kurang baik) oleh kedua jenis organisasi di atas.

Realisasi hak-hak kebebasan, tidaklah lengkap sekedar lewat pertanyaan terkait perangkat (instrumen) yang kongkrit, juga meskipun instrumen tersebut dapat dan harus diuji.

Sosial demokrasi bukanlah model gagasan yang lengkap, dan berhenti pada bentuk formalitasnya. Sosial demokrasi juga bukan bangunan filosofis yang menonjol. Sebaliknya, sosial demokrasi sebagai model yang terbuka haruslah meyakinkan melalui pemanfaatannya sebagai kompas buat tindakan politis. Lewat sosial demokrasi, kemudian sedapat mungkin hak-hak kebebasan dengan berbagai instrumen berbeda bisa diimplementasikan. Hal tersebut juga memungkinkan terealisasinya nilai-nilai dasar dari kebebasan, persamaan/keadilan dan solidaritas.

Sosial demokrasi bukanlah sebuah teori mewah, melainkan suatu tantangan dan tugas bersama bagi perwujudannya.

5. MODEL BANGSA BANGSA

Dalam bab ini akan

- diteliti realisasi sosial demokrasi di AS, Britania Raya, Jerman, Jepang dan Swedia;
- dibedakan – berdasarkan teori sosial demokrasi – antara negara libertarian dengan negara sosial demokrasi, baik yang bersifat inklusif rendah, menengah maupun tinggi.

Negara-negara bisa memenuhi tuntutan tanggungjawabnya terkait hak-hak dasar dengan berbagai jenis perangkat/alat.

Dengan demikian, sosial demokrasi tidak bisa diformulasikan secara ketat dan baku, tergantung pada kondisi masing-masing. Namun, karena sosial demokrasi tidak berhenti pada sekedar formula formal terkait kebebasan, haruslah diuji apakah kondisi sebuah negara telah menunjukkan arah jalan sosial demokrasi atau bahkan telah berada pada kondisi sosial demokrasi atau belum sama sekali.

Terkait hal ini, Thomas Meyer dan kawan kawan, telah menuliskan data perbandingan beberapa negara secara empiris. Banyak teori-teori tentang demokrasi yang melupakan hal ini.

Lima contoh singkat berikut memperlihatkan perbedaan gradasi ketercapaian sosial demokrasi, masing-masing:

- AS dengan landasan yang nyaris liberal (libertarian), hanya beberapa elemen saja yang memungkinkan tercapainya kondisi sosial demokrasi
- Britania Raya adalah sebuah contoh sosial demokrasi inklusif rendah (*low-inclusive social democracy*)
- Jerman sebagai sosial demokrasi inklusif menengah, dan
- Jepang, meski dalam banyak hal tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat, bisa dianggap sebagai sosial demokrasi berinklusif menengah, sedangkan
- Swedia adalah sosial demokrasi inklusif tinggi.

Karena keterbatasan waktu, studi berbagai negara tersebut, masih terbilang minimal. Siapa yang ingin memperdalam, silahkan membaca jilid kedua teori Meyer (Meyer 2006).

*Tuntutan aksi
dan berbagai
implementasinya*

Lima contoh

5.1. Amerika Serikat

Oleh Julia Bläsius

AS : Kebebasan dan kesenjangan sosial

Bagi banyak dari kita, AS dianggap sebagai negara kebebasan, sekaligus dipenuhi kesenjangan dan keterpinggiran sosial. Apa saja penyebabnya? Kenyataannya, AS adalah sebuah negara yang menjadikan kebebasan individu dalam berbagai bidang sebagai prioritas sehingga secara tradisional masyarakatnya akan bersikap skeptis terhadap (peran) negara yang kuat. Penyebabnya adalah proses demokratisasi secara dini yang memunculkan budaya politik tersebut. Hal yang mempengaruhi para aktor, sistem politik, perlakuan terhadap hak-hak dasar dan karakter negara kesejahteraan itu sendiri.

AS adalah satu dari negara pertama yang memiliki (sistem) demokrasi massa yang modern. Hal yang memunculkan etos republikan dalam masyarakatnya. Sudah sejak konstitusi tahun 1789, tertuang hak memilih secara umum. Ketika di Eropa demokrasi biasanya menggantikan sistem monarki di mana struktur negara yang sentralistik cukup berkembang, demokrasi di AS bisa disebut tumbuh berbarengan dengan negara usai perang kemerdekaan. Konstelasi ini mewarnai pemahaman tentang negara dan kultur politik AS. Masyarakat menjunjung tinggi kebebasan individu dan mengharapkan peran pasif negara. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa kesenjangan sosial adalah sebuah hasil alamiah kehidupan antara sesama manusia.

Kebebasan sebagai maksim perilaku tertinggi

Budaya politik pun sangat ditentukan oleh liberalisme yang mengedepankan kebebasan individu. Berbeda dengan Eropa, liberalisme di AS tidak pernah dipertanyakan oleh aliran konservatisme atau sosialisme sehingga berkembang sebagai prinsip dominan tanpa alternatif. Hingga saat ini, kebebasan memperoleh nilai tertinggi dalam masyarakat AS.

Sejalan dengan itu, pemerintah nyaris tidak memiliki kemungkinan dan terutama tidak berambisi mempengaruhi perekonomian atau bekerjasama dengan pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja sangatlah lemah dan nyaris tak berperan sehingga gaji dan kontrak kerja harus dinegosiasikan secara individual. Dari sudut pandang ini, AS adalah contoh yang pas tentang demokrasi pluralistis. Memang ada saja kepentingan-kepentingan partikular yang cenderung menguat, namun hanya berlaku di kalangan mereka yang kuat secara organisasi dan pendanaan. Sementara kepentingan umum yang kurang terorganisir hanya sedi-

kit memperoleh perhatian. Hal ini terlihat jelas dalam kelompok-kelompok lobi dan paguyuban bisnis yang memiliki pengaruh besar, sementara terpinggirnnya kepentingan minoritas etnis.

Bagaimana manifestasinya dalam arsitektur negara kesejahteraan AS? Pemahaman terkait hak-hak dasar apa yang menjadi acuannya?

Sistem politik

Sistem pemerintahan di Amerika Serikat disebut sebagai sistem presidensial dengan struktur dualistis, terdiri dari eksekutif dan legislatif. Tugas eksekutif dipegang oleh presiden yang sekaligus adalah kepala negara. Legislatif terdiri dari dewan perwakilan rakyat dan senat, yang keduanya bersama membentuk kongres. Legislatif dan eksekutif itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, dan bersamaan dengan itu saling bersilangan. Prinsip „check and balances“ bersumber dari filosof kenegaraan Montesquieu dan John Locke. Kegunaannya adalah menghindari penyelewengan kekuasaan. Sistem ini bertujuan melindungi secara efektif kebebasan individual warga AS dari jorjahan kekuasaan yang tidak adil.

Di AS, secara tradisi partai-partai politik tidak berpengaruh, sehingga persaingan antar parpol tidaklah memainkan peranan penting. Keutamaan kehadiran parpol-parpol hanyalah sebagai organisator kampanye pemilihan, mengorganisasi dan melaksanakan kampanye buat kandidat-kandidat utama. Parpol-parpol tampil tidak dengan program memerintah yang pasti dan menawarkan sedikit program. Dalam kongres, parpol-parpol hanya memainkan peranan kecil, karena pertama parpol-parpol tersebut tidak harus mendukung satu pemerintah dan kedua pengambilan suara dipungut terhadap anggota-anggota legislatif yang tergantung pada kepentingan pribadi ketimbang pandangan ideologis.

Konstitusi dan Sistem Hak-Hak Dasar

Pembukaan UUD AS 1789 diawali dengan semboyan „*Life, liberty the pursuit of and the pursuit of happiness*“ (Kehidupan, kebebasan dan peraih kebahagiaan). Untuk mencapai tujuan ini diperlukan negara berbentuk federal dengan sistem presidensialisme. UUD AS adalah UUD republik yang tertua, dan masih berlaku sampai sekarang. Sejak dahulu sudah diberlakukan hak memilih dalam pemilu meski hanya dapat diikuti oleh kaum pria berkulit putih pemilik tanah.

Konkretnya seperti apa?

Sistem presidensial

Partai sebagai organisasi kampanye pemilu

„Kehidupan, kebebasan dan peraih kebahagiaan“

Bill of Rights, yang meliputi sepuluh sisipan pertama terhadap konstitusi, memberikan warga negara AS tambahan hak-hak yang tak bisa dilepaskan. Kesemuanya itu melindungi individu dari intervensi negara. Dengan kehadiran mahkamah konstitusi, maka setiap individu dapat menggugat hak-hak tersebut

Negatif tanpa hak kebebasan positif

Sampai sekarang, tradisi lama yang disebut sebagai hak-hak dasar politis menentukan pengertian tentang hak-hak dasar dari rakyat Amerika. Pengertian tersebut tetap eksis, meski terjadi pemasangan apa yang disebut dengan hak-hak dasar warga atau hak-hak kebebasan negatif akibat kebijaksanaan anti teror setelah peristiwa 11. September 2001. Karenanya, pengertian tentang hak-hak dasar sampai kini tetap memainkan peranan penting. Defisit besar untuk hak-hak dasar positif sebaliknya ditemukan dalam hak-hak ekonomi dan sosial. Hak-hak ini tidak tertera dalam konstitusi AS. Juga AS tidak pernah menandatangani perjanjian internasional yang menyangkut hak-hak tersebut. Konsekuensinya, warga AS hanya berhak memperoleh jasa sosial, jika mereka membayar asuransi atau tergolong kelompok miskin. Kaum miskin tidak dijamin oleh hak-hak ini, sehingga setiap saat Kongres dapat memutuskan penyediaan transfer pembayaran.

Politik Ekonomi

AS tergolong dalam tipe liberal, dengan kata lain ekonomi pasar tak terkoordinir. Perusahaan-perusahaan bergerak leluasa di dalam alam persaingan bebas. Jarang terjadi kerjasama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah atau mitra sosial lainnya. Kehidupan ekonomi di AS terutama berorientasi keuntungan dan pertumbuhan kemakmuran (hanya saja, mekanisme persaingan bebas yang murni ini tidak menyentuh beberapa sektor seperti pertanian atau industri persenjataan).

Pada tahun-tahun terakhir ini, serikat-serikat buruh atau asosiasi-asosiasi pemberi kerja selalu kehilangan anggota dan tidak memiliki pengaruh terhadap perundingan upah atau penentuan kondisi kerja. Perundingan upah di AS berlangsung hanya di tingkatan perusahaan. Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja terbilang sangat minim. Dengan demikian, ekonomi dan terutama pihak majikan memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dengan segera pihak majikan dapat mempekerjakan atau memutuskan hubungan kerja karyawannya.

Pada tahun-tahun terakhir berbagai serikat buruh atau asosiasi pengusaha selalu kehilangan anggota dan tidak memiliki pengaruh terhadap perundingan

Pasar bebas yang tidak terkoordinasi

upah atau penentuan kondisi kerja. Perundingan upah di AS berlangsung hanya di tingkat perusahaan. Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja terbilang sangat minim. Dengan demikian, ekonomi dan terutama pihak pengusaha memiliki fleksibilitas yang tinggi, sehingga dengan segera pihak majikan dapat memeckerjakan atau memutuskan hubungan kerja karyawannya.

Sistem pendidikan dan pendidikan lanjutpun, dirancang untuk memberikan kecakapan (yang sifatnya) umum yang diberikan kepada para pekerja. Hal yang sama terjadi pada sistem keuangan AS yang sepenuhnya fleksibelilitas. Umumnya, perusahaan-perusahaan mendanai dirinya sendiri lewat pasar modal, sehingga peningkatan *Shareholder-Value* (artinya laba perusahaan jangka pendek) menjadi prioritas utama. Jarang diketemukan jalinan antara perusahaan dengan bank. Hubungan antar perusahaan berbasiskan hubungan pasar atau perjanjian yang dapat digugat.

Negara Sosial

Hingga memasuki abad ke 20, AS hanya mempunyai sistem pengamanan sosial yang ketinggalan jaman. Dengan "Social Security Act" tahun 1937, diterapkan sistem pengamanan sosial pada tingkat nasional. Sistem ini meliputi sistem pensiunan yang didanai oleh iuran, tunjangan sosial bagi keluarga miskin, anak dan orang tua (lanjut usia) serta program jaminan pengangguran federal. Kendati begitu, AS dikatakan sebagai negara kesejahteraan liberal. Alasannya, jasa yang disediakan oleh negara tidak terlalu menyeluruh dan tidak terlalu berdampak bagi pemerataan. Sepertiga dari jasa-jasa sosial saat ini diambil alih oleh para pelaku swasta. Alasan rendahnya kesejahteraan itu bersumber dari budaya politik masyarakat AS. Berkaitan dengan hal tersebut, juga kenyataan bahwa umumnya yang memerintah adalah kaum republikan dan demokrat sayap kanan. Mereka hanya memberikan peluang kecil bagi negara kesejahteraan. Karenanya kebanyakan negara kesejahteraan sangat berorientasi pada prinsip prestasi dan dalam keadaan darurat hanya menjamin eksistensi minimum, demi menghindari kemiskinan.

Asuransi Pengangguran: Meski setiap negara bagian menentukan taraf jasa dan pengelolaan programnya, namun jaminan pengangguran di AS didanai secara sentral. Pengangguran berhak memperoleh tunjangan selama enam bulan. Dalam keadaan darurat dapat diperpanjang beberapa pekan. Besarnya tunjangan pengangguran setara dengan 30 s/d 40 persen penghasilan terakhir.

Orientasi pada nilai kepemilikan saham

Negara sosial, cermin arah prioritas AS

Asuransi pengangguran

Tunjangan sosial: Tunjangan sosial di AS adalah kebijaksanaan anti kemiskinan, yang fokusnya hanya disasarkan ke kelompok termiskin saja dan kerap mengstigmatisasi kelompok yang bersangkutan. Diluar itu ditemui program-program buat kelompok tertentu, misalnya anak-anak yang tergantung pada narkoba atau keluarga miskin. Selain tunjangan finansial, mereka kerap memperoleh tunjangan yang mengikat seperti kupon makan.

Tunjangan Pensiun: Tunjangan Pensiunan di AS didanai dari iuran. Warga AS melunasinya dengan apa yang disebut pajak penghasilan, sebagai jaminan menerima hak pensiun. Warga yang berhak memperoleh tunjangan pensiun hanya mereka-mereka yang mempunyai penghasilan dan yang dapat membayar pajak penghasilan. Sisanya tergantung pada tunjangan sosial. Selain itu diberlakukan pajak penghasilan maksimal, sehingga secara perbandingan, kelompok yang berpengasilan tinggi hanya dibebani tak seberapa.

Sistem Kesehatan: Di AS tidak dikenal sistem kesehatan yang dibiayai secara universal. Hanya tiga kelompok yang memperoleh tunjangan kesehatan negara: kelompok militer, mereka yang berusia di atas 65 tahun dan kelompok miskin, di mana terutama jumlah kelompok miskin kian cepat menggelembung. Mayoritas masyarakat AS, selama ini kurang atau sama sekali tidak memiliki. Pengejawantahan reformasi kesehatan yang diusulkan Presiden Obama yang memungkinkan semua warga AS untuk memiliki asuransi kesehatan, berarti perubahan mendasar sistem kesehatan AS

Sistem Pendidikan : Sistem pendidikan dibedakan antara sekolah (milik) gereja dan publik. Sekolah publik diorganisir dan didanai secara lokal. Dilihat dari sisi regulasi diri sendiri dan partisipasi, sistem ini menguntungkan. Namun, sistem ini menciptakan luasnya keanekaragaman dan tingginya perbedaan kualitas. Peralpnya, sekolah publik tersebut didanai oleh pajak penghasilan. Sehingga distrik pemerintahan yang kaya bisa banyak menginvestasikan pendapatan pajaknya ke sistem pendidikan. Sebaliknya yang terjadi pada distrik pemerintahan yang miskin. Karena itu, lokasi dan milieu, di mana orang tumbuh menjadi dewasa, sangat menentukan kualitas pendidikan sekolah. Kendati demikian, secara keseluruhan, sistem pendidikan AS berhasil meluluskan persentase tertinggi warga yang berpendidikan (lebih) tinggi.

Kesimpulan : Sistem politik dan negara sosial AS ditandai oleh negara yang lemah dan pasif, dalam hal pemberian kebebasan negatif individual semaksimal mungkin. Hak-hak dasar politik memiliki prioritas, sementara hak-hak sosial dan ekonomi tidak berperanan. Akibatnya, sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada intervensi negara untuk meregulasi pasar atau masyarakat. Negara juga tidak membiarkan dirinya didikte oleh perjanjian-perjanjian internasional.

Persentase lapangan kerja 2006	72.0 %	Jumlah pekerja (usia 15–64) dibandingkan total penduduk (Sumber: Eurostat)
Persentase pekerja perempuan 2006	66.1 %	Jumlah pekerja perempuan (usia 15–64) dibandingkan total penduduk perempuan (sumber: Eurostat)
Persentase pengangguran 2006	4.1 %	Jumlah penganggur dibandingkan total pekerja (sumber: Eurostat)
Persentase penganggur jangka panjang 2006	0.5 %	Jumlah mereka yang lama menganggur (12 bulan atau lebih) dibandingkan jumlah total pekerja (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan/ gini-koefisien 2006	40.8 %	Tanda-tanda distribusi pendapatan yang timpang, lebih tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan (Sumber: Human Development Report 2006)
Indeks kemiskinan 2006	15.4 %	Indeks kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (Harapan hidup, tingkat buta aksara, akses terhadap lembaga kesehatan ...), 0 = min. Kemiskinan, 100 = max. kemiskinan (Sumber: Human Development Report 2006)
Pendidikan: hubungan sukses pendidikan dengan latarbelakang sosial-ekonomi 2006	17.9 %	Jumlah, perbedaan prestasi antara murid berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi. (Sumber: OECD, PISA-Studie 2006)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	12.4 %	Jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat buruh (Sumber: J. Visser [2006] Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, 38–49)

Inilah produk dari sistem politik yang terfragmentasi, federalistis, berbudaya liberal, religius dan republikan. Alhasil, dilihat dari indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, AS menempati kedudukan relatif baik. Namun dalam hal derajat inklusi sosial, posisi AS lemah.

Dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya, AS memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Juga gini-koefisien, sebagai tolok ukurnya ketimpangan, menempati posisi yang relatif tinggi. Diukur dari kriteria sosial demokrasi, baik dalam hal pemberian kebebasan positif maupun negatif, kedudukan AS terbilang buruk. Dilihat dari hak-hak dasar, baik dalam sistem politik maupun negara sosial, maka dapat disimpulkan, bahwa di segenap bidang terdapat unsur libertarian. Maka hanyalah soal interpretasi, apakah AS bisa dikategorikan sebagai sosial demokrasi berinklusif rendah atau, sebaliknya berada dalam posisi libertarian. Namun perlu dipertimbangkan bahwa, libertarian murni hanya ada dalam teori. Sebab AS pun memiliki sistem pengamanan sosial – kendati tak sempurna.

Bacaan lanjut :

Lew Hinchman
(2006), USA:
Residual Welfare
Society and
Libertarian
Democracy, in:
Thomas Meyer
(Hg.), Praxis
der Sozialen
Demokratie,
Wiesbaden,
S. 327–373.

Winand Gellner
und Martin Kleiber
(2007), Das
Regierungssystem
der USA. Eine
Einführung,
Baden-Baden.

Pemerintahan Bush – terkecuali sejak peristiwa 11 September 2001, di bidang politik dalam negeri dan keamanan – mengendalikan AS sesuai dengan ide-ide libertarian, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Berbagai upaya terakhir pemerintah Bush bertujuan lebih memperketat jasa sosial serta melakukan privatisasi.

Apakah berbagai rencana Presiden Obama untuk mengembangkan sistem pengamanan sosial – salah satunya, terkait asuransi sudah disetujui oleh kongres – membawa keberhasilan, masih belum bisa dipastikan.

Dampak krisis finansial yang berasal dari AS, telah sangat mempengaruhi ekonomi riil di negeri ini, ikut mendorong terjadinya perubahan paradigm. Apakah hal ini akan bertahan dan secara konkret mendorong terjadinya reformasi kelembagaan, waktulah yang akan membuktikan.

5.2. Britania Raya

Oleh Christian Krell

Britania Raya (United Kingdom) dalam kerangka teori sosial demokrasi dideskripsikan sebagai *low-inclusive* (inklusif rendah) sosial demokrasi. Artinya, hak-hak dasar sosial dan ekonomi diberlakukan – melengkapi hak-hak sipil dan politik. Juga negara kesejahteraan berdasarkan hak-hak dasar terdapat pada sub-sub bagian yang pokok. Hanya saja jasa-jasa negara kesejahteraan direalisasikan pada taraf yang rendah. Benar, hak-hak dasar berlaku secara formal, namun dampaknya kerap tidak nyata. Karenanya, Britania Raya berkedudukan di area „pinggiran“ demokrasi sosial – walaupun masih termasuk ke dalam penggolongan demokrasi sosial dan libertarian.

Kenyataan bahwa negara sosial di Britania Raya dibangun relatif kecil, tentu mengejutkan. Alasannya, unsur-unsur negara kesejahteraan telah lebih dahulu berkembang di sana, jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa lainnya. Penyebarluasan perdagangan dan pembaharuan teknisiologi, selain telah membawa keuntungan dan kemakmuran, juga berdampak pembengkakan masalah sosial berbarengan industrialisasi, seperti kemiskinan, buruknya pangan dan kesehatan, mempekerjakan anak dan lemahnya jaminan sosial.

Demi mengatasi berbagai permasalahan sosial ini, secara relatif dini, dikembangkan unsur-unsur pertama sebuah negara sosial. Meskipun demikian, proses ini belum menumbuhkan negara kesejahteraan secara lengkap. Alasannya terutama terletak pada struktur politik dan budaya Britania Raya. Liberalisme mengambil peranan penting dalam budaya politik Britania Raya. Memang kebebasan berdagang dan kesejahteraan ekonomi berkembang, namun pada saat yang sama berlangsung pula pembatasan perluasan hak-hak politik. Intervensi negara dalam masalah-masalah sosial ditolak. Semboyan liberal *Laissez-faire*, „*Government shall not interfere*“ pada abad ke 18 dan 19 lebih mewarnai susunan politik sosial dan ekonomi.

Pengembangan jasa sosial negara yang kecil itu diimbangi oleh kegiatan-kegiatan karitatif dan filantropis. Berbagai bentuk karitas dan sumbangan pribadi melahirkan struktur kesejahteraan non-negara yang khas Britania Raya yang hingga saat ini masih membekas. Padahal, masalah yang dihadapi baik dahulu maupun sekarang adalah, tidak seluruh kaum miskin dapat mengenyam bantuan ini. Di samping berbagai kegiatan karitas, pada abad ke 19, tumbuh - banyak,

Sebuah sosial
demokrasi
inklusif rendah

Pembangunan
negara sosial

Meskipun demikian,
hanya sedikit
meningkatkan
kualitas negara
sosial

dan sebagian relatif kuat, - serikat-serikat buruh. Berbeda dengan Jerman, serikat-serikat buruh tersebut tidak berkembang menyatu menjadi kesatuan serikat buruh, sehingga sampai sekarang, serikat-serikat buruh Britania Raya tetap tercerai-berai.

Bersumber dari gerakan buruh pada tahun 1900, lahirlah Partai Buruh Sosial demokratnya Britania. Seusai perang dunia pertama, *Labour Party* berkembang menjadi kekuatan nomor dua di Britania Raya dan untuk pertamakalinya, pada tahun 1945 *Labour Party* mengambil alih kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya, negara kesejahteraan Britania berhasil dikembangkan secara berarti.

Konsensus Pasca Perang Dunia dan „social contract“

Prinsip-prinsip dasar negara kesejahteraan Britania merupakan produk bersama Partai Konservatif dan Partai Buruh. Oleh karena itu, disebut sebagai konsensus pasca perang gaya Britania atau „kontrak sosial“ antar segenap lapisan masyarakat.

Era Thatcher

Akhir tahun 1970an, Perdana Menteri Margaret Thatcher dari Partai Konservatif secara ofensif memproklamkan berakhirnya „kontrak sosial“ dan menuntut pengurusan „frontiers of the states“. Berbeda dengan pemahaman politik era pasca perang, Thatcher menekankan, bahwa negara tidak bertanggungjawab menciptakan keadaan tanpa pengangguran (*full-employment*). Dari sudut pandang Thatcher, setiap intervensi negara yang mencampuri kemerdekaan gerak kekuatan ekonomi, haruslah ditolak. Tindakan negara hendaknya dipusatkan untuk memapankan persyaratan dasar kegiatan ekonomi, terutama terkait jumlah uang. Pemerintahan kubu konservatif pada era Thatcher (1979-1997), berjalan seiring dengan kebijakan privatisasi dan deregulasi di banyak sektor ekonomi Britania Raya.

Dampaknya, terjadi penggelembungan persentase kemiskinan dan pembengkakan kesenjangan sosial secara signifikan di Britania Raya. Berdasarkan indikator tersebut dan lainnya, kondisi Britania Raya, bahwa pada akhir masa jabatan Thatcher, hanya dengan sangat terbatas bisa dikategorikan sebagai sosial demokrasi.

Tony Blair dan Partai Buruh

Namun dengan terpilihnya Tony Blair dan Partai Buruh tahun 1997, Britania Raya berkembang melaju kuat ke arah sosial demokrasi. Diproklamirkannya tujuan Partai Buruh, bahwa inklusi sosial dijamin buat semuanya, didukung oleh sejumlah kebijakan, yaitu pengembangan jasa-jasa publik secara berarti, terutama

kesehatan dan pendidikan, pemberantasan kemiskinan dan penerapan upah minimum. Berbagai kebijakan tersebut merupakan pertanda, bahwa Britania Raya telah berkembang secara berarti ke arah sosial demokrasi.

Namun, tetap dipertahankannya pasar kerja liberal dari tatanan ekonomi liberal warisan Thatcher, juga pemahaman Blair tentang negara yang bersifat otoriter serta politiknya terhadap Irak sebagai sahabat dekat AS, menjadikan model „Jalan Ketiga“ versi Britania Raya ini dipersoalkan.

Sistem Politik : Tidak salah bila Britania Raya disebut sebagai salah satu demokrasi tertua di Eropa. Namun, pada saat yang sama , sistem politik Britania Raya juga dikatakan sebagai „*elective dictatorship*“ alias kediktatoran terpilih. Bagaimana kedua hal tersebut bisa pas satu sama dengan lainnya?

Ketika mencermati sedikit sejarahnya, kontradiksi tersebut akan lenyap. Sejak „Glorious Revolution“ (1688 / 89), secara berkelanjutan, peran parlemen Britania Raya berkembang menjadi semakin penting. Sepanjang ratusan tahun perjalanannya, kian banyak hak-hak, yang semula dimiliki oleh raja, berpindah ke parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Perwakilan Tinggi. Perubahan revolusioner, yang mengantarkan pembagian kekuasaan di banyak negara Eropa, tidak terjadi di Britania Raya. Kekuasaan yang semula tersentralisasi di tangan kerajaan, sekarang sebagian besarnya menumpuk di tangan parlemen.

Dengan demikian, parlemem Britania memiliki kedaulatan hampir tak terbatas, juga tidak dibatasi oleh kekuasaan yudikatif atau konstitusi. Kedaulatan tersebut, saat ini, terpusat pada pimpinan fraksi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Perdana Menteri Britania Raya.

Selain itu, dua faktor tambahan memperkokoh kekuasaan pemerintah berkuasa. Pertama, sebagai negara sentral, baik daerah maupun negara bagian yang kuat sekalipun tidak dapat mempengaruhi pembuatan UU pemerintahan pusat. Kedua, sistem mayoritas (di Indonesia, dikenal dengan sebutan sistem distrik, editor) untuk sistem pemilihan umumnya selalu memunculkan satu partai sebagai pemenang mutlak. Pemerintahan koalisi – kecuali pada masa darurat nasional—tidak dikenal dan tidak diperlukan di Britania Raya. Partai Konservatif dan Partai Buruh, berkuasa silih-berganti. Di samping dua partai yang dominan itu, Partai Liberal, sebagai kekuatan ketiga perlu disebutkan. Sebagai akibat sistem

Parlemen Inggris

Pemerintahan yang kuat

pemilu mayoritas, partai-partai lainnya sangat sulit untuk bisa memapankan diri di tingkat nasional.

*Perkembangan
masa depan
sosial demokrasi
yang terbuka*

Akhir-akhir ini, terlihat beberapa perubahan perilaku pemilih, dan terkait hal tersebut, juga perubahan dalam lanskap partai politik. Partai-partai (lebih) kecil, seperti *Green Party* dan partai ekstrem kanan, *British National Party*, memperoleh tambahan dukungan sementara, sebaliknya, partai-partai mapan kehilangan suara. Namun, berkat hak pilih, hasil pemilihan membuahkan hasil yang jelas dan stabil di tingkat nasional. Pembangunan negara sentralistis, sistem mayoritas tunggal serta kedaulatan parlemen memberikan pemerintah keleluasan (potensi) besar dalam melakukan arahan. Dengan demikian, perubahan arah politik yang mendasar serta menyeluruh dimungkinkan. Artinya, dalam perkembangannya, sosial demokrasi di Britania Raya memiliki kesempatan lebih di masa depan dibandingkan dengan banyak negara lain.

Hak-hak dasar lama

Sistem Hak-Hak Dasar : Menyangkut hak-hak dasar di Britania Raya, tampaknya juga terdapat kontradiksi. Di satu pihak, lewat Magna Charta (1215) atau „Petition of Rights“ (1628), terlahir pertama kali sebuah hak-hak dasar yang luar biasa, pada awalnya hanya memberikan jaminan kepada minoritas kecil. Hak-hak dasar ini terutama bermaksud menentang kesewenang-wenangan, sehingga bisa dikategorikan sebagai hak-hak kebebasan negatif. Di lain pihak, Britania Raya tidak mengenal konstitusi secara tertulis. Jadi, tidak diketemukan daftar hak-hak dasar yang tertera dalam konstitusi.

Namun demikian, pada tahun 1976, Britania Raya telah menandatangani pakta PBB baik yang menyangkut hak-hak dasar dan politik bagi warga, maupun yang menyangkut ekonomi, sosial dan budaya. Tahun 1998, Britania Raya juga mengadakan konvensi HAM Eropa ke dalam perangkat hukumnya.

*Apakah hak-hak
dasar ini, juga
diterapkan?*

Meski secara formal diberlakukan, belum bisa dikatakan, bahwa di Britania Raya Hak-hak dasar tersebut diterapkan di semua bidang secara nyata. Tingginya tingkat kemiskinan, di Britania Raya, misalnya, menimbulkan pertanyaan apakah hak memiliki standar hidup yang layak, telah benar-benar dipenuhi. Sejak Partai Buruh mengambil alih pemerintahan, beberapa hak-hak dasar direalisasikan lebih menyeluruh ketimbang sebelumnya. Sebagai contoh, sejak 1999 diberlakukan upah minimum secara nasional dan ketetapan bagi pemberi kerja, agar mengupah dan menyediakan persyaratan kerja bagi mereka yang bekerja

paruh waktu setara dengan para pekerja penuh waktu.

Politik Ekonomi : Britania Raya adalah tipe klasik ekonomi pasar liberal. Dibandingkan dengan ekonomi pasar terkoordinasi, peranan pasar yang bersaing secara intensif sangatlah penting di Britania Raya.

Pentingnya makna pasar terlihat, misalnya, dalam perundingan upah antara pengusaha dan pekerja. Karena asosiasi pengusaha dan serikat buruh lemah dan tercerai berai, maka tawar-menawar kerap dilakukan secara individu antara karyawan dengan pengusaha. Tingkat upah berorientasi kepada tingkat upah yang diperoleh di pasar. Hak berpartisipasi, misalnya seperti di Industri batu bara, besi dan baja Jerman, tidak dikenal di Britania Raya.

Lemahnya UU Perlindungan Pemutusan Hubungan Kerja di Britania Raya, memudahkan terjadinya pemecatan. Hanya saja, umumnya karyawan yang memiliki keterampilan mudah mendapatkan pekerjaan baru di pasar kerja yang fleksibel itu. Pada masa krisis ekonomi dan finansial, kerawanan pasar fleksibel terlihat dari gonjang-ganjing pasar kerja di Britania Raya. Tingkat pengangguran pun melejit, dibandingkan dengan ekonomi pasar terkendali seperti halnya Jerman. Secara keseluruhan, masa bekerja seorang karyawan di satu perusahaan relatif lebih pendek. Karena itu, para pemilik perusahaan pun tidak terlalu berminat untuk meningkatkan kualifikasi pekerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan atau cabangnya. Akibatnya, antara lain, dalam perbandingan secara internasional, tingkat produktivitas Britania Raya terbilang rendah. Akibat rendahnya produktivitas, pengaruh industri dalam perekonomian Britania Raya secara keseluruhan terbilang lemah. Sebaliknya, yang berpengaruh sangat kuat adalah sektor jasa. Kota London, misalnya, tegolong ke dalam pusat-pusat keuangan dunia terpenting. Di sini pun, jasa keuangan dan asuransi terwakilkan dengan kuat. Sejalan dengan kondisi tersebut, sekitar 76% warga Britania raya bekerja di sektor jasa.

Dalam ekonomi pasar liberal, untuk berinvestasi kebanyakan perusahaan mengambil modal terutama pasar modal, sehingga harus bergerak cepat. Konsep keuangan berdasarkan laba bersih secara jangka panjang melalui bank langganan, nyaris tidak dikenal. Maka, ekonomi Britania Raya tunduk pada orientasi jangka pendek dan berupaya keras meraup keuntungan semaksimal dan secepat mungkin.

Negara Kesejahteraan : Dalam perbandingan, negara kesejahteraan Britania Raya kerap ditempatkan sebagai negara yang berkarakter hibrida. Artinya, berbagai logika negara kesejahteraan memang menjadi ciri, namun sekaligus tidak terwakili dalam sistem. Sebagai contoh, beberapa jasa negara kesejahteraan seperti sistem kesehatan memang dijamin secara universal yang artinya berlaku untuk setiap penduduk Britania Raya. Namun, jasa-jasa lainnya hanya diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kebutuhan yang sebagian dianggap melecehkan. Karena perbedaan ciri-ciri ini, Britania Raya bias digolongkan sebagai negara kesejahteraan liberal. Negara hanya menjamin pengamanan atas risiko dasar, sementara kebutuhan kesejahteraan di atas kebutuhan dasar tersebut, harus diselesaikan masing-masing warga lewat pasar bebas.

Sistem Kesehatan : Jasa Kesehatan *National Health Service* (NHS) merupakan jantungnya negara kesejahteraan Britania Raya. Dananya diperoleh dari pajak. Jasa kesehatan ini menjamin pelayanan kesehatan penduduk secara cuma-cuma seperti dokter, perlengkapan yang diperlukan dan obat-obatan. Keuntungan dari NHS adalah tingginya transparansi, di samping jaminan pemberian jasa secara universal. Namun, sejak puluhan tahun, NHS tiada hentinya kekurangan dana . Ditambah lagi NHS mengalami kemacetan dalam melayani perawatan. Ini terlihat dari lamanya waktu tunggu untuk operasi (bedah) tertentu. Oleh karena itu, sejak tahun 2000, dana publik yang cukup besar diinvestasikan ke NHS.

Jaminan Sosial : Asuransi Nasional „*National Insurance*“ menjamin sederet risiko seperti jaminan hari tua, pengangguran, kecelakaan kerja, invaliditas dan sebagainya. *National insurance* didanai lewat iuran yang dipungut dari penghasilan secara proporsional. Pada umumnya, jasa diberikan secara rata-rata dan hanya sebatas kebutuhan dasar. Barang siapa hendak mengamankan dirinya lebih dari kebutuhan dasar, haruslah memanfaatkan penawaran yang tersedia di pasar bebas.

Tunjangan Sosial : (*National Assistance*) memberikan sederet jasa yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tak berhak memperoleh jasa berdasarkan penyetoran iuran dan mereka yang tidak dapat memanfaatkan jasa-jasa pemenuhan kebutuhan. Berbagai jasa ini didanai oleh pajak, dan kerap kali ketat terarah pada orientasi kebutuhan. Artinya, jasa ini hanya dapat dimanfaatkan, apabila pihak yang membutuhkan telah membuktikan, bahwa dirinya miskin dan tidak berkemungkinan untuk menolong diri sendiri.

Sistem Pendidikan : Di Britania Raya, lanskap sekolah terbagi dalam sekolah publik (negeri) dan swasta yang dipungut biaya. Pembagian sistem pendidikan seperti ini ikut bertanggungjawab atas defisit yang terjadi dalam bidang pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, meskipun sistem pendidikan ini sukses mencetak golongan kecil elite yang berkualifikasi sangat tinggi. Hubungan antara status sosial dan keberhasilan sekolah sangatlah menandai sistem pendidikan ini. Adalah menjadi tugas pokok pemerintahan Partai Buruh untuk mereformasi dan mengembangkannya. Sementara ini, investasi negara secara signifikan dilakukan di sektor pendidikan, juga berbagai kebijakan kontroversial seperti pemberlakuan biaya studi.

Kesimpulan : Sejak akhir 1990an, Britania Raya cenderung berkembang menuju Sosial Demokrasi. Tujuan Partai Buruh adalah memberikan partisipasi bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut bisa dicapai terutama ketika masyarakat memiliki pekerjaan. Ketahanan sosial tidak untuk pencapaian tertinggi melainkan secara terarah pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pada saat yang sama, pelayanan sosial dari negara perlu diimbangi oleh kinerja dan upaya kemandirian penerima layanan.

Sebuah pertumbuhan ekonomi yang stabil serta kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif, di satu sisi, telah meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan, pada sisi lainnya hal tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, akibat masih relatif tingginya angka kemiskinan, pelayanan sosial yang terbatas serta tidak meratanya kesempatan pendidikan, Britania Raya masih diklasifikasi sebagai sosial demokrasi inklusif rendah, berada pada garis batas sosial demokrasi.

Bacaan lanjut :

Christian Krell (2006), *Laggard or Leader – der britische Sozialstaat im Spiegel der Sozialen Demokratie*, in: Thomas Meyer (Hg.), *Praxis der Sozialen Demokratie*, Wiesbaden, S. 130–241.

Alexander Petring (2006), *Großbritannien*, in: Wolfgang Merkel u. a. (Hg.), *Die Reformfähigkeit der Sozialen Demokratie*, Wiesbaden, S. 119–153.

Persentase lapangan kerja 2006	71.5 %	Jumlah pekerja (usia 15–64) dibandingkan total penduduk (Sumber: Eurostat)
Persentase pekerja perempuan 2006	65.8 %	Jumlah pekerja perempuan (usia 15–64) dibandingkan total penduduk perempuan (sumber: Eurostat)
Persentase pengangguran 2006	5.3 %	Jumlah penganggur dibandingkan total pekerja (sumber: Eurostat)
Persentase penganggur jangka panjang 2006	1.2 %	Jumlah mereka yang lama menganggur (12 Bulan atau lebih) dibandingkan jumlah total pekerja (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan/ gini-koefisien 2006	36 %	Tanda-tanda distribusi pendapatan yang timpang, lebih tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan (Sumber: Human Development Report 2006)
Indeks kemiskinan 2006	14.8 %	Index kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (Harapan hidup, tingkat buta aksara, akses terhadap lembaga kesehatan ...), 0 = min. Kemiskinan, 100 = max. Kemiskinan (Sumber: Human Development Report 2006)
Pendidikan: hubungan sukses pendidikan dgn latarbelakang sosial-ekonomi 2006	13.9 %	Jumlah, perbedaan prestasi antara murid berdasarkan latar belakang social-ekonomi. (Sumber: OECD, PISA-Studie 2006)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	29.3 %	Jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat buruh (Sumber: J. Visser [2006] Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, 38–49)

5.3. Jerman

Oleh Christoph Egle

Berlatar belakang kondisi ekonomi-politik Jerman usai Perang Dunia II, kisah Republik Federal Jerman²⁰ boleh dibilang sebagai „kisah sukses“ sosial demokrasi. Pasca kekuasaan Nazi, terdapat keraguan, luas apakah Jerman mampu untuk kembali menjadi negara demokratis dan damai. Namun, kini keraguan terhadap stabilitas demokrasi dan konsolisainya di dalam masyarakat sipil telah pupus. Demokratisasi negara dan masyarakat merupakan sebuah proses, yang terobosannya baru berhasil pada akhir tahun 1960an. Aib kekuasaan Nazi dan kegagalan Republik Weimar, hingga kini, masih membekas dalam budaya politik Jerman. Salah satu ciri khas Jerman adalah meninggalkan dengan sukarela retorika nasionalitis dan keraguan yang mendalam terhadap segala jenis ekstrimisme. Sebaliknya, pencarian konsensus dan menemukan „jalan tengah“ menjadi moral Jerman yang penting.

Selain sukses melakukan re-demokratisasi setelah 1945 serta, keajaiban ekonomi (Wirtschaftswunder)nya, Republik Federal Jerman (RFJ) untuk kurun waktu yang lama, menjadi model bagi negara industri Barat. Status Jerman ini dimungkinkan oleh kombinasi unik antara kemampuan ekonomi, stabilitas politik dan keseimbangan sosial. Partai Sosial Demokrat Jerman (Barat) juga mengidentifikasi dirinya dengan tatanan sosial dan ekonomi Republik Federal Jerman, dan menganggap konsep politisnya terrealisasi dalam tatanan sosial dan ekonomi RFJ. Karena itu, dalam pemilihan nasional 1976, Partai Sosial Demokrat Jerman (Barat) mempromosikan „Model Jerman“. Namun, se usai reunifikasi Jerman (barat dan timur), bermunculan berbagai tanda bahwa Jerman menjadi kurang pas lagi untuk menjadi panutan. Alasannya, Republik Federal Jerman ketinggalan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang patut diperhatikan adalah kenyataan, bahwa sebagian dari faktor yang hingga sampai tahun 1980an menjadi ciri „Model Jerman“ dan kesuksesannya menjadi catatan, pada tahun 1990an diidentifikasi sebagai alasan „kemerosotan“ Jerman. Ini menyangkut sistem pemerintahan, yang memperlambat penyesuaian terhadap kondisi ekonomi (globalisasi) dan struktur Negara Kesejahteraan tertentu, yang di beberapa sektor terbukti sebagai penghambat penciptaan lapangan kerja (terutama bagi pihak yang berkualifikasi rendah dan kaum perempuan). Sebagai hal yang menguntungkan adalah kehadiran UUD yang semula dirancang sebagai UUD untuk masa transisi.

20) Karena alasan tempat, maka perkembangan di Jerman Timur tidak dapat dibahas.

Sejarah keberhasilan sosial demokrasi?

„Model Jerman“

Hak kebebasan negatif dan positif dalam konstitusi

Sistem Hak-Hak Dasar Dalam Konstitusi : Belajar dari kegagalan Republik Weimar, maka 20 pasal pertama UUD Jerman memuat hak-hak non-kenegaraan, berupa hak-hak kebebasan politik dan HAM, yang intinya tidak dapat dirubah oleh parlemen. Termasuk, apa yang disebut sebagai hak-hak menangkis yang liberal terhadap intervensi negara ke dalam wilayah pribadi (hak-hak kebebasan negatif) dan juga hak-hak berpartisipasi yang secara demokratis (hak-hak kebebasan positif). Hak-hak sosial seperti pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan atau upah minimum tidak disebutkan dalam UUD Jerman. Akan tetapi hak-hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi beberapa negara bagian. UUD Jerman tidak mengamanatkan sistem ekonomi secara kongkrit. Namun didalamnya disebutkan rambu-rambu baik terhadap kapitalisme pasar tanpa kendali maupun terhadap ekonomi terencana yang sosialis. Maka, sebagai contoh Pasal 14 UUD RFJ menyebutkan penjaminan hak milik dan hak warisan. Namun bersamaan dengan itu, juga dituntut agar penggunaan hak milik itu „sekaligus mengabdikan bagi kesejahteraan umum“. Tuntutan ini ditemui dalam konsep „ekonomi pasar sosial“, yang terwujud secara dalam keseharian politik.

Tuntutan tinggi dalam pembagian dan pembatasan kekuasaan

Sistem Politik : Sistem politik RFJ dibangun sedemikian rupa, sehingga menutup kemungkinan terjadinya kegagalan demokrasi. Untuk itu, dipasang pagar pengaman yang tinggi dalam menetapkan pembagian dan persilangan kekuasaan. Begitu ketatnya kekuasaan bertindak eksekutif, yang jarang diketemukan di dunia demokrasi lainnya. Perlu dikemukakan juga, misalnya federalisme dan partisipasi negara-negara bagian dalam pembentukan UU Federal (lewat *Bundesrat*, Dewan Perwakilan Pemerintahan Daerah), perkasanya kedudukan Mahkamah Konstitusi, dan kemandirian kedudukan Bank Sentral Federal (kini menjadi Bank Sentral Eropa), satu paket tugas pengendalian negara bagi kelompok masyarakat dan akhirnya partisipasi mitra sosial dalam administrasi sistem asuransi sosial. Karena berbagai „belunggu“ yang mengikat kekuasaan negara itu, maka pakar ilmu politik AS, Peter Katzenstein, menyebut, bahwa RFJ tergolongkan „negara semi berdaulat“. Perlulah disimak, bahwa sampai tahun 1990 pun, secara politik luar negeri, Republik Federasi Jerman juga tak sepenuhnya berdaulat.

Paksaan institusional yang tertanam untuk berkompromi dengan berbagai kelompok kepentingan itu ternyata tidak merugikan Republik Federal Jerman. Sistem pemerintahan pun menunjukkan tingginya efisiensi dan keterwakilan. Parlemenarisme terbukti cukup terbuka buat menyerap perkembangan masyarakat, seperti berdirinya berbagai partai politik baru sekaligus memungkinkan pembentukan pemerintahan yang stabil.

Dalam pembentukan UU, masukan eksternal diikutisertakan. Secara reguler, lewat pendapat dari wakil kelompok-kelompok kepentingan didengar. Namun, peran utama dalam pembentukan kehendak, berada di tangan partai politik. Misalnya, dalam hal pengisian pos-pos jabatan publik partai-partai politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara. Selain berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan federal, partai-partai politik terlibat dalam pembentukan 16 negara bagian. Karena itulah, partai-partai itu tidak dapat digolongkan hanya sebagai partai pemerintah atau sebagai partai oposisi. Ini terutama berlaku bagi kedua partai massa yang besar (Partai Sosial Demokrat SPD dan Partai Kristen CDU/CSU), sehingga Republik Federal Jerman selalu berada di bawah bayang-bayang suatu „koalisi besar“, formal dan informal. Khususnya dalam politik ekonomi dan sosial, paksaan untuk bekerjasama ini menyebabkan penempuhan „politik jalan tengah“ (Manfred G. Schmidt), yang dengan mulus menyisip ke dalam budaya politik Jerman seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya.

Kombinasi antara persaingan partai-partai dengan sistem pemerintahan federal, bahwa berbagai motif dan taktis politik kepartaisan, bisa mengakibatkan terhambatnya keputusan-keputusan penting atau tercapainya kompromis yang tidak optimal. Kasus-kasus tersebut kerap terjadi setelah tahun 1990, ketika pasca reunifikasi Jerman, jumlah pelaku federalis bertambah dan kurang sigapnya melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam menghadapi lajunya globalisasi. Orientasi stabilitas sistem politik, yang selama itu merupakan faktor kesuksesan, menjadi masalah karena orientasi ini berkecenderungan tidak mau berubah. Seiring dengan reformasi federalisme, maka sejak beberapa tahun terakhir, dicoba membangun kembali sistem ini, agar menjadi agak „ramah dalam pengambilan keputusan“

Politik Ekonomi : Jerman adalah sebuah negara yang mewakili apa yang disebut sebagai ekonomi pasar terkendali, di mana perusahaan mengambil modal kerjanya dari bank langganan, berbeda dengan ekonomi pasar liberal yang mengambilnya dari pasar modal. Saling ketergantungan antara industri dan perbankan ini, adalah karakter utama apa yang disebut „Kapitalisme Rhein“. Berbasis „modal yang tenang“ ini, keputusan perusahaan berorientasi jangka panjang dibandingkan perusahaan yang berbasis „shareholder value“ yang lebih berorientasi jangka pendek. Hal yang juga menjadi ciri khas „*German Corporation*“ adalah keterlibatan sistemik para pekerja dalam kepemimpinan perusahaan, baik dalam hal partisipasi satuan usaha „*betriebliche Mitbestimmung*“ (kesertaan menentukan dan menata tempat kerja, alur kerja, urusan personal) maupun partisipasi dalam

Peran sentral
partai politik

Kekuatan dan ke-
mahan orientasi
stabilitas Jerman

“Model kapita-
lisme Rhein“

Terlibat
pengambilan
keputusan dan
otonomi tarif

perusahaan besar „*Unternehmensmitbestimmung*“ (lewat wakil-wakil karyawan yang duduk di dewan komisaris pada perusahaan terbatas, termasuk perusahaan terbatas yang besar lainnya). Partisipasi tersebut, terasa tepat sebab hubungan sosial pada dasarnya dibentuk oleh kerjasama semua mitra yang terlibat. Tingkat upah tunduk di bawah tawar-menawar antara pihak majikan dengan karyawan (tarif otonomi), yang terorganisir luas sampai di tingkat perkumpulan nasional. Dibandingkan secara internasional, konflik kerja jarang terjadi di RFJ dan kalau pun ada, seringkali hanya berlangsung dalam jangka pendek.

Sejak beberapa tahun, model ekonomi pasar terkoordinasi menampakkan gejala pelarutan. Sebagian sebagai akibat globalisasi atau dalam kaitan ini tumbuh keinginan perusahaan Jerman untuk lebih intensif berpartisipasi ke dalam pasar uang. Alasan lain adalah terjadinya erosi hubungan tarif dan sosial, karena baik serikat buruh maupun asosiasi majikan kehilangan daya organisatoris dan dengan sendirinya kemampuan koordinasi.

Negara
kesejahteraan
(sosial) konservatif-
korporatif

Negara Kesejahteraan : Republik Federal Jerman adalah contoh model dari apa yang disebut sebagai negara sosial korporatif yang konservatif, yang juga dijuluki „Kristen demokratis“ atau „tipe Bismarck“. Istilah ini menjelaskan, bahwa negara kesejahteraan Jerman itu terutama bukan produk kaum sosial demokrat, melainkan secara historis kelahirannya dibidani terutama oleh kubu konservatif dan kristen demokrat. Seusai perang dunia II, negara kesejahteraan dikembangkan oleh dua partai, yaitu Uni Partai Kristen CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat SPD.

Tingginya (ong-
kos) gaji dan biaya
sampingan

Meski memperoleh penghasilan besar, namun negara kesejahteraan Jerman tidak sepenuhnya ditandai oleh distribusi kekayaan secukupnya sehingga masih saja terlihat adanya kesenjangan sosial. Contohnya, perbedaan sistem pelayanan dan asuransi sosial bagi kelompok profesi yang berbeda. Kewajiban berasuransi sosial umum hanya diberlakukan kepada karyawan. Sebaliknya, kelompok usahawan dan pegawai negeri dapat secara pribadi mengsuransikan dirinya terhadap resiko sosial atau bernaung di bawah sistem pengadaan khusus (umpamanya pensiun pegawai negeri).

Pusatnya negara kesejahteraan Jerman berada pada sistem jaminan sosial yang melembaga secara independen. Sistem ini didanai oleh kewajiban iuran pihak majikan dan karyawan. Bila dibutuhkan atau secara tetap (misalnya asuransi pensiunan), sistem ini memperoleh dana tambahan dari anggaran belanja negara federal. Karena biaya negara kesejahteraan itu terutama membebani upah dan

akibatnya memperlambat faktor produktif kerja, maka jenis pendanaan serupa ini terbukti menjadi penghambat terciptanya lapangan kerja, terutama di bidang jasa yang padat karya. Jasa asuransi itu pada dasarnya berorientasi kepada prinsip ekuivalen. Artinya, semakin lama seorang karyawan membayar iuran atau semakin tinggi penghasilan seorang karyawan, kian tinggi pula perolehan dari jasa tersebut. Pemusatan orientasi pada penghasilan dari negara kesejahteraan ini menjadi problematis bagi yang bermata pencaharian kurang stabil, karena dengan demikian mereka hanya dapat memperoleh perlindungan sosial secara terbatas.

Pensiun: Kas asuransi pensiun ketetapan UU mengucurkan dana pensiun yang berstandarkan sekitar 70% upah netto rata-rata. Dengan diberlakukannya reformasi pensiunan belum lama ini, secara jangka panjang besarnya pensiunan ini akan diturunkan menjadi 50%, Untuk mengimbangi penurunan ini, lewat tunjangan negara dan keringanan pajak, para karyawan dirangsang menambah iuran dana pensiunan. Jika hak pensiun yang diterima itu berada di bawah tingkat tunjangan sosial, maka tunjangan jaminan hidup berdasarkan kebutuhan dasar, turut membantu.

Asuransi Pengangguran: Jerman mengenal dua jenis tunjangan pengangguran. Tergantung pada status perkawinan, besarnya tunjangan pengangguran I adalah 60 sampai 67% upah yang diperoleh sebelumnya. Lamanya pembayaran tunjangan pengangguran ini 6 sampai 24 bulan, tergantung pada lamanya pelunasan iuran dan usia sang penerima tunjangan. Jika masa penerimaan tunjangan pensiunan telah habis, maka dapat diajukan permohonan untuk memperoleh tunjangan pengangguran II. Tunjangan pengangguran II ini didanai oleh pajak. Berbeda dengan tunjangan pengangguran I, besarnya tunjangan pengangguran II setara dengan tunjangan sosial. Untuk memperoleh tunjangan pengangguran II atau tunjangan sosial (bagi yang tak bisa bekerja) perlu uji kemiskinan. Selain itu, dari pihak pemohon yang mampu bekerja dituntut dan diuji kesediaannya untuk kembali bekerja. Lewat hak atas jasa pemeliharaan ini, maka dijaminlah eksistensi minimum secara sosio-kultural bagi setiap orang.

Sistem Jaminan Kesehatan : Sistem jaminan kesehatan: Dalam perbandingannya secara internasional, jasa asuransi kesehatan ketetapan UU GKV (*gesetzlichen Krankenversicherung*) dinilai baik. Hanya saja, dalam perbandingannya, sistem ini mahal. Anak-anak dan salah seorang pasangan suami isteri yang tak bekerja secara cuma-cuma ikut asuransi orangtuanya atau ikut asuransi pasangan yang bekerja. Penerima tunjangan sosial dengan sendirinya anggota asuransi

Pensiun

Asuransi Pengangguran

Sistem jaminan kesehatan

Bacaan lanjut :

Christoph Egle (2006), Deutschland: der blockierte Musterknabe, in: Thomas Meyer (Hg.), Praxis der Sozialen Demokratie, Wiesbaden, S. 273–326.

Peter J. Katzenstein (1987): Policy and Politics in West Germany. The Growth of a Semisovereign State, Philadelphia.

Manfred G. Schmidt (2007), Das politische System Deutschlands,

kesehatan GKV. Mereka yang berwiraswasta, pegawai negeri dan karyawan berpenghasilan tinggi dibebaskan dari kewajiban mengikuti asuransi kesehatan, namun secara pribadi bisa menjadi anggota asuransi swasta (kerap dengan persyaratan keanggotaan yang menguntungkan).

Sistem Jaminan Pendidikan : Sistem pendidikan merupakan kewenangan tunggal masing-masing negara bagian. Akibatnya, terlihat jelas perbedaan regional dalam struktur dan kualitas. Sementara beberapa negara bagian dapat menyusul kelompok top internasional, kepintaran murid di negara bagian lainnya berada di bawah standar kepintaran rata-rata OECD. Dalam perbandingannya secara internasional, jarang terdapat di negara-negara lain di mana keberhasilan pendidikannya sangat tergantung pada asal-usul sosial murid-murid seperti yang terjadi di Jerman. Artinya, amanat persamaan kesempatan di Jerman itu nyaris tidak terpenuhi. Dalam perbandingannya secara internasional, Jerman masih merupakan panutan dalam hal dual-sistem pendidikan kejuruan kendati selalu terjadi pengurangan penawaran tempat-tempat untuk pemagangan. Dengan sistem pendidikan dual ini dimungkinkan terbentuknya kualifikasi profesi yang akrab dengan satuan usaha dan bersamaan dengan itu pengaitannya dengan kewajiban bersekolah yang memberikan pengetahuan umum.

Kesimpulan : Dalam tempo yang lama „model Jerman“ dianggap sebagai model, dan hingga tahun 1970an mengalami masa sosial demokrasi yang berinklusif tinggi. Berkaitan dengan penyesuaian akibat reunifikasi Jerman dan globalisasi, Jerman kehilangan kedudukan puncak ini. Sejak itu, Jerman dikategorikan sebagai sosial demokrasi inklusif menengah. Alasan penting penyebab merosotnya kedudukan Jerman adalah, dalam persaingan internasional pendanaan negara kesejahteraan terbukti merugikan. Dan dalam waktu yang wajib dimanfaatkan untuk melakukan reformasi yang perlu terhadap sistem politik berorientasikan stabilitas itu, terulur-ukur tidak dapat diputuskan. Sejak pertengahan tahun 1990, pemerintahan Helmut Kohl, kemudian juga pemerintahan Schroeder setelah melepaskan keragu-raguannya, mencoba memperkuat daya saing sistem ekonomi Jerman lewat perombakan dan pembongkaran negara kesejahteraan serta melakukan penyesuaian sistem jaminan sosial terhadap penuaan usia masyarakat dan perubahan struktur keluarga. Reformasi-reformasi tersebut di atas sebagian berhasil diterapkan dengan menghapadapi perlawanan gigih masyarakat dan reformasi-reformasi tersebut kemungkinan menjadi persyaratan kembalinya peningkatan taraf penciptaan lapangan kerja. Tinggal dinantikan dan disaksikan, apakah pada masa-masa mendatang, Jerman bisa mengarah kembali ke sosial demokrasi inklusif tinggi.

Persentase lapangan kerja 2006	67.5 %	Jumlah pekerja (usia 15–64) dibandingkan total penduduk (Sumber: Eurostat)
Persentase pekerja perempuan 2006	62.2 %	Jumlah pekerja perempuan (usia 15–64) dibandingkan total penduduk perempuan (sumber: Eurostat)
Persentase pengangguran 2006	9.8 %	Jumlah penganggur dibandingkan total pekerja (sumber: Eurostat)
Persentase penganggur jangka panjang 2006	5.5 %	Jumlah mereka yang lama menganggur (12 Bulan atau lebih) dibandingkan jumlah total pekerja (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan/ gini-koefisien 2006	28.3 %	Tanda-tanda distribusi pendapatan yang timpang, lebih tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan (Sumber: Human Development Report 2006)
Indeks kemiskinan 2006	11.3 %	Index kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (Harapan hidup, tingkat buta aksara, akses terhadap lembaga kesehatan ...), 0 = min. Kemiskinan, 100 = max. Kemiskinan (Sumber: Human Development Report 2006)
Pendidikan: hubungan sukses pendidikan dengan latar belakang sosial-ekonomi 2006	19 %	Jumlah, perbedaan prestasi antara murid berdasarkan latar belakang social-ekonomi. (Sumber: OECD, PISA-Studie 2006)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	22.6 %	Jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat buruh (Sumber: J. Visser [2006] Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, 38–49)

5.4. Jepang²¹

Oleh Eun-Jeung Lee

Jepang, kasus khusus

Dalam diskusi akademik, jarang ditemui satu negara, yang begitu berbeda karakterisasinya seperti halnya Jepang. Begitu luasnya rentangan gambaran Jepang, terutama yang berkaitan dengan negara dan masyarakat kesejahteraan – mulai dari „regim kesejahteraan liberal-konservatif yang kuat dinafasi oleh jiwa sosial-demokrat“ sampai ke „masyarakat tanpa kelas dalam artian marxis“.

Rendahnya kuota negara sosial

Keadaan di Jepang ini tak dapat dirangkum menjadi satu seperti yang biasa dilakukan. Di sana, sejak tahun 1955 dengan interupsi antara 1993-1994, Partai Konservatif LDP (*Liberal Democratic Party*), selalu mengisi pos jabatan kepala pemerintahan (Perdana Menteri). Dalam skala negara-negara industri peringkat atas, pengeluaran dana sosial Jepang berada di jajaran bawah. Pada tahun 2005, dengan pengeluaran sosial sebesar 22,9 % dibandingkan negara-negara OECD (rata-rata 24,4%), Jepang terbilang berada di rangking bawah, jauh di bawah Jerman (31,1%) atau Swedia (33,6%). Persentase sosial mendeskripsikan perbandingan pengeluaran sosial terhadap penghasilan kotor (GDP) sebuah negara.

Prestasi tinggi sistem jaminan sosial

Namun, pada saat yang sama, tingkat harapan hidup - terutama kaum perempuannya - tergolong paling tinggi didunia, Begitu pula dengan angka kematian bayi yang sangat rendah serta distribusi penghasilan yang relatif merata. Semua hal tersebut, berbicara tentang keberhasilan sistem pengamanan sosial di Jepang. Selain itu, berdasarkan jajak pendapat, 90% rakyat Jepang merasa dirinya sebagai bagian dari kelas menengah.

Berdasarkan berbagai fakta yang ada, diperlukan kecermatan yang luar biasa dalam menggeluti Jepang. Kerap berbagai diskusi tentang Jepang diringkas menjadi pertanyaan yang dikotom: Apakah Jepang itu unik ataukah tidak? Jawabannya hanya bisa „Ya-tidak“. Di Jepang ditemui berbagai unsur, baik yang unik maupun yang bisa diperbandingkan. Di Jepang, tak ada alternatif yang saling menegasikan, melainkan saling berdampingan.

21) Teks ini berangkat dari karya Eun-Jeung Lee (2006) demokrasi sosial di Jepang. Unsur-unsur sosial demokrasi dalam sistem Jepang, dalam Thomas Meyer (Penerbit), *Praxis der Sozialen Demokratie*, Wiesbaden, hal. 374–444, dan dirubah hanya pada beberapa bagian.

Sistem Politik : Pada hakekatnya sistem politik Jepang adalah demokrasi parlementer. Di satu pihak, hak-hak dasar warga dijamin oleh UUD 1947, di lain pihak persaingan kekuasaan politik dan proses pembuatan keputusan partai-partai politik menjadi landasan. Umumnya, perkembangan sistem politik sesuai Perang Dunia II dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama (1945-1955) dinilai sebagai masa pembangunan sesuai perang. Fase kedua (1955-1993) umumnya disebut sebagai masa „Sistem 55“, sementara fase ketiga (setelah 1993) dinilai sebagai masa reformasi politik.

Penyebutan „Sistem 55“ itu berasal dari kenyataan, bahwa kedua pilar sistem ini, yakni partai konservatif LDP dan partai sosialis Jepang didirikan pada tahun 1955. Pada tahun 1955 itu, bukan hanya Jiyutō dan Minshutō melebur ke partai konservatif, namun juga sayap kanan dan kiri sosialis Jepang menyatu ke dalam Partai Sosialis Jepang. Tadinya diharapkan, dari sana tumbuh sistem dwikepartaian seperti di Inggris. Sepanjang tahun 1960an, berlangsung sebuah sistem yang dikuasai oleh satu partai belaka. Sebuah sistem yang mirip dengan hegemoni Partai Sosial Demokrat di Swedia, Partai Kristen Demokrat di Italia dan Partai Kongres di India.

Sejak 1955, dengan pengecualian jeda selama sepuluh bulan yakni antara Agustus 1993 sampai Juni 1994, Partai konservatif Jepang mendominasi keputusan-keputusan di parlemen dan mengisi pos jabatan Perdana Menteri.

Konstitusi dan Sistem Hak-Hak Dasar : UUD 1947 yang diterapkan oleh otoritas pendudukan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, mulai diberlakukan tanggal 3 Mei 1947. UUD ini sangat progresif. Di samping pasal 9 yang melarang remilitarisasi Jepang, UUD ini memuat pasal 25 yang berbunyi :

Setiap warga berhak atas hidup yang sehat dan yang beradab secara layak. Dalam semua bidang kehidupan, negara harus berupaya untuk membangun dan memperbanyak kesejahteraan sosial, jaminan sosial dan kesehatan umum.

Lebih dari itu, pasal 27 UUD mengatakan: „setiap warga hendaknya berhak atas pekerjaan dan berkewajiban bekerja.

Perkembangan sistem politik dalam 3 fase

Dominannya sebuah partai konservatif

„Konstitusi progresif“

Mahkamah tinggi sebagai lembaga hukum tertinggi di Jepang telah berulang kali berfatwa, bahwa Pasal 25 tidak memuat hak menggugat, tapi dipahami sebagai bagian dari program. Karenanya, kewajiban sosial negara menjadi landasan bagi negara dan masyarakat.

Dengan mengukuhkan hak atas pekerjaan dan hak atas hak-hak dasar sosial dalam UUD, maka negara Jepang berkewajiban membuat kebijakan penciptaan lapangan kerja dan negara kesejahteraan. Dengan demikian, pengamanan dan penciptaan lapangan kerja menduduki posisi penting dalam sistem kesejahteraan Jepang, sementara sistem jaminan sosial seperti jaminan pensiun, kesehatan, perawatan dan pengangguran secara kenegaraan haruslah ditopang oleh keuangan negara yang solid.

Politik Ekonomi: Jepang termasuk negara dengan ekonomi pasar terkoordinasi. Hanya saja, koordinasinya berlangsung di dalam aringan perusahaan-perusahaan. Perusahaan di Jepang kerap terdiri dari berbagai kelompok lintas sektor atau perusahaan keluarga. Kelompok perusahaan ini disebut „keiretsu“.

Sistem pendidikan/pelatihan serta prosedur teknologi transfer, juga diorganisir dalam struktur „keiretsu“. Para karyawan didorong untuk memiliki keahlian spesifik sesuai kebutuhan kelompok perusahaan dan sebagai imbalannya mereka boleh berharap bekerja seumur hidup. Begitu pula berbagai serikat buruhnya terorganisir terkait dengan perusahaan, di mana para karyawannya memiliki hak-hak ikut berbicara dalam urusan perusahaan.

Perusahaan-perusahaan Jepang didanai oleh kredit perbankan berjangka panjang, sehingga memungkinkan kepastian berencana yang relatif tinggi dan dengan sendirinya dapat memusatkan diri pada perkembangan perusahaan secara jangka panjang.

Segara usai Perang Dunia II hingga tahun 1960an, negara memprioritaskan politik pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja. Setelah ditekan oleh aksi-aksi politik sosial yang progresif dari kepala-kepala daerah komunis dan sosial demokrat, akhir 1960 dan awal 1970 pemerintahan konservatif Jepang mulai membangun sistem sosial yang menyeluruh. Sehubungan dengan krisis minyak, laju ekspansi politik sosial yang besar sampai saat itu diperlambat pada pertengahan tahun

1970an, meski tanpa memutar balik haluan. Mitra-mitra sosial dan para pelaku negara sepakat, bahwa politik pasar kerja yang aktif harus dikembangkan menghadapi kian terajutnya jalinan ekonomi dunia beserta ancamannya.

Dalam kerangka politik pasar kerja yang aktif, diterapkan berbagai kebijakan seperti subsidi upah, kredit segera, bantuan keuangan buat pendidikan lanjut/pelatihan. Kesuksesan politik sampai paruh kedua tahun 1990an ini dapat dilihat dari ekspansi lapangan kerja dan sangat rendahnya tingkat pengangguran. terutama lewat keseimbangan sosial atau integrasi sosial yang diraih dengan tindakan-tindakan politik pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Negara Sosial: Meskipun dalam pasal 25 UUD Jepang termaktub kehadiran negara sosial, dan meskipun akibat amanat konstitusi, maka sudah sejak tahun 1947. dilakukan reformasi di berbagai bidang UU dan pengesahan UU baru, namun dibandingkan dengan dinamika ekonominya, Jepang tergolongkan ke dalam negara sosial yang terlambat. Lagipula, dibandingkan dengan negara OECD, persentase jasa sosial terhadap pendapatan nasional brutto Jepang selalu berada di tingkat bawah. Namun, pengamatan terhadap jasa sosial negara hanya mencakup sebagian jasa sosial kenegaraan. Karena, di Jepang, jasa sosial perusahaan sangatlah luas. Jasa sosial perusahaan ini minimal mencakup 10% pendapatan nasional brutto. Per karyawan dan per bulannya, rata-rata perusahaan mengeluarkan biaya iuran sosial sesuai ketentuan UU sebesar 570 Euro dan, hampir 1.000 Euro untuk jasa sosial perusahaan.

Selain itu, sistem negara kesejahteraan Jepang tidak hanya melulu didanai lewat transfer jasa sosial kenegaraan kepada setiap warganya, namun terutama lewat keseimbangan sosial atau integrasi sosial yang diraih dengan tindakan-tindakan politik pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Pensiun :Lewat reformasi 1973, jasa pensiun yang terkumpul dalam pensiunan karyawan bagi kelompok yang disebut sebagai pensiunan yang terpinggirkan, dinaikkan menjadi 45% upah rata-rata, dan dikaitkan dengan indeks biaya hidup.Namun dengan adanya reformasi pensiunan tahun 1985, iuran pensiunan dinaikkan secara bertahap dan jasa pensiunan diturunkan. Reformasi ini dimaksudkan buat menghadang proses penuaaan masyarakat Jepang sampai hingga 2025. Selain itu, asuransi pensiunan rakyat diterapkan sebagai asuransi wajib yang iurannya harus dilunasi oleh segenap warga Jepang.Asuransi pen-

Kebijakan aktif
dari pasar kerja

Bantuan sosial
perusahaan yang
komprehensif

Pensiun

Persentase lapangan kerja 2006	70 %	Jumlah pekerja (usia 15–64) dibandingkan total penduduk (Sumber: Eurostat)
Persentase pekerja perempuan 2006	58.8 %	Jumlah pekerja perempuan (usia 15–64) dibandingkan total penduduk perempuan (sumber: Eurostat)
Persentase pengangguran 2006	4.1 %	Jumlah penganggur dibandingkan total pekerja (sumber: Eurostat)
Persentase penganggur jangka panjang 2006	1.4 %	Jumlah mereka yang lama menganggur (12 Bulan atau lebih) dibandingkan jumlah total pekerja (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan/ gini-koefisien 2006	24.9 %	Tanda-tanda distribusi pendapatan yang timpang, lebih tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan (Sumber: Human Development Report 2006)
Indeks kemiskinan 2006	11.7 %	Index kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (Harapan hidup, tingkat buta aksara, akses terhadap lembaga kesehatan ...), 0 = min. Kemiskinan, 100 = max. Kemiskinan (Sumber: Human Development Report 2006)
Pendidikan: hubungan sukses pendidikan dgn latarbelakang sosial-ekonomi 2006	7.4 %	Jumlah, perbedaan prestasi antara murid berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi. (Sumber: OECD, PISA-Studie 2006)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	19.7 %	Jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat buruh (Sumber: J. Visser [2006] Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, 38–49)

siunan rakyat ini untuk menjamin Pengamanan Kebutuhan Dasar. Besar uang pensiunan rakyat tahun 2000 itu sekitar 440 Euro per bulan. Tahun 2001, 98% warga Jepang berusia di atas 65 tahun memperoleh uang pensiunan rakyat. Umumnya ditambah uang pensiunan perusahaan sekitar 800 Euro atau pesangon yang bisa mencapai 64 upah bulanan jika usia pensiunan perusahaan diraih. Besar uang pensiunan rakyat tahun 2000 itu sekitar 440 Euro per bulan. Tahun 2001, 98 % warga Jepang yang berusia di atas 65 tahun memperoleh uang pensiunan rakyat. Umumnya kemudian ditambah uang pensiunan perusahaan sekitar 800 Euro atau pesangon yang bisa mencapai 64 upah bulanan jika usia pensiunan perusahaan diraih.

Sistem Kesehatan: Sistem kesehatan berangkat dari prinsip universalitas dan negara menjaminkannya melalui program-program bantuan kesehatan, yang juga bisa dinikmati oleh orang-orang miskin yang tidak terasuransi. Reformasi asuransi kesehatan karyawan tahun 1984 mewajibkan andil pribadi 10%, yang kemudian dinaikkan menjadi 20 hingga 30%. Dengan demikian terjadi penyesuaian asuransi kesehatan karyawan terhadap asuransi kesehatan nasional. Dalam asuransi kesehatan nasional ini tergabung kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota asuransi kesehatan karyawan seperti wiraswasta, petani, karyawan usaha kecil beserta anggota keluarganya. Untuk asuransi kesehatan nasional telah lama diberlakukan 30% andil pribadi.

Sistem Pendidikan: Di negara kesejahteraan Jepang, pendidikan memiliki kedudukan penting. Tahun 2001, se usai menyelesaikan kewajiban bersekolah sembilan tahun, 93,9% penduduk Jepang meneruskannya ke sekolah tinggi berjenjang 3 tahun. Jika sekolah (jarak jauh) dan sekolah malam disertakan, maka persentasenya ini naik menjadi 97,3%. Kendati demikian, dibandingkan secara internasional, anggaran belanja negara untuk pendidikan terbilang sangat rendah. Pada tahun 1999, dibandingkan dengan Produk Domestik Brutto, hanya mencapai 3,5%. Menurut Kementerian Pendidikan Jepang, 77,5% universitas di Jepang, milik swasta.

Kesimpulan : Di Jepang, ditemui semua unsur sosial demokrasi. Meskipun demikian, berbeda dengan negara-negara lain yang dijadikan penelitian, sosial demokrasi ini lahir tanpa kehadiran partai sosial demokrat yang perkasa dan tanpa fondasi ideologis sosial demokratis. Sebaliknya kehadiran berbagai unsur tersebut berkat kesediaan para elite birokrasi, akademik dan politik, tak tergantung pada ideologi dan dogma ilmiah, guna memperoleh solusi yang dapat diterima,

termasuk kesediaan mengumpulkan dan mengolah segala informasi, gagasan dan konsep dari seluruh dunia.

Satu kelemahan sistem Jepang adalah, bahwa berbagai jasa di atas hanya boleh dinikmati oleh warganegara Jepang belaka. Sampai kini, negara tersebut tidak memiliki konsep dan penanganan yang praktis guna mengintegrasikan kelompok minoritas orang asing. Imigrasi tenaga-tenaga kerja telah lama berlangsung dan pada masa mendatang akan membengkak. Begitu juga masalah persamaan kesetaraan gender perlu mendapatkan perbaikan.

Masalah-masalah tersebut di atas merupakan awan gelap sosial demokrasi Jepang dengan sistem jaminan sosial yang dikembangkan secara menyeluruh dan berdaya. Dalam diskursus wacana politik, Reformasi sosial politis tahun 1980an ini tidak dipandang sebagai penghambat buat internasionalisasi dan globalisasi ekonomi Jepang. Memang, pada tahun 1990an asosiasi-asosiasi perusahaan menuntut, di samping deregulasi, perlu fleksibilisasi struktur-struktur tenaga kerja dan pengurus-tenaga-tenaga kerja inti, agar dapat tegar menghadapi masa-masa resesi dan semakin tajamnya persaingan global. Dalam wacana politis, pada kenyataannya, mereka tidak berhasil dalam tuntutan terkait pasar kerja. Sementara ini, asosiasi perusahaan menjauhkan diri dari tuntutan semula, bahkan menuntut perusahaan yang menjadi anggotanya dan negara, untuk lebih melibatkan diri dalam menangani lapangan kerja dan pendidikan/pelatihan. Berdasarkan ketersediaan jaminan sistem sosial yang baik dan berdaya di satu pihak, dan di pihak lain, terdapat sisi gelap serta berbagai masalah yang dihadapi, maka Jepang dapat digolongkan ke dalam sosial demokrasi inklusif menengah. Menariknya adalah, bahwa organisasi dari negara, model kesejahteraan dan ekonomi berbeda secara mendasar dari Jerman yang juga digolongkan ke dalam sosial demokrasi yang dikategorikan sebagai inklusif menengah.

Bacaan lanjut :

Eun-Jeung Lee
(2006), *Soziale
Demokratie in
Japan. Elemente
Sozialer Demokratie
im japanischen
System*, in: Thomas
Meyer (Hg.),
*Praxis der Sozialen
Demokratie*,
Wiesbaden,
S. 374–444.

5.5. Swedia

Oleh Erik Gurgsdies

Swedia, hingga kini, adalah negara yang berhasil membawa negara kesejahteraan tradisional - dengan prestasi mengamankan dana publik serta sektor pelayanan publik yang berfungsi baik - ke dalam masa globalisasi. Hingga saat ini, warga Swedia memperoleh pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas. Begitu pula dalam bidang pelayanan kesehatan yang hanya menarik sedikit biaya dari para warga yang membutuhkan. Sementara mereka yang menganggur, memperoleh tunjangan sebesar 80 % dari gaji yang diperoleh sebelumnya hingga waktu maksimal yang diperbolehkan undang-undang. Para lansia dijamin memperoleh tunjangan pensiunan, termasuk tunjangan pajak penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Mempertimbangkan bahwa dalam sektor publik, sepertiga penduduknya bekerja yang berarti menempati ranking tertinggi pengeluaran publik OECD dan pada awal 1990an negeri ini mengalami krisis ekonomi yang paling parah sejak *big depression*, timbul pertanyaan apa resep negara kesejahteraan Swedia (dibandingkan negara lain) agar bisa bertahan?

Salah satu yang menarik - berdasarkan budaya politik dan mentalitas masyarakat Swedia yang sejak lama diwarnai oleh gambaran tentang kesetaraan sosial – adalah sikap yang berangkat dari pola kehidupan keturunan suku bangsa “old-german” yang tak tercemarkan oleh (struktur) feodalisme yang memang relatif lemah. Selain itu, homogenitas sosio-kultural bisa pula menjadi penyebabnya. Terkait hal ini, kehidupan komunal yang relatif mandiri berperan sangat menentukan. Dalam sebuah negeri di mana meskipun desa dan kotanya berpecah agak jauh satu dengan lainnya, terdapat sebuah elemen perekat yaitu kemandirian pengelolaan birokrasi yang cukup mendalam. Sementara kerangka hukum yang sentralistis serta bantuan keuangan yang tepat sasaran membuat nyaris seragamnya standar hidup di setiap daerah.

Sistem Politik :

Dalam sistem politik Swedia, konsensus, perundingan dan integrasi memainkan peran penting. Dengan demikian, proses perundang-undangan diwarnai oleh keterlibatan institusional yang tinggi dari masyarakat sipil. Sebelum ada keputusan formal dari pemerintah, dibentuk sebuah komisi untuk meneliti permasalahan pokok. Ini-

Bertahannya
negara
kesejahteraan
tradisional

Homogenitas sosial-
kultural mewarnai
budaya politik

Konsensus dan integrasi mewarnai sistem politik

siatif untuk itu, biasanya datang dari pemerintah, namun bisa saja dari parlemen, pejabat negara atau juga kelompok-kelompok masyarakat. Komisi, sesuai hukum terdiri dari para politisi, para pakar dan perwakilan kelompok masyarakat sasaran, mengajukan sebuah usulan sikap yang menjadi basis diskusi. Apa yang disebut "Remiss-Verfahren" (cara-remis) ini, adalah gambaran sebuah masyarakat yang berorientasi musyawarah (kompromi dan konsensus).

Posisi dominan sosial demokrasi

Dalam konstelasi partai politik di Swedia, sosial demokrasi menempati posisi dominan sejak tahun 1930an. Waktu itu, dalam menghadapi resesi besar, berbeda dengan apa yang dilakukan arus besar ekonomi, sosial demokrasi memberikan kredit bagi penganggaran program padat karya publik berupa perbaikan infrastruktur serta kondisi perumahan para keluarga beranak banyak. „Di Eropa Barat, jalan-jalan ditutup untuk mengamankan protes. Di Swedia, dicarikan solusi yang menguntungkan semua pihak untuk melangkah maju“, tegas Tage Erlander yang beberapa kali menjabat PM Swedia tentang arah program pengadaan lapangan kerja. Keberhasilan program ini memacu meningkatnya hasil pemilihan umum bagi Partai Buruh Sosial Demokrasi (SAP), tetapi juga meningkatkan jumlah anggota SAP serta serikat buruh yang secara ideologis sejalan dengan SAP. Posisi dominan sosial demokrasi juga diperkuat oleh perpecahan kelompok-kelompok oposisi dari kubu konservatif-liberal. Biasanya, dalam pemilu dua kubu berhadap-hadapan, di satu sisi apa yang disebut "Blok Sosialis" yang terdiri dari sosial demokrasi, hijau dan kiri serta ex-euro-komunis, di sisi lain, apa yang disebut "Blok Borjuasi" terdiri dari kelompok konservatif, liberal, petani konservatif dan kristen demokrat. Kelompok terakhir ini, sejak 2006 membentuk pemerintahan. Kemenangan mereka di pemilu juga mematahkan mayoritas kelompok sosialis yang pro negara kesejahteraan.

Negatif dan positifnya hak-hak kebebasan dalam konstitusi

Konstitusi dan Sistem Hak-hak Dasar :

Konstitusi swedia tidak hanya memuat hak-hak kebebasan negatif tetapi sangat luas mengandung hak-hak kebebasan positif. Meskipun hak-hak dasar ekonomi-budaya, juga hak positif kebebasan tidak seperti hak dasar politik secara hukum dijamin, tapi keduanya menunjukkan arah yang dituju secara politik kemasyarakatan. Dalam konstitusi tercatat: „Kesejahteraan individual, ekonomi dan kultural orang per orang harus menjadi tujuan mendasar kegiatan (untuk) publik. Secara umum, terutama terkait jaminan hak atas pekerjaan, rumah dan pendidikan serta ketahanan sosial dalam kondisi kehidupan yang layak.“ Apakah dijamin secara hukum atau tidak, tetapi kenyataan bahwa dalam konstitusi

memperoleh tempat yang penting dan dipandang sebagai tujuan masyarakat, menempatkan hal tersebut pada kedudukan tinggi dalam kesadaran masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam konstruksi negara kesejahteraan Swedia serta kebijakan pasar bebas/ politik-ekonominya.

Ekonomi Politik :

Tahun 1950an, serikat buruh memperkenalkan model Rehn-Meidner. Model ini berangkat dari asumsi pemenuhan lapangan kerja tidak mungkin dilakukan lewat kebijakan Keynesian di mana semua permintaan di sektor perekonomian dilakukan dengan mempertahankan laju konjunktur (supply-demand) yang tinggi. Karena ekspansi setiap cabang ekonomi berjalan dengan tempo masing-masing, permintaan tinggi perekonomian dengan cepat akan menimbulkan kondisi darurat (berkekurangan) di sisi penawaran atau suplai. Hal ini menyebabkan peningkatan gaji di sektor-sektor ekonomi yang mengalami kondisi darurat dan pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga. Untuk jangka menengah, hal ini juga berdampak sama pada sektor-sektor lain. Secara umum, kondisi ini menurunkan kemampuan persaingan global.

Karena itu, untuk meredam laju permintaan di sektor perekonomian secara keseluruhan, perlu diupayakan penghasilan dari sektor publik terlepas dari siklus konjunktur. Hal ini dimanfaatkan untuk, pertama, mengurangi utang publik; kedua, membiayai sistem kesejahteraan publik dalam masyarakat yang warga lansianya semakin banyak; dan ketiga, untuk membatasi utang baru dalam sebuah kondisi krisis ekonomi.

Namun, sebuah perekonomian yang diredam laju permintaannya membahayakan semua perusahaan dan lapangan kerja yang memiliki produktivitas rendah yang artinya memproduksi dengan biaya tinggi. Kondisi ini ikut dipertajam oleh serikat buruh sejak berakhirnya Perang Dunia mengikuti apa yang disebut kebijakan gaji solidaritas. Sesuai prinsip, "gaji sama bagi pekerjaan yang sama" diharapkan cenderung bisa secara rata-rata meningkatkan produktivitas pekerjaan. Perusahaan yang memiliki produktivitas rendah/di bawah rata-rata, lewat tuntutan penggajian solidaritas serta berorientasi pada produktivitas rata-rata semakin terjebak dalam kesulitan biaya. Sebaliknya, perusahaan dengan produktivitas tinggi memperoleh keuntungan karena dalam kesepakatan gaji rata-rata menyisakan banyak keuntungan yang tidak perlu didistribusikan. Hal ini mengakibatkan apa yang disebut keuntungan

Model Rehn-
Meidner

Pentingnya Sek-
tor Publik

berlebihan, yang bila dilihat secara positif, bisa menjadi tambahan modal untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan tingkat produktivitas tinggi.

Artinya, yang menjadi pecundang dari kombinasi kebijakan fiskal yang ketat dan kebijakan penggajian solidaritas adalah perusahaan yang kurang produktif, termasuk mereka yang bekerja di sana. Dampak berupa pengurangan lapangan kerja bukan dipahami secara defensif sebagai permasalahan publik, tapi ofensif sebagai tugas penyesuaian publik yang harus ditanggulangi sebagai kebijakan pasar kerja utuh secara aktif. Ini dilakukan lewat sebuah sistem utuh dari aktivitas pendidikan serta dukungan mobilitas untuk membantu para penganggur memperoleh pekerjaan produktif serta pengasilan yang layak. Dengan demikian, kebijakan fiskal ketat, penggajian solidaritas dan kebijakan pasar kerja aktif bisa dipandang sebagai arah pembaruan bekesinambungan serta penyesuaian struktur perekonomian Swedia terhadap tantangan pasar global.

Itulah penjelasan tentang perjalanan cepat ekspor Swedia keluar dari krisis tahun 1990an. Karena didukung sebuah sistem kebijakan pasar kerja aktif yang utuh dan para pihak terkait tarif/penggajian (serikat pengusaha, serikat buruh dan pemerintah) secara tradisional lebih memilih pekerjaan berproduktivitas tinggi ketimbang lapangan kerja berproduktivitas rendah, maka berbagai inovasi bisa dengan cepat meningkatkan lapangan kerja. Ketika konyunktur internasional berada dalam kondisi baik, Swedia berhasil meningkatkan kuota ekspornya hampir sepertiga dari 33% menjadi 45%.

Negara Sosial :

Dalam proses pertumbuhan paska Perang Dunia II, lewat perubahan struktural secara cepat, Swedia berubah dengan cepat dari masyarakat pekerja dan petani miskin menjadi masyarakat pegawai yang berpenghasilan tinggi. Ketika perkembangan struktur sosial yang menjanjikan kebijakan pengamanan yang mendasar (contohnya, pensiun yang sama bagi raja dan pengemis), maka tidak terjadi mobilisasi pemilih yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuasaan. Namun negara kesejahteraan Swedia tidak hanya melindungi warganya terhadap risiko kehidupan paling elementer lewat dukungan dana publik.

Lebih dari itu, terdapat sektor pelayanan yang cukup lengkap yang menyediakan pengayoman anak dan lansia yang (nyaris) gratis, serta jasa pendidikan dan kesehatan serta kualifikasi kebijakan sektor pekerjaan. „Setiap orang memba-

yar pajak sesuai penghasilannya, dan kesejahteraan yang ditawarkan kepada masyarakat lebih berlandaskan pada situasi kehidupan seseorang ketimbang premi yang dibayar. Layanan bukanlah hasil dari keputusan berkacamata pasar, melainkan ditetapkan dalam proses politik” (Meidner / Hedborg 1984: 56).

Cepatnya ekspansi sektor-sektor pelayanan berbarengan dengan penuhnya kegiatan secara mendasar hanya bisa diatasi dengan partisipasi perempuan. Dalam kurun waktu 1960 hingga 1990, jumlah dan kemampuan perempuan pekerja di Swedia meningkat dari 50 % menjadi angka rekor dunia sebesar 83%. Karena penikmat ekspansi sektor-sektor pelayanan publik, umumnya adalah kaum perempuan, potensi pemilih sosial demokrasi pada kelompok ini otomatis terbuka lebar.

Tonggak negara kesejahteraan , masing-masing diorganisir sebagai berikut:

Tunjangan Pensiun: Berdasarkan inisiatif dari serikat pekerja LO, maka pada pertengahan 1950an, sebuah usulan terkait pensiunan tambahan berdasarkan gaji dikemukakan. Usulan tersebut secara strategis merubah arah dari jaminan dasar umum menjadi jaminan (hidup) secara individual. Dengan cara demikian, para pendukung sosial demokrasi juga mengharapkan persetujuan sebagian besar pekerja untuk memperluas basis pemilihnya.

Asuransi Pengangguran: Berbeda dengan tonggak sistem jaminan sosial lainnya, asuransi pengangguran berbasis pada kesukarelaan dan dukungan negara. Asuransi ini didanai/diorganisir oleh kas anggota pekerja yang dikelola oleh serikat pekerja. Keanggotan dalam serikat pekerja otomatis menjadi anggota dalam asuransi pengangguran. Sekitar 90 % pekerja menjadi anggota asuransi ini. Asuransi ini didanai, sebagian kecil oleh angsuran anggota, porsi terbesar berasal dari anggaran belanja negara. Selain itu, negara juga membayar tunjangan dasar bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.

Tunjangan Sosial: Di Swedia, tunjangan sosial berada dalam wewenang Kementerian Kesehatan dan Sosial, namun diorganisir secara lokal oleh pemerintahan desa dan sebagian besar didanai dari pajak setempat. Jumlah tunjangan sosial ditetapkan oleh pejabat kesejahteraan nasional berdasarkan standar hidup yang layak.

*Ekspansi
sektor-sektor
pelayanan*

Pensiun

*Asuransi
pengangguran*

Tunjangan sosial

Sistem kesehatan: Semua penduduk Swedia berhak memperoleh (kembali) pengeluarannya bagi pengobatan. Hal ini diorganisir oleh parlemen provinsi dan sebagian besar dibiayai dari pajak pendapatan langsung. Sebagian lagi, didanai lewat iuran pasien yang berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain. Lebih dari itu, bagi mereka yang berpenghasilan di atas 6.000 Krone per tahun, berhak memperoleh pergantian atas berkurangnya penghasilan. Pembiayaannya lewat asuransi kesehatan di mana ada bagian yang wajib dibayar oleh pengusaha dan pekerja yang bisa dikompensasikan lewat pajak.

Meskipun Swedia saat ini termasuk negara OECD dengan pengeluaran tertinggi tidak berarti bahwa negara kesejahteraan terlalu mahal. Karena, untuk keamanan terhadap risiko hidup paling dasar (pengangguran, penyakit, lansia) penduduk AS secara individu mengeluarkan jumlah yang sama dibandingkan apa yang harus dibayar penduduk Swedia dalam bentuk pajak dan kewajiban lain. Perbedaan utamanya adalah bahwa di Swedia semua penduduknya dijamin negara, sementara di AS semuanya dijamin oleh sistem asuransi swasta – tentu saja, tidak termasuk mereka yang tidak mampu.

Berbarengan dengan keterbukaan ekonomi dalam proses globalisasi menyebabkan menguatnya tekanan persaingan, terutama bagi kelompok pekerja lokal yang kurang produktif. Ketika pengamanan pendapatan dan tawaran peningkatan kualitas secara besa-besaran berhasil mengurangi kecemasan kehilangan lapangan kerja dan status, berkembanglah ruang gerak perwujudan ekonomi-politik yang menurunkan biaya politik dalam negeri dan terbukanya ekonomi ke pasar global. Mencermati relasi ekonomi global, maka arah kebijakan kesejahteraan berbasis peningkatan kualitas dan pengamanan status menjadi alat ekonomi-politik yang unggul dibandingkan orientasi sosial politik yang hanya berkutat pada perlindungan mereka - yang secara ekonomi kalah.

Persentase lapangan kerja 2006	73,1 %	Jumlah pekerja (usia 15–64) dibandingkan total penduduk (Sumber: Eurostat)
Persentase pekerja perempuan 2006	70,7 %	Jumlah pekerja perempuan (usia 15–64) dibandingkan total penduduk perempuan (sumber: Eurostat)
Persentase pengangguran 2006	7,1 %	Jumlah penganggur dibandingkan total pekerja (sumber: Eurostat)
Persentase penganggur jangka panjang 2006	1,1 %	Jumlah mereka yang lama menganggur (12 Bulan atau lebih) dibandingkan jumlah total pekerja (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan/ gini-koefisien 2006	25 %	Tanda-tanda distribusi pendapatan yang timpang, lebih tinggi nilainya, semakin tinggi ketimpangan (Sumber: Human Development Report 2006)
Indeks kemiskinan 2006	6,5 %	Index kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (Harapan hidup, tingkat buta aksara, akses terhadap lembaga kesehatan ...), 0 = min. Kemiskinan, 100 = max. Kemiskinan (Sumber: Human Development Report 2006)
Pendidikan: hubungan sukses pendidikan dgn latarbelakang sosial-ekonomi 2006	10,6 %	Jumlah, perbedaan prestasi antara murid berdasarkan latar belakang social-ekonomi. (Sumber: OECD, PISA-Studie 2006)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	78 %	Jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat buruh (Sumber: J. Visser [2006] Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, 38–49)

Sistem Pendidikan :

Karena “bahan baku” sejati dari industri dan pelayanan publik moderen berasal dari khazanah pengetahuan serta cara-cara kreatif, dengan demikian sistem pendidikan memiliki arti strategis bagi pengembangan masyarakat dalam sebuah perekonomian global. Untuk saat ini, Swedia telah memiliki pelayanan *Kindergarden* (Taman Kanak-kanak) yang lengkap meskipun belum gratis. Setelah itu, mulai pra sekolah (kelompok bermain), hingga universitas, hampir semuanya tidak dipungut biaya alias gratis.

“Gesamtshule” yang terintegrasi (gabungan pendidikan dasar hingga menengah atas dalam satu atap) di Swedia mengikuti prinsip “semua diterima”. Hampir semua lulusan “Gesamtschule” secara sukarela melengkapi pendidikan menengahnya di “Gymnasium”. Akhir 70an, pendidikan tinggi dibuka untuk umum. Semua yang memenuhi syarat bisa kuliah di jurusan yang diinginkan sepanjang masih ada tempat. Mereka yang belum diterima masuk dalam daftar tunggu yang diatur berdasarkan berbagai kriteria. Di samping itu terdapat kelembagaan pendidikan orang dewasa (populer) yang cukup lengkap.

Akhirnya: Arti strategis kelas menengah

Negara kesejahteraan di Skandinavia akan tetap bertahan selama prestasinya diapresiasi oleh kelas menengah. Mereka membayar (pajak) dalam jumlah besar untuk pelayanan publik dan mengharapkan prestasi maksimal dari negara. Ketika menurut mereka telah terjadi penurunan prestasi pengamanan publik, maka mereka akan memanfaatkan tawaran dari pasar. Namun, karena tidak seorang pun yang rela membayar double, dalam jangka menengah berpengaruh pada suara pemilih yang melawan pajak tinggi negara kesejahteraan. Namun inilah cara Skandinavia menjawab pertanyaan/permasalahan negara kesejahteraan: Bukan mengamanan penduduk miskin dan mereka yang kalah pada batasan minimal eksistensinya, melainkan memperhatikan semua lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas tinggi.

Karena baik hak kebebasan positif maupun negatif termaktub dalam konstitusi, maka di Swedia hak-hak dasar bukan hanya dalam wujud formal, melainkan dampak riilnya hampir sepenuhnya terlaksana. Karena itu, Swedia bisa disebut sebagai ‘high inclusive’ sosial demokrasi.

Bacaan lanjut

Erik Gurgsdies
(2006), *Schweden: Zivilgesellschaft im universalistischen Sozialstaat*, in: Thomas Meyer (Hg.), *Praxis der Sozialen Demokratie*, Wiesbaden, S. 47–129.

6. SEBUAH PERMULAAN DI AKHIR BUKU

Bagaimana mengakhiri sebuah buku bacaan tentang landasan sosial demokrasi? Mungkin, membuat kesimpulan, menekankan pentingnya buku ini adalah sebuah cara. Tetapi cara tersebut, rasanya menyesatkan. Karena buku ini telah menunjukkan bahwa sosial demokrasi baik sebagai model pemikiran maupun sebagai tugas politik bukanlah sesuatu yang final. Sebaliknya, perjalanan sosial demokrasi – sebagai ide dan langkah politik – harus selalu diuji kembali, disesuaikan dan diperbaharui bila meninginkannya membawa keberhasilan.

Diskusi tentang sosial demokrasi sangat dihargai, ketika tidak mandeg melainkan mencermati perkembangan dalam masyarakat, begitu pula memahami kesempatan dan risiko yang digunakan sebagai arahan politik. Hal yang juga membedakan Sosial Demokrasi dengan model-model politik lainnya adalah tidak puas pada keberhasilan ataupun buta terhadap perubahan realitas serta tantangan-tantangan baru.

Salah satu tantangan utama untuk beberapa tahun dan dekade ke depan adalah bagaimana mewarnai dan membentuk globalisasi. Upaya ini sekaligus mengandung kesempatan dan risiko. Dalam “Program” (yang dideklarasikan di Hamburg), SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) telah menerima tantangan ini. SPD telah memformulasikan jawaban atas pertanyaan utama globalisasi dari perspektif Sosial Demokrasi sebagai berikut:

Kesejahteraan, Keadilan dan Demokrasi

„ Abad ke-21 adalah abad pertama globalisasi yang sesungguhnya. Belum pernah terjadi sebelumnya ketika umat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. [...] Abad ini, boleh jadi akan menjadi abad kemajuan sosial, ekologis dan ekonomi yang membawa kesejahteraan, keadilan dan demokrasi bagi semua umat manusia. Atau, sebaliknya, ia menjadi abad perebutan keras kue kemakmuran disertai kekerasan yang mencekam. Pola hidup masyarakat industrial saat ini telah menjadi beban teramat besar bagi sistem ekologi bumi [...]. Yang dipertaruhkan adalah kehidupan manusiawi, perdamaian dunia dan – tak kalah pentingnya, kelayakan kehidupan di bumi kita.“ (Hamburger Programm 2007: 6)

*Sosial Demokrasi
tidak mungkin
ditutup-bukukan*

*Tantangan
Globalisasi*

Pasar modal dan pasar keuangan

„sebuah perekonomian yang modern dan terintegrasi secara global membutuhkan sebuah pasar modal dan keuangan yang berfungsi baik. Kita menginginkan sebuah pasar modal yang potensial dimanfaatkan untuk pertumbuhan kualitatif. [...] Ketika pasar modal hanya dimanfaatkan untuk keuntungan jangka pendek, ia akan membahayakan strategi pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan serta menghancurkan lapangan kerja. Kita berkeinginan, dengan bantuan regulasi pajak dan bursa, mendukung para pemodal agar tidak sekedar mencari keuntungan secara cepat melainkan memiliki sebuah komitmen jangka panjang. [...] Dengan semakin terkaitnya pasar barang dan pasar modal, regulasi internasionalnya pun menjadi semakin penting “(Hamburger Programm 2007: 47)

Pekerjaan yang baik

„Hanya mereka yang memiliki perspektif dalam kehidupan yang bisa diandalkan, bisa maksimal mengembangkan talenta serta kemampuannya untuk berprestasi. Pekerjaan yang baik menggabungkan fleksibilitas dan kepastian. Gerak kemajuan ilmu pengetahuan, begitu pula perubahan cepat di dunia pekerjaan serta semakin kerasnya persaingan mensyaratkan fleksibilitas. Pada saat yang sama, fleksibilitas juga memberikan lebih banyak kesempatan bagi artikulasi (kehidupan) individual. [...] Untuk menghubungkan kepastian dan fleksibilitas, begitu pula menjaga kepastian dalam perubahan, maka kita menggabungkan kebijakan pekerjaan modern dan asuransi pengangguran menjadi asuransi pekerjaan.

Betapapun fleksibilitas dibutuhkan dan diinginkan, penyalahgunaannya harus dihindari. Kita menginginkan penguatan hubungan kerja yang secara sosial terjamin dan tanpa batas waktu. Kita menginginkan mengatasi pekerjaan yang membuat pekerja tidak terlindungi.“(Program “Hamburg” SPD 2007: 54 dst.

Berbagai butir di atas menunjukkan bahwa sosial demokrasi harus selalu berkembang dan bergumul mengatasi tantangan – dalam kesadaran berlandaskan sosial demokrasi dan pandangan jelas terhadap realitas.

Kami mengundang Anda untuk terlibat dalam diskusi tentang sosial demokrasi Akademi Sosial Demokrasi FES menyediakan kesempatan (tempat) untuk itu.

Delapan modul seminar berikut ini yang menjadi bahan diskusi terkait nilai-nilai dasar dan area praktis Sosial demokrasi sebagai berikut :

Landasan Sosial Demokrasi

Ekonomi dan Sosial Demokrasi

Negara Sosial dan Sosial Demokrasi

Globalisasi dan Sosial Demokrasi

Eropa dan Sosial Demokrasi

Migrasi dan Sosial Demokrasi

Masyarakat Warga dan Sosial Demokrasi

Perdamaian dan Sosial Demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

Max Adler (1926), *Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erziehung*, 2., vermehrte Aufl., Berlin.

Michel Aglietta (2000), *Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand*, übersetzt von Marion Fisch, Hamburg.

Detlev Albers und Andrea Nahles (2007), *Linke Programmbausteine. Denkanstöße zum Hamburger Programm der SPD*, Berlin.

Elmar Altvater (2006), *Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik*, 4. Aufl., Münster.

Kurt Beck und Hubertus Heil (Hg.) (2007), *Soziale Demokratie im 21. Jahrhundert. Lesebuch zur Programmdebatte der SPD*, Berlin.

Dietrich Benner und Friedhelm Brüggem (1996), *Das Konzept der Perfectibilité bei Jean-Jacques Rousseau. Ein Versuch, Rousseaus Programm theoretischer und praktischer Urteilsbildung problemgeschichtlich und systematisch zu lesen*, in: Otto Hansmann (Hg.), *Seminar: Der pädagogische Rousseau*, Bd. II: Kommentare, Interpretationen, Wirkungsgeschichte, Weinheim, S. 12–48.

Isaiah Berlin (1958), *Two Concepts of Liberty*, Oxford (u. a.).

Eduard Bernstein (1899), *Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie*, Stuttgart.

Hans-Jürgen Bieling, Klaus Dörre u. a. (2001), *Flexibler Kapitalismus. Analysen, Kritik, politische Praxis*, Hamburg.

Pierre Bourdieu u. a. (1997), *Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft*, Konstanz.

Ulrich Brinkmann, Karoline Krenn und Sebastian Schief (Hg.) (2006), *Endspiel des Kooperativen Kapitalismus. Institutioneller Wandel unter den Bedingungen des marktzentrierten Paradigmas*, Wiesbaden.

Ulrich Brinkmann, Klaus Dörre u. a. (2006), *Prekäre Arbeit. Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse*, hg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.

Hubertus Buchstein, Michael Hein und Dirk Jörke (2007), Politische Theorien, Wochenschau für politische Erziehung, Sozial- und Gemeinschaftskunde, Frankfurt am Main.

Erwin Carigiet (2001), Gesellschaftliche Solidarität. Prinzipien, Perspektiven und Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit, Basel/Genf/München.

Robert Castel (2000), Die Metamorphose der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, aus dem Französischen von Andreas Pfeuffer, Konstanz.

Manuel Castells (2003), Das Informationszeitalter, Bd. 1: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft; Bd. 2: Die Macht der Identität; Bd. 3: Jahrtausendwende, Wiesbaden.

Robert A. Dahl (2000), Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven.

Alex Demirovic (2007), Demokratie in der Wirtschaft. Positionen, Probleme, Perspektiven, Münster.

Die Linke (2007), Programmathe Eckenpunkte der Partei Die Linke, in: www.die-linke.de, Stand: 14.10.2007.

Klaus Dörre (2005), Prekarität – eine arbeitspolitische Herausforderung, in: WSI-Mitteilungen 5/2005, S. 250–258.

Dieter Dowe und Kurt Klotzbach (Hg.) (2004), Programmathe Dokumente der Deutschen Sozialdemokratie, 4., überarbeitete und aktualisierte Aufl., Bonn.

Hermann Duncker (1931), Einleitung, in: Max Beer, Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe, mit Ergänzungen von Dr. Hermann Duncker, 7. Aufl., Berlin, S. 9.

Fritz Erler (1947), Sozialismus als Gegenwartsaufgabe, Schwenningen.

Walter Euchner, Helga Grebing u. a. (2005), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus – Katholische Soziallehre – Protestantische Sozialethik. Ein Handbuch, 2. Aufl., Wiesbaden.

Helga Grebing (2007), Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Von der Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert, Berlin.

Görg Haverkate (1992), Verfassungslehre. Verfassung als Gegenseitigkeitsordnung, München.

Nancy Fraser und Axel Honneth (2003), *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse*, Frankfurt am Main.

Hamburger Programm (2007), Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2007.

Wolfgang Heidelberg (Hg.) (1997), *Die Menschenrechte. Erklärungen, Verfassungsartikel, internationale Abkommen*, 4., erneuerte und erweiterte Aufl., Paderborn/München/Wien/Zürich.

Thomas Heinrichs (2002), *Freiheit und Gerechtigkeit. Philosophieren für eine neue linke Politik*, 1. Aufl., Münster.

Karl Otto Hondrich und Claudia Koch-Arzberger (1994), *Solidarität in der modernen Gesellschaft*, Frankfurt am Main.

Immanuel Kant (1963), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, in: *Kants Werke in sechs Bänden*, hg. von W. Weischedel, Bd. IV, Darmstadt.

Wolfgang Kersting (Hg.) (2000), *Politische Philosophie des Sozialstaats*, Weilerswist.

Jürgen Kocka (1995) (Hg.), *Bürgertum im 19. Jahrhundert*, Bd. 1: *Einheit und Vielfalt Europas*, Göttingen.

Ferdinand Lassalle (1987), *Reden und Schriften*, hg. von Jürgen Friederici, 1. Aufl., Leipzig.

Detlef Lehnert (1983), *Sozialdemokratie zwischen Protestbewegung und Regierungspartei 1848–1983*, 1. Aufl., Frankfurt am Main

John Locke (1977), *Zwei Abhandlungen über die Regierung*, hg. von Walter Euchner, 1. Aufl., Frankfurt am Main.

Rosa Luxemburg (1899), *Sozialreform oder Revolution? Mit einem Anhang Miliz und Militarismus*, Leipzig, in: *Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke*, Bd. 1: 1893–1905, Erster Halbband, 7. Aufl., Berlin 1990, S. 367–466.

Karl Marx (1998), *Kritik der politischen Ökonomie (= MEW 23)*, Berlin.

Charles de Secondat Montesquieu (1992), *Vom Geist der Gesetze*, hg. von Ernst Forsthoff, Bd. 1, Tübingen.

- Wolfgang Merkel u. a. (2006), Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa, 1. Aufl., Wiesbaden.
- Thomas Meyer und Nicole Breyer (Mitarbeit) (2005), Die Zukunft der Sozialen Demokratie, Bonn.
- Thomas Meyer (2005), Theorie der Sozialen Demokratie, 1. Aufl., Wiesbaden.
- Thomas Meyer (2006), Praxis der Sozialen Demokratie, 1. Aufl., Wiesbaden.
- Gero Neugebauer (2007), Politische Milieus in Deutschland. Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
- Matthias Platzek, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück (Hg.) (2007), Auf der Höhe der Zeit. Soziale Demokratie und Fortschritt im 21. Jahrhundert, Berlin.
- Julian Nida-Rümelin und Wolfgang Thierse (Hg.) (1997), Philosophie und Politik, 1. Aufl., Essen.
- Dieter Plehwe und Bernhard Walpen (2001), Gedanken zu einer Soziologie der Intellektuellen des Neoliberalismus, in: Hans-Jürgen Bieling, Klaus Dörre u. a. (2001), Flexibler Kapitalismus. Analysen, Kritik, politische Praxis, Hamburg, S. 225–239.
- John Rawls (1979), Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main.
- Jürgen Ritsert (1997), Gerechtigkeit und Gleichheit, 1. Aufl., Münster.
- Jean-Jacques Rousseau (1997), Diskurs über die Ungleichheit. Kritische Ausgabe des integralen Textes, übersetzt und kommentiert von Heinrich Meier, 4. Aufl., Paderborn/München/Wien/Zürich.
- Franz Schultheis und Kristina Schulz (Hg.) (2005), Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag, Konstanz.
- Amartya Sen (1985), Commodities and Capabilities, Amsterdam.
- Michael Walzer (1997), Pluralismus und Demokratie, in: Julian Nida-Rümelin und Wolfgang Thierse (1997), Philosophie und Politik, 1. Aufl., Essen, S. 24–40.

REFERENSI BAHAN BACAAN

Berikut ini, referensi bahan bacaan bagi mereka yang, setelah membaca buku ini, ingin memperdalam pemahamannya tentang landasan Sosial Demokrasi:

Berbagai Bahan Bacaan Sosial Demokrasi

Vaut, Simon u. a.:

Lesebuch 2: Wirtschaft und Soziale Demokratie. (Buku Bacaan 2: Ekonomi dan Sosial Demokrasi) 2009.

Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung.

(ISBN: 978-3-86872-154-6)

Bagaiman agar sebuah kebijakan ekonomi – yang berkaitan dengan nilai - sosial demokrasi bisa dilaksanakan?

Teori manakah yang bisa diacu terkait kebijakan ekonomi berlandaskan nilai kebebasan, keadilan dan solidaritas? Apa saja prinsip-prinsipnya? Dan, terutama, bagaimana semua itu bisa diimplementasikan?

Buku bacaan “Ekonomi dan Sosial Demokrasi” menelusuri semua pertanyaan tadi. Berkaitan dengan hal tersebut, ajaran ekonom Britania Raya John Maynard Keynes berperan penting.

Dalam masa ‘berkabut’, di mana banyak orang hanya berkendaraan sesuai jarak pandang, adalah sangat penting untuk memperjelas arah kebijakan ekonomi yang diyakini.

Petring, Alexander u. a.:

Lesebuch 3: Sozialstaat und Soziale Demokratie. (Buku bacaan 3: Negara Sosial dan Sosial Demokrasi) 2009.

Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung.

(ISBN: 978-3-86872-128-7)

Keterkaitan antara demokrasi dan negara sosial, model-model negara sosial di berbagai negara, program sosial-politik partai-partai, kritik populer dan tantangan yang sebenarnya, adalah berbagai topic dalam buku bacaan ini.

Buku ini, dengan cermat dan mudah dipahami menerangkan keterkaitan fundamental, berbasis teori dan (contoh) praksis yang kuat.

(Modul “Sosial Demokrasi” dari Online Akademie)

Apa saja akar dan nilai sosial demokrasi?

Apa yang menandainya, dulu dan sekarang?

Bagaimana bentuknya secara praktis politik untuk pemberlakuannya dalam menghadapi tantangan baru seperti globalisasi dan perubahan demografis?

Itulah berbagai pertanyaan yang dicarikan jawabannya oleh ‘Modul „Sosial Demokrasi” dari ‘Online-Akademie Friedrich- Ebert-Stiftung’.

Selain berbagai artikel tentang Landasan, ruang gerak dan aktor-aktor sosial demokrasi, terdapat pula Glossar dan bahan pelajaran yang lengkap. www.fes-onlineakademie.de

Ide-ide Sejarah Politik

Euchner, Walter/Grebing, Helga u. a.

Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialismus – Katholische Soziallehre – Protestantische Sozialethik. Ein Handbuch. (Sejarah Ide-ide Sosial di Jerman. Sosialisme – Ajaran Sosial Katolik – Etika Sosial Protestan. Sebuah Manual) 2005.

VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-14752-9)

Manual (buku pegangan) komprehensif ini menawarkan gambaran yang lengkap tentang keterkaitan antara gerakan-gerakan sosial dan perkembangan sejarah ide-ide. Fokus perhatian adalah sosialisme, ajaran sosial katolik dan etika sosial protestan.

Langewiesche, Dieter:

Liberalismus und Sozialismus. Ausgewählte Beiträge. (Liberalisme dan Sosialisme. Makalah-makalah Pilihan) 2003.

Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-4132-2)

Dalam 17 tulisannya, sejarawan terkemuka dari Tuebingen, Dieter Langewiesche, menerangkan sejarah penuh ketegangan dan saling mempengaruhi antara ideologi-ideologi sosial besar, Liberalisme dan Sosialisme pada abad ke-19 dan ke-20, terkait aspek budaya, social dan politik.

Landasan

Meyer, Thomas:

Theorie der Sozialen Demokratie . (Teori Sosial Demokrasi) 2005.

VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-5311-4612-6)

Dua kekuatan bertarung dalam dunia globalisasi saat ini untuk memperluas pengaruh:

Liberal demokrasi dan sosial demokrasi. Dalam buku ini, Thomas Meyer mengembangkan landasan teoretis bagi kebijakn (politik) sosial demokrasi, di mana selain hak-hak dasar individual dan politik, juga yang tak kalah penting dan serius adalah hak-hak dasar sosial dan ekonomi setiap manusia.

Meyer, Thomas (Asisten: Nicole Breyer):

Die Zukunft der Sozialen Demokratie . (Masa Depan Sosial Demokrasi) 2005.

Politische Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung. (ISBN: 3-89892-315-0)

Dalam publikasi ini, dirangkum berbagai pernyataan penting tentang teori sosial demokrasi dan praksis sosial demokrasi.

Sosial Demokrasi di Jerman

Eppler, Erhard:

Eine Partei für das zweite Jahrzehnt: die SPD? (SPD: Sebuah Partai Politik untuk Dua Abad?) 2008.

vorwärts buch Verlag. (ISBN: 978-3-86602-175-4)

Erhard Eppler, pemikir pionir, mempublikasikan sebuah buku, yang sepehnya berkaitan dengan partai politiknya, begitu pula tugas dan kesempatan yang dimiliki. Ia mendiskripsikan dengan mengesankan bagaimana pemikiran pasar radikal sepanjang seperempat abad merubah Eropa dan Jerman.

Dampaknya, sebuah masyarakat Jerman di mana rasa keadilannya secara mendalam terluka dan semakin melebarnya jurang antara kaya dan miskin yang mengancam pecahnya sebuah masyarakat.

Gabriel, Sigmar:

Links neu denken. Politik für die Mehrheit. (Kiri Berpikiran Baru. Politik untuk Mencapai Mayoritas) 2008

(ISBN: 978-3-492-05212-2)

Sigmar Gabriel meletakkan sebuah rancangan politik tentang pemikiran baru terkait “menjadi kiri” agar terbebas dari jebakan fatal berikut: tercuci habis sehingga tidak bisa dikenali lagi atau terjerembes ke dalam bingkai “kiri lama” yang telah basi.

Menggapai mayoritas, baginya terkait substansi politik, bukan sekedar hitung-hitungan (aritmetik) kekuasaan dan perdebatan tak berkesudahan tentang koalisi. Sigmar, menuntut agar sepenuhnya kembali ke politik.

Beck, Kurt / Heil, Hubertus (Hg.):

Lesebuch zur Programmdebatte der SPD. (Sosial Demokrasi di Abad ke-21. Buku Bacaan Tentang Perdebatan Program di SPD). 2007.

Vorwärts Buch Verlag. (ISBN: 978-3-86602-525-7)

Juga penerbit publikasi ini, bersama dengan para penulis dalam kerangka debat program, menyodorkan tugas masa depan berikut: Bagaimana dengan dengan siapakah kita membentuk globalisasi? Ke mana arah perjalann Eropa? Bagaimana kita memupuk kehidupan demokrasi? Bagaimana perekonomian (kita) bisa tumbuh dan, pada saat yang sama, mampu mengatasi permasalahan sosial dan ekologi di masa depan? Di mana pekerjaan (bisa) tumbuh dan apa yang bisa diberikan oleh negara sosial dalam tugas pelayanannya? Bagaimana wujud mitra/koalisi politik bagi sosial demokrasi saat ini?

Sosial Demokrasi Internasional

Meyer, Thomas (Hg.):

Praxis der Sozialen Demokratie. (Praktek Sosial Demokrasi). 2005.

VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-15179-3)

Buku ini mempresentasikan studi aktual negara-negara secara kualitatif oleh beberapa pakar terkemuka dalam bidang ini mengacu pada *Theorie der Sozialen Demokratie* dari Thomas Meyer.

Negara-negara yang diteliti adalah Swedia, Jepang, Jerman, Britania Raya, Belanda dan Amerika Serikat. Selain itu, juga diperkenalkan sebuah Index baru dalam mengukur sosial demokrasi.

Krell, Christian:

Sozialdemokratie und Europa. Die Europapolitik von SPD, Labour Party und Parti Socialiste. (Sosial Demokrasi dan Eropa. Kebijakan tentang Eropa dari SPD, Labour Party dan Parti Socialiste) 2009. VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-16498-4)

Siapa dan apa yang menentukan kebijakan Eropa sebuah partai? Pertanyaan ini yang secara mendasar ditelusuri oleh Christian Krell. Untuk itu, ia membandingkan kebijakan (terkait) Eropa tiga partai politik nasional dalam kurun waktu 1979 – 2002, masing-masing Labour Party dari Britania Raya, SPD dari Jerman dan Parti Socialiste dari Perancis.

Ia menunjukkan persamaan, tapi juga perbedaan terutama terkait strategi integrasi Eropa oleh tiga partai politik tersebut.

Merkel, Wolfgang / Egle, Christoph / Henkes, Christian / Ostheim, Tobias / Petring, Alexander:

Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa. (Kemampuan Reformasi Sosial Demokrasi. Tantangan dan Bilans Kebijakan Pemerintahan di Eropa Barat) 2005. VS Verlag für Sozialwissenschaften. (ISBN: 978-3-531-14750-5)

Akhir 1990an, di hampir semua Negara Uni Eropa, partai Sosial Demokrat menjadi bagian dalam pemerintahan. Seberapa berhasil berbagai partai politik di Eropa itu berhasil dalam hal kebijakan reformasinya? Apakah semua mengikuti "jalan Ketiga"? Berdasarkan studi lengkap, dilakukan analisa dan penilaian tentang kebijakan sosial demokrasi di Jerman, Perancis, Britania Raya, Belanda, Swedia dan Denmark.

Sejarah

Dowe, Dieter:

Von der Arbeiter- zur Volkspartei. Programmentwicklung der deutschen Sozialdemokratie seit dem 19. Jahrhundert. (Dari Partai Buruh ke Partai Rakyat. Perkembangan Program Sosial Demokrasi Jerman sejak Abad ke-19) Reihe Gesprächskreis Geschichte, 2007, Heft 71 (<http://library.fes.de/pdf-fi les/historiker/04803.pdf>).

Dieter Dowe menulis tentang sejarah sosial demokrasi sejak revolusi 1848, baik secara programatik maupun dalam praksis sebagai bagian penting dalam pergulatan panjang tanpa henti terkait tatanan yang bebas, demokratis dan berkeadilan dari negara dan masyarakat.

Grebing, Helga:

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Von der Revolution 1848 bis ins 21. Jahrhundert (Sejarah Gerakan Buruh Jerman dari Revolusi 1848 hingga Abad ke-21) 2002. vorwärts Verlag. ISBN: 978-3-86602-288-1

Sejak bertahun-tahun terbukti bahwa jatuh bangunnya keberhasilan politik terkait erat dengan kemampuan partai politik dan kepercayaan masyarakat terhadap konsep pasar kerjanya.

Apa yang selama ini belum ada, ialah model yang solid bagi masa depan sebuah masyarakat malampaui bentuk-bentuk pekerjaan klasik.

Karena, manusia harus ada “kegiatan” untuk keberlangsungan hidupnya yang bermartabat. Bagaimana (agar) sebuah Jerman pasca-industri dengan pekerjaan berlimpah bagi semua terwujud? Begitu pula, apa tugas gerakan buruh dan SPD sebagai partainya?

Miller, Susanne / Potthoff, Heinrich:

Kleine Geschichte der SPD 1848–2002 (Sejarah Pendek SPD 1848-2002) 2002. Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0320-7)

“Sejarah pendek tentang SPD” ini, kini, telah menjadi karya standar; menceritakan tentang sejarah partai politik tertua di Jerman, pada masa-masa awalnya hingga masa pemerintahan Gerhard Schroeder. Tabel waktu yang disuguhkan, bisa menjadi orientasi sekilar.

Schneider, Michael:

Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute (Sejarah singkat Serikat Buruh. Perkembangannya di Jerman, dari awal hingga kini) 2000.

Verlag J. H. W. Dietz Nachf. (ISBN: 978-3-8012-0294-1)

Michael Schneider memaparkan secara detil dan penuh pemahaman tentang sejarah serikat buruh, mulai dari awal pendiriannya selama (masa) industrialisasi hingga tantangan mutakhir dari kegiatan serikat buruh di masa globalisasi

20 KATA KUNCI PENTING:

1. **Gerakan Buruh** (h. 72–80)
2. **Berlin, Isaiah** (h. 102)
3. **Sosialisme Demokrasi** (h. 72–85)
4. **Fraser, Nancy** (h. 28–31)
5. **Kebebasan** (h. 9; S. 11–18; h. 40–42; h. 84)
6. **Hak-hak Kebebasan** (h. 102–106)
7. **Keadilan** (h. 9; S. 19–36; h. 40–42)
8. **Persamaan/kesetaraan** (h. 9; h. 19–29; h. 34–36; h. 40–42)
9. **Kant, Immanuel** (h. 16–17)
10. **Kapitalisme** (h. 62–66; h. 72–83; h. 89–92)
11. **Konservativisme** (h. 70–71)
12. **Demokrasi Liberal** (h. 93–96; h. 102–104)
13. **Luberalisme** (h. 12; h. 22–25; h. 67–69; h. 94)
14. **Demokrasi Libertarian** (h. 84–85; h. 93–96; h. 102–104)
15. **Locke, John** (h. 11–15)
16. **Rawls, John** (h. 22–27)
17. **Rousseau, Jean-Jacques** (h. 14–15)
18. **Solidaritas** (h. 9; h. 37–39; h. 40–42)
19. **Sosial Demokrasi** (h. 6–8; h. 72–85; h. 86–106; h. 107)
20. **Teori Sosial Demokrasi(Thomas Meyer)** (h. 86–106)

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ADAV	<i>Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein</i> (Asosiasi Serikat Pekerja Umum Jerman yang berdiri 1863)
A S	Amerika Serikat
BAföG	<i>Das Bundesausbildungsförderungsgesetz</i> (Penentuan bantuan dana pendidikan di Jerman)
CDU	<i>Christlich Demokratische Union Deutschlands</i> (Persatuan Demokrat Kristen Jerman)
CSU	Christlich-Soziale Union (Partai Uni Sosial Kristen Jerman di Bavaria/Bayern)
FDP	<i>Freie Demokratische Partei</i> (Partai Liberal Jerman)
FES	Friedrich-Ebert-Stiftung
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung Vergleich (Daftar Asuransi Kesehatan Negara sesuai UU)
Die Grüene	Partai Hijau Jerman
Die Linke	Partai Kiri Jerman
HAM	Hak Asasi Manusia
LGBT	Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender
NRW	<i>Nordheim-Westfalen</i> (Negara bagian Nordheim-Westfalen Jerman)
OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
SPD	<i>Sozialdemokratische Partei Deutschlands</i> (Partai Sosial Demokratik Jerman)
PBB	Persikatan Bangsa-Bangsa
PDS	Partei des Demokratischen Sozialismus (Partai Demokrasi Sosialis Jerman – perubahan nama dari Partai Sosialis Jerman Timur setelah Jerman bersatu)
PISA	Programme for International Student Assessment
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKV	Private Krankenversicherung Vergleich (Daftar Asuransi Kesehatan Swasta)
SED	Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partai Persatuan Sosialis Jerman)
Der Spiegel	Majalah berita mainstream di Jerman
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WASG	<i>Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative</i> (Partai sayap kiri Jerman yang terbentuk 2005 ketika ada kolasi “merah-hijau” berkoalisi/bergabung jadi partai kiri “Die Linke”)

KOMENTAR TERHADAP SERI BUKU INI

„Buku Bacaan Sosial Demokrasi ini, menjabarkan substansi yang rumit langsung pada pokok persoalan, secara cepat dan mudah dicerna. Siapa, apa dan bagaimana serta terutama dari landasan argumentasi, buku ini adalah sebuah gambaran yang utuh, sebagai sesuatu yang memiliki nilai “emas” dalam keseharian politik yang hektis.“

Dianne Köster, Sekertaris Serikat Buruh

„Buku Bacaan Landasan Sosial Demokrasi adalah sebuah penyemangat. Di saat, ketika perbedaan politik terlihat seakan tak berbeda satu dengan lainnya, buku ini kembali memastikan tentang landasan yang kuat bagi aksi seseorang. Pembaca disodori berbagai aspek Sosial Demokrasi, teori dan praksis, sebagai pertimbangan. Hal tersebut mempertajam daya penilaian dan pengambilan sikap. Meski bahan yang ditawarkan sangat kaya dan berlimpah, para pembaca tidak kehilangan fokus. Sebuah struktur yang jelas, sebuah sistematik yang baik, mempermudah pembaca menyerap buku ini. Secara keseluruhan: orientasi yang jelas, tanpa simplifikasi.“

Ulrike Witt, PES Activist Group Göttingen

„Sebagai kesimpulan, para penulis buku ini berhasil menjawab tugas penulisan yang tidak mudah terkait kepingan landasan teori Sosial Demokrasi. Dalam bentuk sebuah Buku Bacaan bagi kelompok sasaran yang heterogen. Buku ini, tepat sasaran terutama karena berorientasi praktis dari keseluruhan isinya. Keterbukaan dalam pemanfaatan acuan literatur, sebuah daftar pustaka yang komplit, grafis yang kaya, penunjukkan langkah-langkah antara, ringkasan biografi para teoretisi dan terutama contoh-contoh kontroversial dalam praktek dan wacana mutakhir, menjadi pengantar seminar (*Akademi untuk Sosial Demokrasi*), dan terlepas dari itu, sebagai sebuah benang merah pemikiran dan praktek politik.“

Michael Reschke, Universitas Kassel

(Resensi lengkap, lihat: „Internationale Politik und Gesellschaft“ 2/2009)

„Buku Bacaan Ekonomi dan Sosial Demokrasi adalah sebuah “uluran tangan” yang sangat berhasil bagi siapapun (pembaca) yang berpikir tentang, apakah yang sedang terjadi dalam kehidupan ekonominya, dalam profesinya atau sebagai konsumen benar-benar sejalan dengan apa yang, secara konstitusional, dipahami sebagai “Kewajiban Negara Sosial”.

Josef Vogt, anggota lama SPD, IG-Metall dan AWO

„Dengan latarbelakang perkembangan ekonomi yang dramatis, timbul pertanyaan terkait kebijakan ekonomi dan keuangan dari Sosial Demokrasi, terlepas dari pengelolaan krisis sektor finansial. Dari hasil kegiatan dan seminar di “Akademi untuk Sosial Demokrasi”, buku pelajaran dan bacaan Ekonomi dan Sosial Demokrasi ini menawarkan gambaran tentang sejarah pemikiran ekonomi yang mudah dipahami, baik bagi para politisi maupun – yang mengagumkan - juga bagi pembaca awam.

Ulrich Hörning, Peresensi di Kementerian Keuangan, Juli 2009

(Resensi lengkap dalam „Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte“ 7+8/2009)

„Tentang kebijakan sosial, dipastikan muncul diskusi yang sengit. Di mana-mana, bertabrakan ideologi (pandangan dunia) partai politik satu dengan lainnya. Buku Bacaan 3, bisa menjadi perisai perdebatan. Buku ini mendiskusikan berbagai istilah/defenisi keadilan dengan jelas ditunjukkan, siapa yang menginginkan negara sosial, sambil memperjelas apa yang bisa dipelajari dari negara-negara Skandinavia.

Mata kita pun terbuka: Siapa yang berbicara tentang kebijakn sosial, berbicara tentang pendistribusian (kekayaan). Kerja, pensiun, kesehatan dan pendidikan harus ditata secara adil, lebih-lebih pada saat ini, perlu didanai secara solidaritas. Berbagai hal tersebut didiskusikan dalam buku ini secara mendasar dan mudah dipahami.

TENTANG PENULIS

Julia Bläsius (*1981), saat ini sedang magang di unit Akademi Politik Friedrich-Ebert-Stiftung. Menyelesaikan studi bahasa, ekonomi dan wilayah budaya di Universitas Passau. Gelar *Master of Science* dalam bidang 'European Political Economy' diperoleh dari London School of Economics.

Frederike Boll (*1983) adalah mahasiswi Westfälischen Wilhelms University, Münster, bidang Politik (jurusan utama) serta Ilmu Komunikasi dan Psikologi (jurusan tambahan).

Dr. Christoph Egle (*1974) adalah asisten dosen pada Ludwig-Maximilians-University, München. Ia menyelesaikan studi Ilmu Politik, Sosiologi dan Filsafat serta menulis disertasi (S3) tentang reformasi politik ekonomi dan sosial di Jerman dan Perancis. Pada 2001 hingga 2004, ia terlibat dalam sebuah proyek penelitian studi perbandingan terkait Reformasi Kebijakan Sosial Demokrasi pada Ruprecht-Karls University, Heidelberg.

Tobias Gombert (*1975) bekerja dalam sebuah organisasi yang menyelenggarakan seminar-seminar dewan penasehat perusahaan. Selain itu, ia adalah seorang pelatih dalam seminar dan lokakarya tentang komunikasi. 2003-2005, ia menjabat wakil ketua umum (di tingkat pusat) JUSO, sebuah organisasi pemuda SPD; 2005–2007, ia menjadi anggota dewan pimpinan pusat Juso. Sepanjang waktu tersebut, ia ikut terlibat dalam pembangunan sekolah JUSO. Karya ilmiahnya terkait Jean-Jacques Rousseau, teori Marxis dan Filsafat Moral.

Dr. Erik Gurgsdies (*1944) adalah kepala kantor cabang FES di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, Jerman. Menyelesaikan pendidikan dalam bidang ekonomi dan sosiologi. Sebelum bergabung dengan FES, ia menjadi dosen Ekonomi pada Heimvolkshochschulen (home academy) Bergneustadt dan Ahrensburg serta pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Politik di Hamburg.

Marc Herter (*1974) adalah ketua fraksi SPD di Hamm (Negara Bagian Westfalen/NRW, Jerman). Ia menyelesaikan studi bidang hukum pada Westfälischen Wilhelms University, Münster. Sejak 2002, ia menjadi anggota pimpinan SPD di Negara Bagian NRW, dan sejak 2006, menjadi anggota presidium SPD di negara bagian tersebut.

Dr. Christian Krell (*1977) adalah staf FES yang bertanggung jawab untuk Akademi Sosial Demokrasi. Menamatkan studi ilmu politik, sejarah dan sosiologi pada Siegen University dan University of York. Pada 2007, ia memperoleh gelar S3 dalam ilmu politik terkait kebijakan eropa SPD, Labour Party dan Parti Socialiste.

Dr. Eun-Jeung Lee (*1963) adalah dosen privat (lepas) pada Institut Ilmu Politik Martin-Luther-University, Halle-Wittenberg. Pendidikannya ditempuh di Ehwa-University, Seoul, Korea dan Georg-August University di Göttingen, di mana ia juga menyelesaikan program doktoralnya. Pada 2001, ia menyelesaikan program Habilitasi di Martin-Luther University di Halle-Wittenberg. Ia juga memperoleh beasiswa penelitian di Yayasan Alexander von Humboldt, serta menjadi Fellow dari Japan Foundation dan Visiting Research Fellow di Chuo University, Tokyo. Saat ini ia mengajar di Jerman dan Korea.

Matthias Neis (*1976) kuliah Germanistik, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi pada Westfälischen Wilhelms University, Münster. 2004–2006, ia menjadi asisten ahli pada Institut Penelitian „Arbeit – Bildung – Patizipation“ (Kerja, Pendidikan, Partisipasi) di Recklinghausen. Sejak 2006, ia menjadi asisten ahli pada Friedrich-Schiller University di Jena dalam Projek HBS tentang „Faktor Ekonomi Dukungan Ilmu Pengetahuan“.

Christina Rentzsch (*1982) adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Psikologi pada Westfälischen Wilhelms-University, Münster. Sebelumnya, ia menamatkan pendidikan kejuruan bagian promosi penjualan di Cologne (Koeln).

Martin Timpe (*1978) adalah mahasiswa Ilmu Politik pada Otto-Suhr-Institut di Freie University Berlin. Ia adalah staf anggota Parlemen dari SPD dan sejak 2007 aktif memimpin kegiatan seminar untuk Akademie for Social Democracy. Selain itu, ia juga aktif di kelompok Juso (onderbow SPD) di universitas.

Bacaan lanjut

*Mehr Hintergründe,
Texte und
Materialien zu
den Werten und
Wurzeln der
Sozialen Demokratie
bietet das
Modul „Soziale
Demokratie“ der
Online-Akademie
der Friedrich-
Ebert-Stiftung.
www.fes-online-akademie.de*

Politik memerlukan orientasi yang jelas. Hanya mereka yang mampu menjelaskan dengan gamblang tujuan segala kegiatannya, dipastikan bisa mencapai dan menarik pendukung. Karena itu, buku berjudul asli „Grundlagen der Sozialen Demokratie“ ini mengajukan pertanyaan apa makna dari Sosial Demokrasi pada Abad ke-21 ini. Apa saja nilai yang menjadi landasannya? Apa pula tujuan yang ingin dicapai? Bagaimana semua itu, secara praktis, diimplementasikan?

Semua tema dari buku-buku bacaan SosDem berorientasi pada seminar-seminar dari Akademi Sosial Demokrasi yang merupakan layanan peningkatan kapasitas FES bagi peminat dan aktivis.

Informasi lanjut tentang Akademi: www.fes-soziale-demokratie.de

ISBN 978-979-19998-7-8



9 789791 999878